



Katalog BPS : 3102018

KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK

dalam rangka

KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TAHUN 2014



Penduduk

IPM

IKK

PDRB



BADAN PUSAT STATISTIK

**KEGIATAN PERCEPATAN
PENYEDIAAN DATA STATISTIK**

dalam rangka

**KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN
TAHUN 2014**



Penduduk

IPM

IKK

PDRB



BADAN PUSAT STATISTIK - STATISTICS INDONESIA

Badan Pusat Statistik

**KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK
dalam rangka
KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TAHUN 2014**

ISBN : 978-979-064-631-5

No. Publikasi : 07310.1303

Katalog BPS : 3102018

Diproduksi : CV. Nario Sari

Editor : Subdirektorat Analisis Statistik
Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik
Badan Pusat Statistik

Desainer : Subdirektorat Analisis Statistik

Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013

xii + 123 halaman; 17,6 x 25 cm

Kata Pengantar

Publikasi “Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik dalam rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun 2014” merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini berisi data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengalokasian anggaran transfer ke daerah tahun 2014.

Sesuai Undang-Undang No. 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, BPS harus menyediakan empat dari lima indikator yang digunakan dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU). Data dasar tersebut adalah Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2012, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita 2012, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2013. Selain data, publikasi ini juga dilengkapi dengan ulasan ringkas dan penjelasan teknis masing-masing indikator. Besar harapan kami, informasi yang disampaikan dalam publikasi ini dapat membantu Kementerian Keuangan dan pihak lain dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Disadari bahwa publikasi ini masih memiliki kelemahan. Untuk itu, kritik dan saran demi perbaikan di masa datang sangat diharapkan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Jakarta, Oktober 2013

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Dr. Suryamin, M.Sc.

TIM PENYUSUN

- Pengarah : Dr. Suhariyanto
Drs. Wynandin Imawan, M.Sc
Dr. Ir. Sasmito Hadi Wibowo, M.Sc
- Anggota : J. Bambang Kristianto, MA
Buyung Airlangga, M.Bus.
Drs. Razali Ritonga, MA
Yunita Rusanti, M.Stat.
Dr. Margo Yuwono, S.Si, M.Si
Mufti Swaghara, MBA
Rifa Rufiadi, SKM, M.Si.
Dr. Indra Murty Surbakti MA
- Asisten : Harmawanti Marhaeni, M.Sc
Nur Indah Kristiani, S.Si, M.SE.
Tri Nugrahadi, S.Si., M.A., Ph.D
Mohamad Irawan, S.Si.
Dendi Handiyatmo, S.ST, M.Si.
Akhmad Fikri, S.ST
- Penyiapan Naskah : Dimas Hari Santoso, S.Si

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
<hr/>	
1. OVERVIEW	1
<hr/>	
2. PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN 2013	5
<hr/>	
3. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2012	11
<hr/>	
4. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2013	21
<hr/>	
5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PERKAPITA 2012	25
<hr/>	
6. CATATAN TEKNIS	29
a. PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	30
b. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	31
c. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI	35
d. PDRB PERKAPITA	36
<hr/>	
TABEL RINGKASAN	37
LAMPIRAN	103

<http://www.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Persebaran Jumlah dan Persentase Penduduk Indonesia, 2013	7
Tabel 2.2	Kepadatan Penduduk Indonesia Pertengahan Tahun 2013	8
Tabel 3.1	Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi dan Terendah, 2012	16
Tabel 3.2	Sepuluh Kabupaten/Kota yang Menghasilkan <i>Reduksi Shortfall</i> terbesar, 2012	17
Tabel 3.3	Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antar Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, 2012	18
Tabel 6.1	Daftar Paket Komoditas yang Digunakan dalam Penghitungan PPP	34
Tabel R1	Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 33 Provinsi	38
Tabel R2	Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota	39
Tabel R3	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota	71

<http://www.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Dua Puluh (20) Kabupaten/Kota dengan Penduduk Terbesar di Indonesia , 2013	9
Gambar 3.1	Provinsi dengan IPM Tertinggi, 2011-2012	12
Gambar 3.2	Reduksi Shortfall Provinsi dengan IPM Tertinggi, 2011-2012	13
Gambar 3.3	Provinsi dengan IPM Terendah , 2011-2012	13
Gambar 3.4	Reduksi Shortfall Provinsi dengan IPM Terendah, 2011-2012	14
Gambar 3.5	Kisaran IPM Tingkat Provinsi, 2012	14
Gambar 3.6	Kesenjangan Status Pembangunan Provinsi di Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur dalam IPM, 2012	15
Gambar 3.7	Status Pembangunan Manusia antara Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2012	19
Gambar 5.1	PDRB dengan Migas per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2012	27

<http://www.bps.go.id>

Daftar Lampiran

Lampiran 1	Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun Indonesia menurut Provinsi, 2013	104
Lampiran 2	Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2012	105
Lampiran 3	Indeks Kemahalan Konstruksi menurut Provinsi, 2013	106
Lampiran 4	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas menurut Provinsi, 2012	107
Lampiran 5	Angka Harapan Hidup (e_0) menurut Provinsi, 2012	108
Lampiran 6	Angka Melek Huruf (AMH) menurut Provinsi, 2012	109
Lampiran 7	Rata-Rata Lama Sekolah menurut Provinsi, 2012	110
Lampiran 8	Paritas Daya Beli (PPP) menurut Provinsi, 2012	111
Lampiran 9	Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sumatera	112
Lampiran 10	Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Jawa	113
Lampiran 11	Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara	114
Lampiran 12	Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Kalimantan	115
Lampiran 13	Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sulawesi	116
Lampiran 14	Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua	117
Lampiran 15	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sumatera	118
Lampiran 16	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Jawa	119

Lampiran 17	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara	120
Lampiran 18	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi menurut Provinsi di Pulau Kalimantan	121
Lampiran 19	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi menurut Provinsi di Pulau Sulawesi	122
Lampiran 20	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua	123

<http://www.bps.go.id>



OVERVIEW

<http://www.bps.go.id>

1 | Overview

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat, serta juga meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas tersebut, pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah, maupun penerimaan lainnya yang sah menurut peraturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah berhak untuk menerima transfer dari pemerintah pusat (sebagaimana amanat UU No. 32 tahun 2004) dalam bentuk dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Tujuan transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik di seluruh negeri.

DAU merupakan sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di seluruh Indonesia setiap tahunnya yang bersumber dari pendapatan APBN dan menjadi bagian dari APBD. DAU bersifat "*Block Grant*" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Jumlah DAU yang diterima setiap daerah setiap tahunnya ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap Provinsi/Kabupaten/Kota menerima DAU dengan besaran yang berbeda, dan hal ini diatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah. Secara nasional, besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.

Metode penghitungan DAU mencakup dua hal, yaitu alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF). Alokasi dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya ($t-1$), yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku. Alokasi berdasarkan celah fiskal pada suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional.

Besaran CF diperoleh dengan rumus: $CF = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$. Komponen variabel kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) adalah sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah, terdiri dari 5 variabel, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. Empat dari kelima variabel tersebut (Penduduk, IPM, IKK, PDRB) disediakan oleh BPS.

Data jumlah penduduk yang digunakan dalam penghitungan DAU adalah jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada pertengahan tahun 2013, tercatat penduduk Indonesia sebanyak 247,42 juta jiwa, terbanyak di Pulau Jawa (140,83 juta jiwa atau 56,92 persen), diikuti oleh Pulau Sumatera (53,30 juta jiwa atau 21,54 persen). Akibatnya, kepadatan tertinggi sebagian besar terdapat di Pulau Jawa, khususnya di DKI Jakarta (14 992 jiwa/Km²), Jawa Barat (1 280 jiwa/Km²), dan Banten (1 188 jiwa/Km²). Selain itu, 19 dari 20 besar peringkat Kabupaten/Kota berpenduduk terbanyak juga berada di Pulau Jawa, dimana Kabupaten Bogor merupakan Kabupaten/Kota terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduk 5,1 juta jiwa, diikuti Kabupaten Bandung (3,4 juta jiwa).

Peningkatan jumlah penduduk tampaknya juga diiringi dengan capaian pada pembangunan manusianya. IPM Indonesia tahun 2012 meningkat sebesar 0,52 poin dibanding tahun 2011 dari 72,77 menjadi 73,29. Peningkatan capaian tersebut, tampaknya juga diikuti oleh penurunan disparitas IPM antar Provinsi. IPM tertinggi, tercatat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 78,33, sedangkan IPM terendah terdapat di Provinsi Papua (65,86). Dari 33 Provinsi, sebanyak 32 Provinsi telah berkategori menengah atas ($66 \leq \text{IPM} < 80$) dan hanya Provinsi Papua yang masih berkategori menengah bawah ($50 \leq \text{IPM} < 66$). Pada level Kabupaten/Kota, IPM tertinggi terdapat di Kota Yogyakarta, Provinsi DI Yogyakarta (80,24) dan terendah di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua (48,80).

Variabel ketiga adalah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang membandingkan tingkat kemahalan harga konstruksi antar wilayah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada level Provinsi, di tahun 2013, indeks IKK tertinggi terdapat

di Provinsi Kepulauan Riau (109,42), diikuti Provinsi Kalimantan Barat (107,38), sedangkan indeks terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (80,01). Pada level Kabupaten/Kota, indeks tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua (461,52) dan terendah di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (70,46).

Disparitas capaian PDRB Per Kapita antar Provinsi sangat tajam. Pada level Provinsi, PDRB Per Kapita (dengan migas) tertinggi pada tahun 2012 terdapat di Provinsi DKI Jakarta (Rp 112,14 Juta) dan terendah di Provinsi Maluku Utara (Rp 6,37 Juta). Sedangkan pada level Kabupaten/Kota, PDRB Per Kapita (dengan migas) tertinggi terdapat di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebesar Rp 443,67 Juta, sedangkan PDRB Per Kapita terendah terdapat di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, sebesar Rp 2,83 Juta.

<http://www.bps.go.id>

2

PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN 2013

<http://www.bps-go.id>

2 | Penduduk Pertengahan Tahun 2013



Definisi	: Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
Sumber Data	: Sensus Penduduk 2000, Sensus Penduduk Aceh Nias 2005, Sensus Penduduk 2010.
Cakupan	: 33 Provinsi, 497 Kabupaten/Kota, 6 651 Kecamatan, dan 77 126 Desa/Kelurahan. Untuk keperluan DAU, jumlah Kabupaten/Kota tanpa DKI Jakarta adalah 491 Kabupaten/Kota.

Dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU), salah satu variabel yang digunakan adalah jumlah penduduk. Data penduduk yang dibutuhkan adalah jumlah penduduk per Kabupaten/Kota kondisi pertengahan tahun. Awalnya, proyeksi penduduk yang dihitung BPS hanya tersedia secara nasional dan tingkat Provinsi. Oleh sebab itu, sejak tahun 2003, BPS melakukan penghitungan proyeksi atau estimasi penduduk per Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan data penduduk sebagai dasar dalam penghitungan DAU.

Berbeda dengan proyeksi penduduk nasional dan per Provinsi yang dihitung dengan metode komponen karena memiliki informasi kependudukan yang lengkap, maka data penduduk per Kabupaten/Kota ini dihitung dengan metode Geometrik. Pilihan ini digunakan karena ketersediaan informasi kependudukan yang tidak cukup untuk menggunakan metode komponen. Sebagai data dasar digunakan data penduduk hasil Sensus Penduduk maupun Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang terakhir untuk memproyeksikan penduduk per Kabupaten/Kota pada tahun berikutnya.

Data penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 resmi diumumkan dan dapat digunakan untuk berbagai kebijakan. Disamping data jumlah penduduk hasil SP2010, data penduduk hasil SP2000 juga digunakan sebagai data dasar dalam membuat perkiraan/proyeksi jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota dengan referensi waktu pertengahan tahun. Selanjutnya pada tahun-tahun mendatang yang tidak dilakukan sensus atau survei kependudukan, maka data jumlah penduduknya merupakan angka hasil dari proyeksi penduduk.

Tabel 2.1. Persebaran Jumlah dan Persentase Penduduk Indonesia, 2013

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Persentase
	Pulau Sumatera	53 299 156	21,54
1	Aceh	4 791 924	1,94
2	Sumatera Utara	13 326 307	5,39
3	Sumatera Barat	5 010 859	2,03
4	Riau	6 125 283	2,48
5	Kepulauan Riau	1 933 796	0,78
6	Jambi	3 317 034	1,34
7	Sumatera Selatan	7 823 588	3,16
8	Bangka Belitung	1 335 467	0,54
9	Bengkulu	1 791 612	0,72
10	Lampung	7 843 286	3,17
	Pulau Jawa	140 823 131	56,92
11	DKI Jakarta	9 955 084	4,02
12	Jawa Barat	45 275 676	18,30
13	Banten	11 482 486	4,64
14	Jawa Tengah	32 500 468	13,14
15	DI Yogyakarta	3 541 922	1,43
16	Jawa Timur	38 067 495	15,39
	Pulau Kalimantan	14 585 614	5,89
17	Kalimantan Barat	4 486 478	1,81
18	Kalimantan Tengah	2 318 435	0,94
19	Kalimantan Selatan	3 823 758	1,55
20	Kalimantan Timur	3 357 824	1,36
21	Kalimantan Utara	599 119	0,24
	Pulau Sulawesi	18 096 703	7,31
22	Sulawesi Utara	2 343 527	0,95
23	Gorontalo	1 105 773	0,45
24	Sulawesi Tengah	2 775 118	1,12
25	Sulawesi Selatan	8 264 344	3,34
26	Sulawesi Barat	1 247 330	0,50
27	Sulawesi Tenggara	2 360 611	0,95
	Pulau Bali & Nusa Tenggara	13 702 894	5,54
28	Bali	4 122 917	1,67
29	Nusa Tenggara Barat	4 629 219	1,87
30	Nusa Tenggara Timur	4 950 758	2,00
	Pulau Maluku & Papua	6 917 100	2,80
31	Maluku	1 656 917	0,67
32	Maluku Utara	1 110 559	0,45
33	Papua	3 305 252	1,34
34	Papua Barat	844 372	0,34
	INDONESIA	247 424 598	100,00

Persebaran Penduduk

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pertengahan tahun 2013 sebesar 247 424 598 jiwa. Bila dilihat dari sisi persebaran penduduk, sebagian besar penduduk Indonesia berada di pulau Jawa yaitu 140 823 131 jiwa atau sekitar 56,92 persen dari total penduduk Indonesia tahun 2013. Kemudian diikuti oleh pulau Sumatera dengan penduduk sebesar 53 299 156 jiwa atau sebesar 21,54 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara pulau yang memiliki jumlah penduduk terendah terdapat di pulau Maluku dan Papua dengan jumlah penduduk sebesar 6 917 100 jiwa atau sebesar 2,80 persen.

Jumlah penduduk per Provinsi menunjukkan bahwa Provinsi yang paling banyak penduduknya adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 45 275 676 jiwa atau sebesar 18,30 persen dari total penduduk Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua dan ketiga adalah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, masing-masing sebesar 38 067 495 dan 32 500 468 jiwa atau sebesar 15,39 dan 13,14 persen dari total penduduk Indonesia.

Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Provinsi yang baru saja terbentuk yaitu Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah penduduk 599 119 jiwa atau hanya sebesar 0,24 persen dari total penduduk Indonesia. Provinsi Papua Barat merupakan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terendah kedua dengan jumlah penduduk sebesar 844 372 jiwa atau 0,34 persen.

Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk Indonesia Pertengahan, 2013

No	Provinsi	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)	No	Provinsi	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
1	Aceh	83	18	Kalimantan Tengah	15
2	Sumatera Utara	183	19	Kalimantan Selatan	99
3	Sumatera Barat	119	20	Kalimantan Timur	26
4	Riau	70	21	Kalimantan Utara	8
5	Kepulauan Riau	236	22	Sulawesi Utara	169
6	Jambi	66	23	Gorontalo	98
7	Sumatera Selatan	85	24	Sulawesi Tengah	45
8	Bangka Belitung	81	25	Sulawesi Selatan	177
9	Bengkulu	90	26	Sulawesi Barat	74
10	Lampung	227	27	Sulawesi Tenggara	62
11	DKI Jakarta	14 992	28	Bali	713
12	Jawa Barat	1 280	29	Nusa Tenggara Barat	249
13	Banten	1 188	30	Nusa Tenggara Timur	102
14	Jawa Tengah	991	31	Maluku	35
15	DI Yogyakarta	1 130	32	Maluku Utara	35
16	Jawa Timur	796	33	Papua	10
17	Kalimantan Barat	30	34	Papua Barat	9

Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2013 sebagian besar masih berpusat di pulau Jawa. Kepadatan penduduk terbesar terletak di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 14 992 jiwa/Km², diikuti Jawa Barat dan Banten masing-masing sebesar 1 280 jiwa/Km², dan 1 188 jiwa/Km². Disisi lain, Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat dan Papua merupakan Provinsi dengan kepadatan penduduk terendah sekitar 8 jiwa/Km², 9 jiwa/Km² dan 10 jiwa/Km². Perbedaan ini menunjukkan disparitas kepadatan penduduk yang cukup tinggi antar Provinsi di Indonesia.

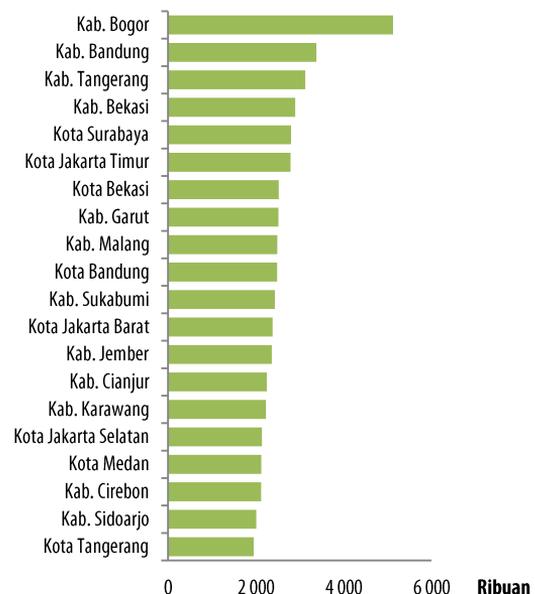
Penduduk Kabupaten/Kota

Gambar 2.1 menunjukkan peringkat 20 besar jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota di Indonesia, 19 Kabupaten/Kota diantaranya adalah Kabupaten/Kota yang terletak di pulau Jawa. Sedangkan satu Kabupaten/Kota lainnya terletak di pulau Sumatera yaitu Kota Medan.

Kabupaten Bogor masih merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 5,1 juta jiwa. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbanyak urutan kedua adalah Kabupaten Bandung sekitar 3,4 juta jiwa dan urutan ketiga adalah Kabupaten Tangerang dengan jumlah penduduk 3,1 juta jiwa. Urutan peringkat 3 besar jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota ini tidak mengalami perubahan. Perubahan urutan peringkat terlihat mulai urutan peringkat 4 sampai 20 Kabupaten/Kota jika dibandingkan keadaan urutan peringkat pada tahun 2012.

Perubahan peringkat yang cukup signifikan terlihat di Kota Bekasi, pada tahun 2012 Kota Bekasi menempati peringkat 10 (sepuluh) menjadi peringkat 7 (tujuh) pada tahun 2013. Beberapa Kabupaten/Kota juga mengalami pergeseran peringkat jumlah penduduk namun tidak signifikan seperti Kabupaten Bekasi, Kota Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Barat.

Gambar 2.1. Dua Puluh Kabupaten/Kota dengan Penduduk Terbesar di Indonesia, 2013



3

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2012

<http://www.bps.go.id>

3 | Indeks Pembangunan Manusia 2012



Definisi : Indeks komposit yang disusun dari tiga indikator : (i) lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; (ii) pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan (iii) standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP rupiah). Nilai indeks berkisar antara 0-100.

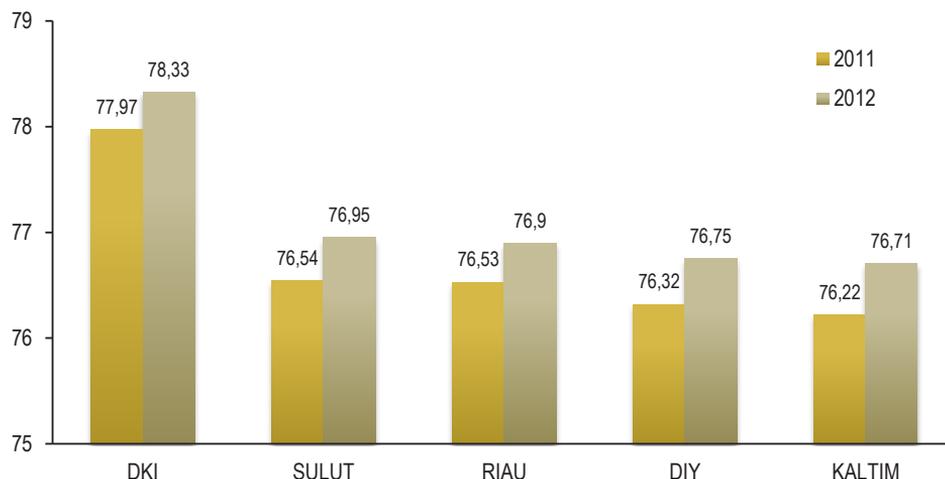
Sumber Data : Susenas (Kor dan Modul Konsumsi), Sensus Penduduk 2000 (SP2000), SUPAS 2005, IHK.

Cakupan : 33 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota. Untuk keperluan DAU, jumlah Kabupaten/Kota tanpa DKI Jakarta adalah 491 Kabupaten/Kota.

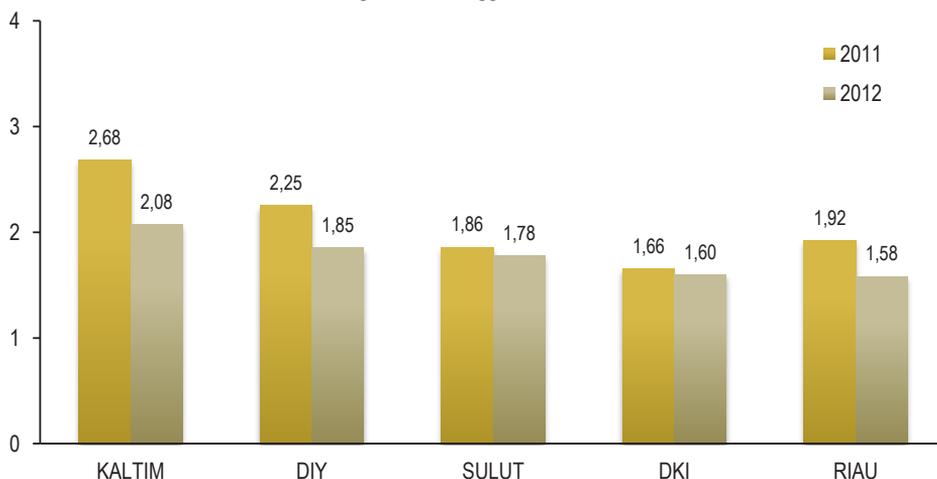
Capaian IPM Provinsi

Perkembangan IPM Provinsi di Indonesia menunjukkan suatu peningkatan. Angka IPM Indonesia pada tahun 2012 meningkat sebesar 0,52 poin dibanding tahun 2011 yaitu dari 72,77 menjadi 73,29. Perbedaan pencapaian antara IPM tertinggi dengan IPM terendah sekitar 12,47 poin dengan rentang 78,33 untuk DKI Jakarta dan 65,86 untuk Papua. Dibandingkan dengan perbedaan pencapaian tahun 2011 yang sebesar 12,62 poin, maka perbedaan tahun 2012 relatif lebih rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa disparitas pembangunan manusia di tingkat Provinsi relatif menurun.

Gambar 3.1. Provinsi dengan IPM Tertinggi, 2011-2012



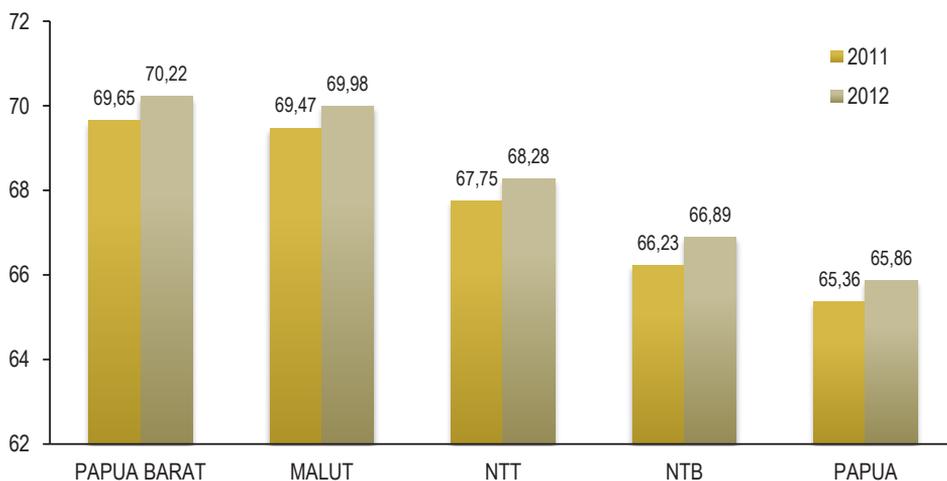
Gambar 3.2. Reduksi Shortfall Provinsi dengan IPM Tertinggi, 2011-2012



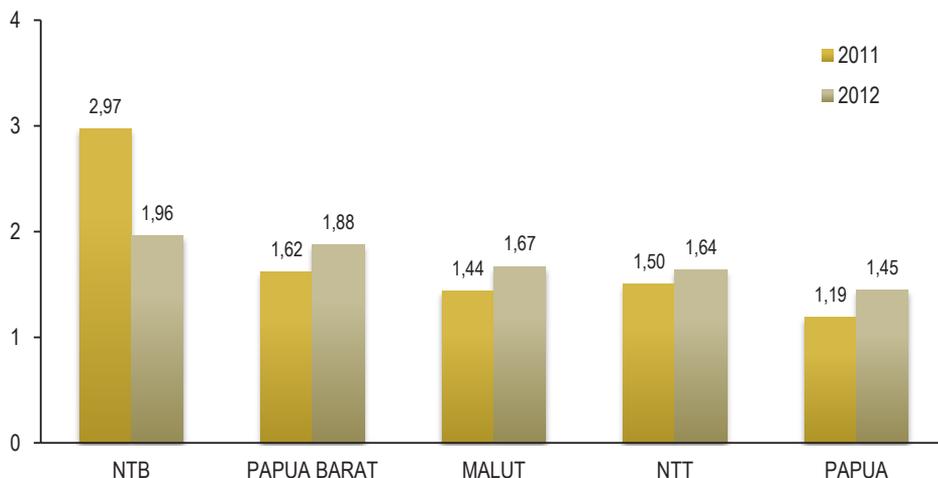
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2012, DKI Jakarta tercatat sebagai Provinsi dengan IPM tertinggi yaitu mencapai 78,33. Kemudian berturut-turut diikuti oleh Provinsi Sulawesi Utara sebesar 76,95; Provinsi Riau sebesar 76,90; Provinsi DI Yogyakarta sebesar 76,75; dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 76,71 (Gambar 3.1). Selama empat tahun terakhir, kelima Provinsi ini selalu tercatat sebagai lima Provinsi terbaik dalam capaian pembangunan manusia di Indonesia.

Kecepatan pembangunan manusia pada kelima Provinsi ini berada pada rentang 1 dan 3. Dari kelima Provinsi dengan IPM tertinggi, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kecepatan tertinggi dalam pembangunan manusia yang ditandai dengan nilai reduksi shortfall sebesar 2,08. Kemudian diikuti oleh Provinsi DI Yogyakarta sebesar 1,85; Provinsi Sulawesi Utara sebesar 1,78; Provinsi DKI Jakarta sebesar 1,60 dan yang terendah Provinsi Riau sebesar 1,58.

Gambar 3.3. Provinsi dengan IPM Terendah , 2011-2012



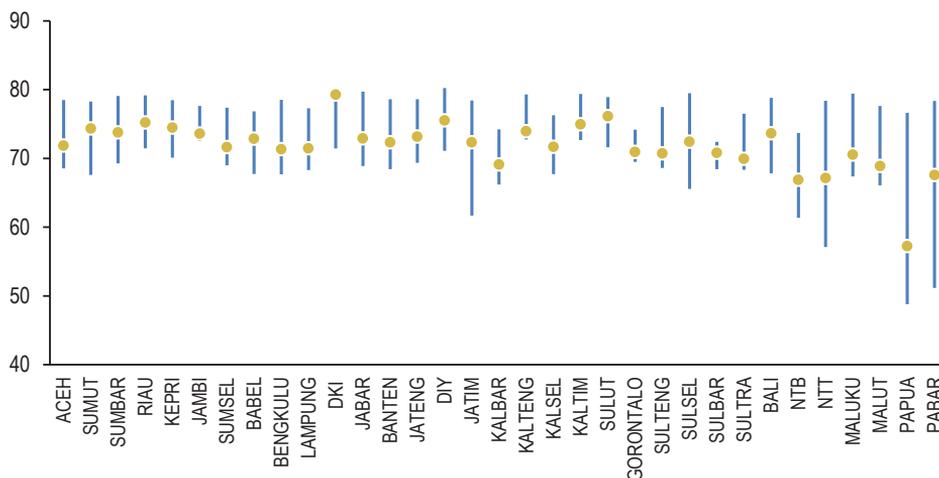
Gambar 3.4. Reduksi Shortfall Provinsi dengan IPM Terendah, 2011-2012



Provinsi dengan pencapaian IPM terendah adalah Provinsi Papua, dengan nilai IPM sebesar 65,86. Selanjutnya empat Provinsi lain yang memiliki IPM terendah berturut-turut adalah Nusa Tenggara Barat (66,89), Nusa Tenggara Timur (68,28), Maluku Utara (69,98), dan Papua Barat (70,22) (Gambar 3.3). Kelima Provinsi ini juga menempati posisi terendah dalam capaian IPM tahun 2011.

Reduksi *shortfall* kelima Provinsi tersebut pada tahun 2012 berada pada rentang 1 dan 2, dengan capaian tertinggi diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1,96. Sementara pada Provinsi Papua, selain capaian IPM-nya yang paling rendah di antara kelima Provinsi tersebut, capaian reduksi *shortfall*-nyapun terendah yaitu sebesar 1,45.

Gambar 3.5. Kisaran IPM Tingkat Provinsi, 2012



Dilihat dari kisaran IPM menurut Provinsi seperti pada Gambar 3.5, terlihat bahwa sebaran IPM di hampir semua Provinsi relatif homogen, kecuali untuk beberapa Provinsi seperti Papua, Papua Barat, NTT, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian IPM dalam Provinsi (baca: Kabupaten/Kota) yang bersangkutan sebarannya sangat beragam. Sebagai ilustrasi, di Provinsi Papua angka IPM tertinggi sebesar 76,64 (Kota Jayapura), sedangkan IPM terendah sebesar 48,80 (Kabupaten Nduga). Hal ini berarti disparitas IPM di Provinsi Papua sebesar 27,84.

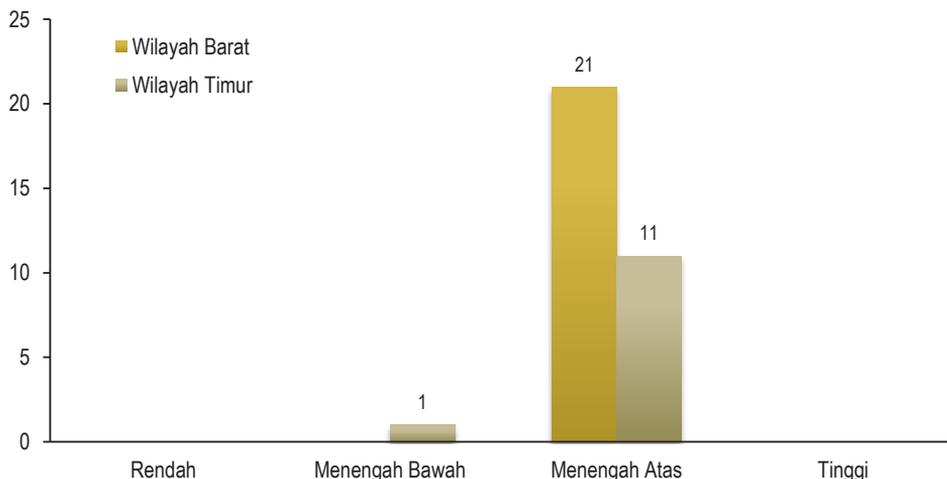
Provinsi yang memiliki sebaran IPM relatif paling homogen dibandingkan Provinsi lainnya adalah Sulawesi Barat, dengan nilai IPM tertinggi sebesar 72,41 (Kabupaten Majene) dan IPM terendah sebesar 68,44 (Kabupaten Polewali Mamasa). Hal ini berarti disparitas IPM di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,97. Provinsi lain yang juga memiliki sebaran IPM relatif homogen yaitu Provinsi Gorontalo, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Status Pembangunan Provinsi

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu kategori tinggi ($IPM \geq 80$), kategori menengah atas ($66 \leq IPM < 80$), kategori menengah bawah ($50 \leq IPM < 66$), dan kategori rendah ($IPM < 50$). Jika diukur menurut skala internasional, dari 33 Provinsi di Indonesia pada tahun 2012, semua Provinsi termasuk dalam kategori IPM menengah atas kecuali Provinsi Papua yang termasuk dalam kategori IPM menengah bawah.

Variasi pencapaian pembangunan manusia antar Provinsi memberikan gambaran adanya ketidakmerataan perkembangan di berbagai sektor pembangunan. Ketidakmerataan ini dapat dilihat dengan menggunakan berbagai

Gambar 3.6. Kesenjangan Status Pembangunan Provinsi di Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur dalam IPM, 2012



indikator sosial dan ekonomi. Beberapa indikator sosial dan ekonomi yang terangkum dalam IPM merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan.

Gambar 3.6 di atas memperlihatkan pencapaian pembangunan manusia di tingkat Provinsi. Sebesar 96,97, atau telah mencapai kategori IPM menengah atas, namun terlihat kesenjangan pencapaian pembangunan manusia di Provinsi wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur Indonesia, di mana antara seluruh Provinsi di Wilayah Indonesia Barat tergolong pada kategori IPM menengah atas. Sementara di wilayah timur terdapat 11 Provinsi yang tergolong menengah atas, dan 1 Provinsi lainnya masih berkategori menengah bawah yaitu Provinsi Papua.

Sebenarnya, pembangunan manusia di wilayah bagian timur telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan pembangunan manusia di wilayah bagian timur masih relatif lambat dibandingkan pembangunan di wilayah bagian barat. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk untuk mempercepat peningkatan IPM dalam mengejar ketertinggalannya dengan wilayah Indonesia barat. Dengan demikian, kesenjangan antara wilayah Indonesia barat dengan wilayah Indonesia timur dapat dikurangi.

Capaian IPM Kabupaten/Kota

Tidak jauh berbeda dengan perkembangan IPM Provinsi, keseluruhan IPM Kabupaten/Kota juga memperlihatkan suatu peningkatan selama periode 2011-2012. Dilihat dari tingkat kecepatan peningkatan IPM antara satu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya, secara umum berbeda. Beberapa Kabupaten/Kota mencapai peningkatan IPM cukup pesat, sedangkan beberapa Kabupaten/Kota lainnya memiliki tingkat kecepatan yang cukup lambat.

Tabel 3.1 menyajikan urutan lima Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi dan lima Kabupaten/Kota dengan IPM terendah pada tahun 2012. Pada tabel tersebut, posisi Kabupaten/Kota untuk lima urutan terendah umumnya merupakan Kabupaten baru.

Selain itu, dapat dilihat bahwa kelima Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi sebagian berasal dari Pulau Jawa, yaitu dua Kabupaten/Kota dari

Tabel 3.1. Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi dan Terendah, 2012

Kabupaten/Kota	IPM
5 Kabupaten/Kota Tertinggi	
Kota Yogyakarta	80,24
Kota Jakarta Selatan	80,17
Kota Jakarta Timur	79,80
Kota Depok	79,71
Kota Makasar	79,49
5 Kabupaten/Kota Terendah	
Puncak	49,77
Memberamo Tengah	49,73
Yalimo	49,31
Intan Jaya	49,17
Nduga	48,80

Tabel 3.2. Sepuluh Kabupaten/Kota yang Menghasilkan Reduksi Shortfall Terbesar, 2012

Kabupaten/Kota	Provinsi	IPM	Reduksi Shortfall 2011-2012
Gianyar	Bali	74,49	3,97
Kota Banjar Baru	Kalimantan Selatan	76,28	3,48
Takalar	Sulawesi Selatan	70,14	3,39
Bondowoso	Jawa Timur	64,98	3,24
Mamuju	Sulawesi Barat	70,76	3,24
Gresik	Jawa Timur	75,97	3,22
Kutai Timur	Kalimantan Timur	73,75	3,20
Kota Mataram	NTB	73,70	3,18
Nagan Raya	Aceh	70,64	3,16
Banyuwangi	Jawa Timur	70,53	3,14

Provinsi DKI Jakarta, satu Kota dari Provinsi Jawa Barat, satu Kota berasal dari Provinsi DI Yogyakarta, dan satu Kota lagi berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, kelima Kabupaten dengan IPM terendah semuanya berasal dari Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi yang berada di ujung timur Indonesia ini masih tertinggal dibanding Provinsi lainnya, sementara pergerakan perkembangan pembangunannya juga sangat lambat.

Selanjutnya, Tabel 3.2 menyajikan Kabupaten/Kota yang mencatat kemajuan pesat selama tahun 2011-2012. Terdapat 10 Kabupaten/Kota yang tersebar di beberapa Provinsi yang mencatat kemajuan cukup pesat. Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali mencatat kemajuan yang tercepat dengan reduksi shortfall sebesar 3,97.

Status Pembangunan Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan manusia pada seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia mengalami kemajuan pada tahun 2012. Namun demikian, kemajuan pembangunan manusia antar suatu Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lainnya sangat bervariasi. Kemajuan ini sangat tergantung dari komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

Berdasarkan skala internasional, dari 497 Kabupaten/Kota di Indonesia yang dihitung IPM-nya, terdapat 2 Kabupaten/Kota yang sudah tergolong dalam kategori capaian IPM tinggi, dan sebanyak 458 Kabupaten/Kota (92,15 persen) berkategori menengah atas. Kemudian, 30 Kabupaten/Kota (6,04 persen) tergolong dalam

Tabel 3.3. Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antara Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, 2012

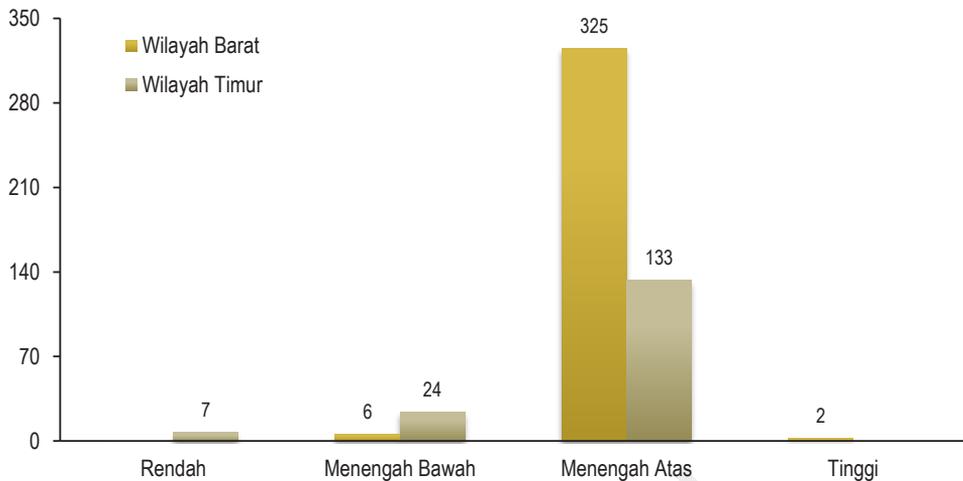
Wilayah Barat	IPM	Wilayah Timur	IPM
Tertinggi		Tertinggi	
Kota Yogyakarta	80,24	Kota Makasar	79,49
Kota Jakarta Selatan	80,17	Kota Ambon	79,41
Kota Jakarta Timur	79,80	Manado	78,92
Kota Depok	79,71	Kota Pare Pare	78,63
Kota Jakarta Barat	79,43	Kota Kupang	78,37
Terendah		Terendah	
Bangkalan	65,69	Puncak	49,77
Situbondo	65,06	Mamberamo Tengah	49,73
Bondowoso	64,98	Yalimo	49,31
Probolinggo	64,35	Intan Jaya	49,17
Sampang	61,67	Nduga	48,80

kelompok IPM menengah bawah dan selebihnya 7 Kabupaten/Kota (1,41 persen) masih tergolong ke dalam kelompok IPM rendah. Kabupaten yang tergolong IPM rendah seluruhnya terletak di Provinsi Papua.

Disparitas pencapaian IPM di Kabupaten/Kota di wilayah bagian barat, dan Kabupaten/Kota di wilayah bagian timur masih relatif besar. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/Kota di wilayah barat dan wilayah timur masih timpang. Di tingkat Kabupaten/Kota, pencapaian IPM tertinggi adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 80,24. Sedangkan pencapaian IPM terendah adalah Kabupaten Nduga di Provinsi Papua sebesar 48,80, sehingga disparitas pembangunan manusia antara Kota Yogyakarta (wilayah barat) dan Kabupaten Nduga (wilayah timur) sekitar 31,44 poin. Nilai disparitas ini lebih besar dibandingkan dengan disparitas pencapaian IPM tahun 2011.

Menarik untuk dicermati, perbedaan urutan IPM tertinggi dan terendah di masing-masing wilayah, baik di wilayah bagian barat maupun di wilayah bagian timur. Pencapaian IPM tertinggi maupun terendah di wilayah bagian barat didominasi oleh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Kota Yogyakarta menempati urutan tertinggi dengan IPM sebesar 80,24, yang diikuti oleh Kota Jakarta Selatan (80,17), Kota Jakarta Timur (79,80), Kota Depok (79,71), dan Kota Jakarta Barat (79,43). Sedangkan Kabupaten/Kota dengan IPM terendah di Pulau Jawa

Gambar 3.7. Status Pembangunan Manusia antara Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2012



seluruhnya berada di Provinsi Jawa Timur, terutama yang termasuk wilayah tapal kuda; yaitu Bangkalan (65,69), Situbondo (65,06), Bondowoso (64,98), Probolinggo (64,35), dan Sampang (61,67). Rendahnya IPM khususnya di wilayah tapal kuda terkait dengan budaya masyarakat setempat.

Urutan IPM tertinggi di wilayah bagian timur Indonesia adalah sebagai berikut: Kota Makassar (79,49), Kota Ambon (79,41), Manado (78,92), Kota Pare Pare (78,63), dan Kota Kupang (78,73). Sementara itu, lima Kabupaten/Kota dengan urutan IPM terendah semuanya terdapat di Provinsi Papua (lihat Tabel 3.1).

Ketimpangan pembangunan manusia antar Kabupaten/Kota juga dapat dilihat dari status pembangunannya. Gambar 3.7 menyajikan status pembangunan manusia di Kabupaten/Kota menurut wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur pada tahun 2012. Dari gambar tersebut masih terlihat adanya ketimpangan pembangunan manusia antar Kabupaten/Kota di wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di wilayah bagian barat terlihat relatif lebih maju dibanding wilayah bagian timur. Di wilayah Indonesia bagian barat, sekitar 97 persen Kabupaten/Kota memiliki status pembangunan manusia dengan kategori menengah atas, sedangkan di wilayah Indonesia timur hanya terdapat 81,10 persen Kabupaten/Kota. Pada kategori IPM menengah bawah, di wilayah Indonesia bagian barat masih ada 1,80 persen Kabupaten/Kota, sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur terdapat 14,63 persen Kabupaten/Kota. Selain itu, ternyata masih terdapat 4,27 persen Kabupaten di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki status pembangunan dengan kategori IPM rendah.

4

INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI 2013

<http://www.bps.go.id>

4 | Indeks Kemahalan Konstruksi 2013

Definisi	: Indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu Kabupaten/Kota atau Provinsi terhadap TKK Kabupaten/Kota atau Provinsi lain.
Sumber Data	: Harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh melalui survei yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota.
Cakupan	: 33 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota. Untuk keperluan DAU, jumlah Kabupaten/Kota tanpa DKI Jakarta adalah 491 Kabupaten/Kota.

Konsep Pemikiran

Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing. Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya, harus didasarkan atas suatu pendekatan atau kompromi tertentu. Misalnya, yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam rancangan dan model.

Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/daerah, dikenal ada dua metode penghitungan. Pertama, dengan pendekatan input dan kedua, pendekatan harga output. Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan *overhead cost*. Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk *management cost* dan keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan konstruksi antar wilayah.

Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa mencakup *overhead cost* dan produktivitas pekerja tanpa memasukan *management cost* dan keuntungan kontraktor. Caranya adalah dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga

komponen tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek yang besarnya berada diatas harga input tetapi di bawah harga output, karena sudah memasukkan *overhead cost* dan upah tetapi mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data seperti ini bisa didapatkan dari dokumen *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai.

Mendapatkan data BoQ dari tiap Kabupaten/Kota setiap tahun adalah hal yang mustahil. Disamping karena tidak semua Kabupaten/Kota mempunyai proyek yang sama atau sebanding setiap tahun, juga karena volume pekerjaan mengumpulkan BoQ cukup besar, padahal IKK harus dihitung setiap tahun dan dirilis pada pertengahan tahun berjalan. Oleh karena itu ditempuh jalan menggunakan BoQ tiap Kabupaten/Kota pada tahun tertentu sebagai penimbang indeks harga bahan bangunan, upah, dan sewa peralatan konstruksi pada tahun berjalan, setelah itu dibobot dengan realisasi APBD pembentukan modal tetap tiap-tiap Kabupaten/Kota untuk menunjukkan kegiatan konstruksi mana yang lebih penting di tiap-tiap Kabupaten/Kota, setelah itu dibandingkan antar Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Indeks Kemahalan Konstruksi.

Dengan digunakannya realisasi APBD pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka setiap tahun IKK Kabupaten/Kota relatif terhadap Kabupaten/Kota berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing Kabupaten/Kota.

Indeks Kemahalan Konstruksi 2013

Sebagaimana diketahui bahwa IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Saat ini, perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Sehingga, material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013, penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, IKK tahun 2013 menggunakan data harga komoditi yang dikumpulkan dalam 2 periode pencacahan, yaitu periode akhir Januari dan periode akhir April, sehingga lebih tervalidasi dibandingkan hanya menggunakan satu kali pengambilan data lapangan. Dengan menggunakan BoQ tahun 2012, realisasi APBD pembentukan modal tetap 2012, dan rata-rata harga komoditi Januari-April, diperoleh Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota tahun 2013 sebagaimana terlampir.

5

PDRB PER KAPITA 2012

<http://www.bps-go.id>

5 | Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Definisi	: PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) semua kegiatan ekonomi, mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, pada suatu wilayah dalam satu kurun waktu tertentu.
Sumber Data	: Sensus, Survei, dan dari produk Administratif Instansi Pemerintah, Perusahaan dan Lembaga lainnya.
Cakupan	: 33 Provinsi dan 497 Kabupaten/Kota. Untuk keperluan DAU, jumlah Kabupaten/Kota tanpa DKI Jakarta adalah 491 Kabupaten/Kota.

Bab ini mencakupi definisi atas PDRB, output, input antara, dan nilai tambah (*value added*). Tabel pertumbuhan ekonomi disajikan menurut harga konstan. Selebihnya hanya menurut harga berlaku dimana besaran tersebut diperlukan untuk penghitungan dana alokasi umum (DAU).

Harga berlaku atau *current prices* merupakan penilaian terhadap barang dan jasa menurut harga atau nilai yang sesungguhnya atau yang melekat pada barang dan jasa tersebut. Singkatnya, harga yang digunakan untuk menilai barang atau jasa setelah barang atau jasa tersebut diproduksi. Sedangkan harga konstan merupakan penilaian atas barang dan jasa menurut harga atau nilai pada suatu waktu tertentu yang digunakan sebagai basis harga atau nilai. Penyajian atas besaran-besaran PDRB tersebut diharapkan konsisten dengan penyusunan DAU.

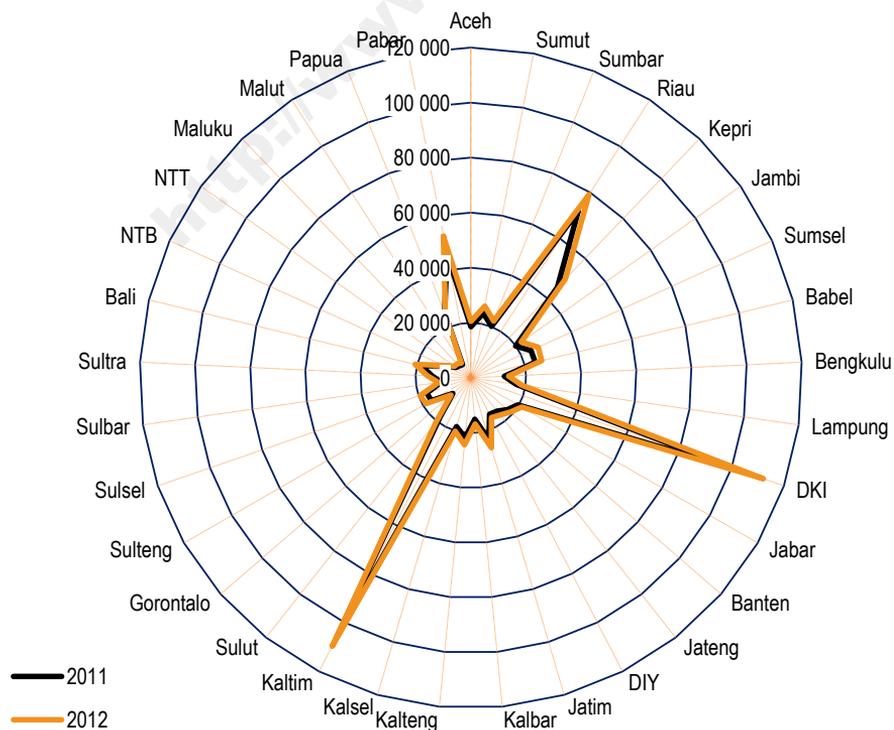
PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) semua kegiatan ekonomi, mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, pada suatu wilayah dalam satu kurun waktu tertentu. Dalam penghitungannya, NTB sama dengan output (tingkat produksi) bersih, yakni output bruto dikurangi semua biaya antara yang berhubungan dengan proses produksi.

Adapun metode penilaian output menggunakan harga produsen, yakni tingkat harga sebelum terjadi atau dimasukkannya biaya pengiriman melalui pengangkutan dan biaya perdagangan (yang timbul pada tingkat pedagang). Secara teknis, semua biaya antara yang berhubungan dengan proses produksi disebut sebagai input antara. Input antara juga diartikan sebagai biaya produksi.

Ruang lingkup dan sumber data, termasuk untuk keperluan penghitungan DAU, berasal dari 497 PDRB Kabupaten/Kota dan 33 PDRB Provinsi. Dalam hal PDRB Provinsi, bukan berarti penjumlahan PDRB dari Kabupaten/Kota di dalamnya, sehingga total PDRB Kabupaten/Kota suatu propvinsi tidak selalu sama dengan PDRB Provinsinya. Selisihnya disebut dengan diskrepansi statistik (*statistical discrepancy*) yang dapat dijelaskan secara teoritis manakala masih dalam rentang toleransi. PDRB Provinsi dihitung oleh BPS Provinsi secara independen (terhadap PDRB Kabupaten/Kota) dan menggunakan informasi dasar pada masing-masing Provinsi. Sehingga, dalam hal penghitungan DAU Kabupaten/Kota menggunakan PDRB Kabupaten/Kota, dan untuk DAU Provinsi menggunakan PDRB Provinsi.

Capaian PDRB antar Provinsi masih menunjukkan disparitas yang sangat tajam, demikian halnya dengan PDRB per Kapita. Sebagaimana terlihat dari Gambar 5.1., Provinsi DKI Jakarta mencatat nilai PDRB per kapita tertinggi di Indonesia pada dua periode pengukuran (2011-2012). Pada tahun 2012, PDRB Per Kapita (dengan migas) DKI Jakarta sebesar Rp. 112,14 juta diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 109, 66 juta. Sedangkan nilai terendah di Provinsi Maluku Utara (Rp. 6,47 Juta). Tingginya capaian DKI Jakarta tersebut sekaligus menjelaskan mengapa DKI Jakarta menjadi magnet urbanisasi di Indonesia.

Gambar 5.1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas (Ribu Rupiah), 2011-2012





CATATAN TEKNIS

<http://www.bps.go.id>

PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN 2013

Konsep dan Definisi

- Konsep penduduk yang digunakan dalam Sensus Penduduk 2010 sama seperti konsep penduduk yang digunakan pada kegiatan survei kependudukan lainnya yang dilakukan oleh BPS.
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
- Batasan lamanya tinggal diaplikasikan dalam konsep anggota rumah tangga, yang selanjutnya dipakai untuk menentukan seseorang terhitung sebagai penduduk di suatu wilayah tertentu.
- Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.
- Penduduk mencakup penduduk yang bertempat tinggal tetap dan penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap, seperti tuna wisma, awak kapal, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil, dan pengungsi.

Sumber Data

- Sensus Penduduk 2000
- Sensus Penduduk Aceh Nias 2005
- Sensus Penduduk 2010

Urgensi SP2010

- Memperbarui data dasar kependudukan termasuk parameter demografi.
- Sebagai basis utama proyeksi penduduk dekade 2010–2020.
- Sebagai master *sampling frame* untuk kegiatan survei.
- Memantau kinerja pencapaian tujuan MDGs (*Millenium Development Goal's*) sampai wilayah administrasi terkecil.

- Sebagai sumber data untuk *Program Targetting* (Beasiswa, Lansia, Bantuan sosial, perumahan, disabilitas, dll.).
- Sebagai data dasar (baseline) bagi semua kementerian/ instansi dalam menetapkan program dan target ke depan.

Metodologi Pencacahan SP2010

- Pencatatan penduduk menggunakan konsep *usual residence*/orang yang biasa sehari-hari tinggal di suatu wilayah (*de jure*) serta *de facto* untuk penduduk yang tidak memiliki tempat tinggal tetap.
- Menghitung stok atau jumlah penduduk suatu negara di seluruh wilayah teritorial negara pada suatu titik waktu (hari) tertentu.
- Pengumpulan data karakteristik kependudukan dan karakteristik sosial ekonomi penting yang secara statistik sulit/tidak akurat, dilakukan melalui survei, misal angka kematian ibu, angka buta huruf, dan disabilitas.
- Pencatatan kependudukan dilakukan secara aktif, yaitu petugas pendata mendatangi penduduk dari rumah ke rumah (*door to door*).

Cakupan Wilayah

Kegiatan SP2010 telah dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia, mencakup :

- 33 Provinsi.
- 497 Kabupaten/Kota.
- 6.651 kecamatan.
- 77.126 desa/kelurahan.

Untuk keperluan DAU, jumlah Kabupaten/Kota tanpa DKI Jakarta adalah 491 Kabupaten/Kota.

Hasil SP2010

- PENDUDUK INDONESIA : 237.641.326 jiwa.

IPM 2012

Pengertian Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Salah satu pengukuran pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Beberapa penjelasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia :

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia. IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusia.
- IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- Secara berkala, data IPM digunakan sebagai salah satu indikator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU).
- IPM harus digunakan dengan hati-hati, meskipun indeks-indeks tersebut memberikan petunjuk umum tentang kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas pembangunan manusia. Indeks tersebut masih perlu dilengkapi dengan informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia terutama adalah Susenas disamping Sensus Penduduk (SP2000) dan SUPAS 2005. Untuk IPM 2010, data yang digunakan meliputi Susenas Kor Juli 2010, Susenas KOR Modul Konsumsi 2011, dan IHK 2010. Susenas Kor Juli 2010 digunakan untuk menghitung Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Untuk Angka Harapan Hidup (e0) dihitung menggunakan modeling berdasarkan data SP2000 dan SUPAS 2005. Sementara Susenas KOR Modul Konsumsi 2011 digunakan untuk menghitung daya beli yang didasarkan pada 27 komoditi.

Konsep dan Definisi

- Angka Melek Huruf penduduk dewasa : Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.
- Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (e0): Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
- Rata-rata Lama Sekolah: Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
- Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity* = PPP): Indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar Provinsi dan antar Kabupaten/Kota. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu daerah (Provinsi/Kabupaten) memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula Atkinson.

- Reduksi Shortfall: Mengukur keberhasilan pembangunan manusia dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM=100). Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat.

Metodologi

- **Angka Harapan Hidup** dihitung dengan menggunakan paket program MORTPAK (metode Trussel dengan model West), dengan input Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).
- **Angka Melek Huruf**, menghitung proporsi penduduk yang dapat baca tulis.
- **Rata-rata Lama Sekolah**, menghitung rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menjalani sekolah.
- **Paritas Daya Beli** dihitung dengan proses sebagai berikut:
 1. Y : Pengeluaran per kapita
 2. Y_1 : $Y + (Y \cdot 20\%)$
 3. Y_2 : Nilai Riil $Y_1 \rightarrow$ deflasi, IHK
 4. PPP \rightarrow didasarkan 27 komoditi (lihat Tabel 6.1)

$$PPP = \frac{\sum_j E_{(i,j)}}{\sum_j P_{(x,j)} Q_{(i,j)}}$$

$E_{(i,j)}$ = Pengeluaran untuk komoditi j di wilayah i.

$P_{(x,j)}$ = Harga komoditi j di Jakarta Selatan.

$Q_{(i,j)}$ = Volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di wilayah i.

5. Y_3 : Y_2 / PPP
6. Y_4 : Menghitung nilai Y_3 dengan formula Atkinson

Formula Atkinson

$$\begin{aligned} C_{(i)}^* &= C_{(i)} && ; \text{jika } C_{(i)} < Z \\ &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && ; \text{jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\ &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && ; \text{jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z \\ &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && ; \text{jika } 3Z < C_{(i)} < 4Z \end{aligned}$$

$C_{(i)}$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp. 549.500,- per kapita per tahun atau Rp. 1.500, per kapita per hari.

Tahapan Penghitungan

Untuk menghitung IPM, maka setiap komponen dihitung indeksinya. Formula penghitungan indeks sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

Tabel 6.1. Daftar Paket Komoditi yang Digunakan dalam Penghitungan PPP

Komoditi	Unit	Proporsi dari total konsumsi (%)
1. Beras Lokal	Kg	7,25
2. Tepung terigu	Kg	0,10
3. Singkong	Kg	0,22
4. Tuna/cakalang	Kg	0,50
5. Teri	Ons	0,32
6. Daging sapi	Kg	0,78
7. Ayam	Kg	0,65
8. Telur	Butir	1,48
9. Susu kental manis	397 Gram	0,48
10. Bayam	Kg	0,30
11. Kacang panjang	Kg	0,32
12. Kacang tanah	Kg	0,22
13. Tempe	Kg	0,79
14. Jeruk	Kg	0,39
15. Pepaya	Kg	0,18
16. Kelapa	Butir	0,56
17. Gula	Ons	1,61
18. Kopi	Ons	0,60
19. Garam	Ons	0,15
20. Merica	Ons	0,13
21. Mie instan	80 Gram	0,79
22. Rokok kretek	10 batang	2,86
23. Listrik	Kwh	2,06
24. Air minum	M ³	0,46
25. Bensin	Liter	1,02
26. Minyak tanah	Liter	1,74
27. Sewa Rumah	Unit	11,56
TOTAL		37,52

- $X_{(i,j)}$ = Indeks komponen ke-i dari daerah j .
- $X_{(i-\min)}$ = Nilai minimum dari X_i (Standar UNDP).
- $X_{(i-\max)}$ = Nilai maksimum dari X_i (Standar UNDP).

Dengan menggunakan formula di atas, Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli dapat dihitung. Nilai minimum dan maksimum merupakan angka standar UNDP.

i. Indeks Lamanya Hidup

$$Index X_1 = \frac{(X_1 - 25)}{(85 - 25)}$$

ii. Indeks Pendidikan

a. Indeks Melek Huruf

$$Index X_{21} = \frac{(X_{21} - 0)}{(100 - 0)}$$

b. Indeks Lama Sekolah

$$Index X_{21} = \frac{(X_{22} - 0)}{(15 - 0)}$$

$$Index X_2 = \left[\frac{2}{3} Index X_{21} \right] + \left[\frac{1}{3} Index X_{22} \right]$$

iii. Indeks Pengeluaran Riil

$$Index X_3 = \frac{(X_3 - 360)}{(732,72 - 300)}$$

iv. Nilai IPM dapat dihitung sebagai :

$$IPM = \frac{Index X_1 + Index X_2 + Index X_3}{3}$$

IKK 2013

Misalkan p_{kn} adalah harga komponen konstruksi n di Kabupaten k ($k= 1, 2, \dots, K$; $n= 1, 2, \dots, N$). Maka model statistik metoda *Country Product Dummy* (CPD) dituliskan sebagai berikut,

$$p_{kn} = a_k b_n u_{kn}, \text{ dalam hal ini } k= 1, 2, \dots, K; n= 1, 2, \dots, N.$$

a_k dan b_n merupakan parameter yang akan diduga dari data harga, sedangkan u_{kn} merupakan *random variable* yang berdistribusi identik dan independen. Dengan

asumsi bahwa random variabel ini berdistribusi log normal atau dengan kata lain $\log p_{kn}$ berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian σ^2 . Dalam bentuk logaritma model di atas berbentuk linear

$$\begin{aligned} \ln p_{kn} &= \ln a_k + \ln b_n + \ln u_{kn} \\ &= \alpha_k + \gamma_n + V_{kn} \end{aligned}$$

Parameter α_k diartikan sebagai tingkat harga konstruksi di Kabupaten k relatif terhadap harga konstruksi di Kabupaten lain yang sedang dibandingkan. Bila α_k dinyatakan sebagai relatif harga konstruksi terhadap Kabupaten yang dijadikan referensi, katakan Kabupaten X , maka α_k adalah harga konstruksi di Kabupaten K relatif terhadap 1 (satu), harga di Kabupaten X . Dengan kata lain harga konstruksi di Kabupaten K 'setinggi' α_k dibanding harga konstruksi di Kabupaten X . Karenanya IKK di Kabupaten K dinyatakan sebagai

$$IKK_k = \exp(\alpha_k)$$

Untuk memudahkan membaca, persamaan di atas dikalikan dengan 100 sehingga perbandingan data dinyatakan dalam persen. Pada penghitungan IKK tahun 2013 ini Kota Samarinda dijadikan kota referensi dengan maksud supaya ada keterbandingan dengan IKK tahun sebelumnya. Untuk IKK tingkat provinsi data harga yang digunakan adalah rata-rata geometrik setiap komoditi dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi masing-masing dengan Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi referensinya.

PDRB Per Kapita 2013

Sesuai dengan sistem neraca nasional yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat tiga pendekatan untuk menyusun PDRB, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Ketiga metode tersebut menyesuaikan dengan data dasar yang tersedia di masing-masing daerah.

Untuk menghitung PDRB menggunakan pendekatan pendapatan, dilakukan dengan cara menjumlahkan balas jasa faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, yakni upah/gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung netto (pajak dikurangi subsidi). Sementara jika menggunakan pendekatan pengeluaran, dilakukan dengan cara menjumlahkan pengeluaran konsumsi rumahtangga, lembaga nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor netto. Sedangkan untuk penggunaan pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh proses produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut 9 (sembilan) jenis lapangan usaha (1) Pertanian; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas, dan Air Bersih; (5) Konstruksi; (6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran; (7) Pengangkutan dan Komunikasi; (8) Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, & Jasa Perusahaan; dan (9) Jasa-Jasa.



TABEL RINGKASAN

<http://www.bps.go.id>

Tabel R1

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 33 Provinsi

Kode	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Provinsi Aceh	4 791 924	72,51	91,61	20 486 246
2	Provinsi Sumatera Utara	13 326 307	75,13	95,92	26 568 861
3	Provinsi Sumatera Barat	5 010 859	74,70	88,72	22 208 586
4	Provinsi Riau	6 125 283	76,90	101,28	79 112 737
5	Provinsi Kepulauan Riau	1 933 796	76,20	109,42	49 644 257
6	Provinsi Jambi	3 317 034	73,78	96,97	22 404 666
7	Provinsi Sumatera Selatan	7 823 588	73,99	95,29	26 790 903
8	Provinsi Bangka Belitung	1 335 467	73,78	99,59	26 441 431
9	Provinsi Bengkulu	1 791 612	73,93	94,98	13 681 998
10	Provinsi Lampung	7 843 286	72,45	89,79	18 611 504
11	Provinsi DKI Jakarta	9 955 084	78,33	100,00	112 141 718
12	Provinsi Jawa Barat	45 275 676	73,11	89,10	21 254 638
13	Provinsi Banten	11 482 486	71,49	89,25	19 003 473
14	Provinsi Jawa Tengah	32 500 468	73,36	85,38	17 140 206
15	Provinsi DI Yogyakarta	3 541 922	76,75	86,52	16 227 097
16	Provinsi Jawa Timur	38 067 495	72,83	85,94	26 444 785
17	Provinsi Kalimantan Barat	4 486 478	70,31	107,38	16 831 711
18	Provinsi Kalimantan Tengah	2 318 435	75,46	100,29	24 467 596
19	Provinsi Kalimantan Selatan	3 823 758	71,08	97,88	20 196 878
20	Provinsi Kalimantan Timur	3 956 943	76,71	100,00	109 664 351
21	Provinsi Sulawesi Utara	2 343 527	76,95	103,00	20 344 833
22	Provinsi Gorontalo	1 105 773	71,31	93,18	9 562 965
23	Provinsi Sulawesi Tengah	2 775 118	72,14	84,60	18 709 354
24	Provinsi Sulawesi Selatan	8 264 344	72,70	85,89	19 465 540
25	Provinsi Sulawesi Barat	1 247 330	70,73	91,96	11 828 887
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	2 360 611	71,05	96,42	15 785 709
27	Provinsi Bali	4 122 917	73,49	93,02	20 742 868
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 629 219	66,89	80,01	10 796 449
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	4 950 758	68,28	87,67	7 249 036
30	Provinsi Maluku	1 656 917	72,42	101,02	7 096 809
31	Provinsi Maluku Utara	1 110 559	69,98	115,12	6 366 658
32	Provinsi Papua	3 305 252	65,86	188,70	24 729 852
33	Provinsi Papua Barat	844 372	70,22	121,01	52 383 910

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Aceh	4 791 924	72,51	91,61	20 486 246
1	Kab. Aceh Barat	187 459	71,73	100,87	19 172 321
2	Kab. Aceh Besar	383 477	74,13	92,07	18 682 253
3	Kab. Aceh Selatan	210 071	70,71	90,34	14 361 876
4	Kab. Aceh Singkil	110 706	69,37	103,76	8 467 838
5	Kab. Aceh Tengah	185 733	74,42	102,99	18 263 876
6	Kab. Aceh Tenggara	186 083	72,25	93,74	10 033 668
7	Kab. Aceh Timur	393 135	71,17	101,41	19 843 235
8	Kab. Aceh Utara	556 556	73,07	107,88	22 410 236
9	Kab. Bireun	413 817	73,70	102,63	17 628 128
10	Kab. Pidie	398 446	72,81	92,74	13 743 515
11	Kab. Simeulue	83 173	70,09	107,42	8 086 863
12	Kota Banda Aceh	249 282	78,50	99,11	43 383 902
13	Kota Sabang	32 191	76,88	97,59	19 229 314
14	Kota Langsa	157 011	74,75	90,56	13 736 941
15	Kota Lhokseumawe	181 976	77,23	105,41	59 353 418
16	Kab. Nagan Raya	149 596	70,64	124,26	20 552 282
17	Kab. Aceh Jaya	85 908	70,35	97,49	14 372 445
18	Kab. Aceh Barat Daya	133 191	71,53	99,81	14 189 981
19	Kab. Gayo Lues	84 511	68,54	91,55	12 015 852
20	Kab. Aceh Tamiang	264 420	71,65	95,94	10 396 607
21	Kab. Bener Meriah	131 999	71,86	99,16	16 995 832
22	Kota Subulussalam	72 414	70,06	75,82	6 273 538
23	Kab. Pidie Jaya	140 769	73,13	95,75	11 156 996

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Sumatera Utara	13 326 307	75,13	95,92	26 568 861
24	Kab. Asahan	681 794	73,80	98,95	22 683 043
25	Kab. Dairi	276 238	73,86	75,91	17 306 243
26	Kab. Deli Serdang	1 886 388	76,17	107,17	27 452 922
27	Kab. Karo	363 755	76,22	98,82	23 723 971
28	Kab. Labuhanbatu	430 718	75,29	89,46	22 433 701
29	Kab. Langkat	978 734	73,98	74,38	22 690 999
30	Kab. Mandailing Natal	413 475	71,44	98,14	11 701 010
31	Kab. Nias	133 388	69,55	86,72	10 836 444
32	Kab. Simalungun	833 251	74,35	96,39	15 710 616
33	Kab. Tapanuli Selatan	268 824	74,78	107,99	14 942 572
34	Kab. Tapanuli Tengah	324 006	72,04	91,96	9 032 939
35	Kab. Tapanuli Utara	286 118	75,33	94,90	16 080 379
36	Kab. Toba Samosir	175 069	77,21	118,84	25 134 840
37	Kota Binjai	252 263	77,36	94,73	26 347 002
38	Kota Medan	2 123 210	78,25	90,60	49 651 519
39	Kota Pematangsiantar	237 434	78,27	88,69	20 669 995
40	Kota Sibolga	85 981	75,73	99,75	21 954 126
41	Kota Tanjung Balai	158 599	75,06	94,89	23 490 860
42	Kota Tebing Tinggi	149 065	77,34	90,58	20 058 348
43	Kota Padang Sidempuan	204 615	76,04	110,91	12 885 957
44	Kab. Pakpak Bharat	42 144	72,00	111,83	10 134 992
45	Kab. Nias Selatan	295 968	68,23	105,77	9 109 520
46	Kab. Humbang Hasundutan	176 429	72,80	102,87	18 193 417
47	Kab. Serdang Bedagai	605 583	74,07	95,48	20 385 137
48	Kab. Samosir	121 924	74,72	127,71	16 610 103
49	Kab. Batubara	382 960	72,71	96,28	55 132 972
50	Kab. Padang Lawas	237 259	72,96	77,18	8 905 978
51	Kab. Padang Lawas Utara	232 746	73,59	75,94	9 558 995
52	Kab. Labuhanbatu Utara	337 404	74,92	93,56	26 924 678
53	Kab. Labuhanbatu Selatan	289 655	74,90	129,12	28 034 350
54	Kab. Nias Utara	129 053	68,71	124,29	11 113 029
55	Kab. Nias Barat	82 854	67,59	99,01	9 032 719
56	Kota Gunungsitoli	129 403	72,61	94,22	19 822 770

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Sumatera Barat	5 010 859	74,70	88,72	22 208 586
57	Kab. Lima Puluh Kota	359 013	72,24	96,41	22 442 708
58	Kab. Agam	466 978	74,11	97,44	18 073 731
59	Kab. Kepulauan Mentawai	79 932	69,26	187,76	23 371 132
60	Kab. Padang Pariaman	399 040	72,53	102,49	19 666 604
61	Kab. Pasaman	261 447	73,78	98,37	16 467 729
62	Kab. Pesisir Selatan	440 740	72,43	95,23	13 328 235
63	Kab. Sijunjung	210 677	71,80	101,39	18 439 572
64	Kab. Solok	357 288	72,15	91,63	19 217 251
65	Kab. Tanah Datar	343 760	75,00	95,16	19 794 527
66	Kota Bukittinggi	116 165	79,07	100,28	23 686 392
67	Kota Padang Panjang	48 792	78,51	98,32	24 401 868
68	Kota Padang	864 922	78,55	101,94	35 929 767
69	Kota Payakumbuh	121 637	76,76	98,05	20 177 130
70	Kota Sawahlunto	58 571	75,87	93,49	24 545 022
71	Kota Solok	62 191	76,54	99,56	22 368 167
72	Kota Pariaman	81 727	75,23	95,70	25 088 250
73	Kab. Pasaman Barat	383 577	71,07	95,18	21 906 146
74	Kab. Dharmasraya	203 556	70,25	94,00	17 363 409
75	Kab. Solok Selatan	150 846	69,69	98,05	12 570 112

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Riau	6 125 283	76,90	101,28	79 112 737
76	Kab. Bengkalis	543 786	75,86	128,58	203 628 545
77	Kab. Indragiri Hilir	697 814	76,15	105,73	54 101 180
78	Kab. Indragiri Hulu	401 201	74,90	104,77	66 375 543
79	Kab. Kampar	766 351	75,54	99,16	49 149 374
80	Kab. Kuantan Singingi	317 265	74,50	94,48	57 311 450
81	Kab. Pelalawan	352 207	73,92	100,56	65 229 112
82	Kab. Rokan Hilir	618 355	73,17	117,79	75 445 066
83	Kab. Rokan Hulu	543 857	73,62	98,82	31 503 869
84	Kab. Siak	421 477	77,27	114,84	129 889 876
85	Kota Dumai	280 027	78,73	98,01	67 491 781
86	Kota Pekanbaru	999 031	79,16	111,86	57 867 783
87	Kab. Kepulauan Meranti	183 912	71,47	127,46	59 139 456

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Kepulauan Riau	1 933 796	76,20	109,42	49 644 257
88	Kab. Bintan	154 616	75,68	102,63	34 989 412
89	Kab. Natuna	76 393	71,77	131,85	64 846 509
90	Kab. Karimun	229 574	74,45	95,79	24 049 230
91	Kota Batam	1 137 350	78,46	110,32	54 139 994
92	Kota Tanjung Pinang	203 981	75,97	100,30	31 678 600
93	Kab. Lingga	91 378	72,09	108,59	13 871 766
94	Kab. Kepulauan Anambas	40 504	70,11	143,36	71 745 216

<http://www.bps.go.id>

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Jambi	3 317 034	73,78	96,97	22 404 666
95	Kab. Batanghari	258 016	73,83	95,26	21 110 177
96	Kab. Bungo	329 934	73,05	99,89	17 003 432
97	Kab. Kerinci	236 762	75,11	97,67	17 093 240
98	Kab. Merangin	358 530	72,85	89,66	12 904 024
99	Kab. Muaro Jambi	376 619	73,59	84,10	15 120 834
100	Kab. Sarolangun	267 549	73,61	101,85	20 695 887
101	Kab. Tanjung Jabung Barat	301 469	73,70	120,86	30 640 463
102	Kab. Tanjung Jabung Timur	212 218	72,52	103,43	56 654 065
103	Kab. Tebo	321 641	72,69	94,89	11 274 429
104	Kota Jambi	569 331	77,08	99,12	22 178 455
105	Kota Sungai Penuh	84 965	77,63	87,97	23 613 004

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Sumatera Selatan	7 823 588	73,99	95,29	26 790 903
106	Kab. Lahat	384 266	72,29	98,65	19 660 947
107	Kab. Musi Banyuasin	603 627	73,15	106,36	59 085 362
108	Kab. Musi Rawas	551 959	69,01	106,45	18 330 646
109	Kab. Muara Enim	754 350	71,65	99,20	35 116 273
110	Kab. Ogan Komering Ilir	765 686	71,45	93,12	12 091 122
111	Kab. Ogan Komering Ulu	347 139	74,01	91,18	22 785 211
112	Kota Palembang	1 526 086	77,38	103,09	44 951 716
113	Kota Pagar Alam	131 022	74,15	109,69	12 585 103
114	Kota Lubuk Linggau	212 968	71,46	94,28	13 413 805
115	Kota Prabumulih	173 277	75,45	102,21	22 949 078
116	Kab. Banyuasin	784 419	70,70	111,91	19 450 036
117	Kab. Ogan Ilir	398 358	70,52	106,65	12 675 658
118	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	636 904	70,68	90,46	11 227 436
119	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	326 449	72,29	87,95	12 273 963
120	Kab. Empat Lawang	227 078	69,69	101,19	11 771 601

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Bangka Belitung	1 335 467	73,78	99,59	26 441 431
121	Kab. Bangka	302 264	73,67	103,28	21 174 834
122	Kab. Belitung	166 902	74,13	107,52	23 438 705
123	Kota Pangkal Pinang	191 548	76,85	104,07	22 992 184
124	Kab. Bangka Selatan	189 161	67,73	108,30	23 448 069
125	Kab. Bangka Tengah	173 824	72,27	105,07	24 846 369
126	Kab. Bangka Barat	196 391	70,94	112,75	43 077 430
127	Kab. Belitung Timur	115 377	72,87	103,63	27 588 670

<http://www.bps.go.id>

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Bengkulu	1 791 612	73,93	94,98	13 681 998
128	Kab. Bengkulu Selatan	148 610	73,18	94,44	10 527 015
129	Kab. Bengkulu Utara	275 225	72,74	93,46	7 938 984
130	Kab. Rejang Lebong	252 282	72,21	90,67	18 473 327
131	Kota Bengkulu	324 894	78,51	100,93	18 648 323
132	Kab. Kaur	112 260	71,13	100,50	5 863 547
133	Kab. Seluma	181 172	67,69	101,78	5 492 131
134	Kab. Mukomuko	164 021	71,53	110,67	10 985 385
135	Kab. Lebong	103 492	71,12	99,23	13 302 741
136	Kab. Kepahiang	127 818	69,41	102,85	16 607 060
137	Kab. Bengkulu Tengah	101 838	69,35	104,49	11 129 133

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Lampung	7 843 286	72,45	89,79	18 611 504
138	Kab. Lampung Barat	431 888	70,17	99,97	9 181 100
139	Kab. Lampung Selatan	942 572	70,95	90,75	14 818 658
140	Kab. Lampung Tengah	1 202 252	71,81	90,39	18 733 880
141	Kab. Lampung Utara	598 374	71,28	91,48	21 207 381
142	Kab. Lampung Timur	973 821	71,64	93,04	13 817 343
143	Kab. Tanggamus	554 945	72,32	100,43	11 827 947
144	Kab. Tulang Bawang	419 294	71,60	101,60	18 825 992
145	Kab. Way Kanan	419 564	70,84	96,09	9 516 577
146	Kota Bandar Lampung	914 307	76,83	97,00	28 279 297
147	Kota Metro	151 669	77,30	96,37	10 075 006
148	Kab. Pesawaran	411 710	70,90	94,36	16 740 413
149	Kab. Pringsewu	371 731	72,80	85,94	10 559 373
150	Kab. Mesuji	192 967	68,30	120,84	19 306 233
151	Kab. Tulang Bawang Barat	258 192	69,82	106,43	18 278 943

Tabel R2

Kota Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi DKI Jakarta	9 955 084	78,33	100,00	112 141 718
	Provinsi Jawa Barat	45 275 676	73,11	89,10	21 254 638
152	Kab. Bandung	3 378 010	74,73	109,75	17 255 692
153	Kab. Bekasi	2 897 715	74,13	106,48	41 795 875
154	Kab. Bogor	5 121 687	73,08	106,13	19 219 794
155	Kab. Ciamis	1 567 706	72,14	96,69	13 551 858
156	Kab. Cianjur	2 250 305	70,02	74,44	9 980 515
157	Kab. Cirebon	2 120 598	69,58	90,38	10 840 519
158	Kab. Garut	2 513 431	72,12	82,74	12 150 454
159	Kab. Indramayu	1 701 583	68,89	97,09	34 177 018
160	Kab. Karawang	2 230 641	70,89	97,96	32 433 905
161	Kab. Kuningan	1 059 843	71,99	90,36	10 441 368
162	Kab. Majalengka	1 192 043	71,16	82,08	10 065 473
163	Kab. Purwakarta	897 296	72,21	81,34	21 782 048
164	Kab. Subang	1 508 735	71,79	93,16	12 393 629
165	Kab. Sukabumi	2 431 500	71,50	87,93	8 974 017
166	Kab. Sumedang	1 135 760	72,95	85,07	13 266 683
167	Kab. Tasikmalaya	1 738 011	72,84	89,10	8 829 886
168	Kota Bandung	2 484 196	76,86	89,18	45 135 932
169	Kota Bekasi	2 519 881	77,17	100,55	18 730 365
170	Kota Bogor	1 007 092	76,47	91,24	17 543 543
171	Kota Cirebon	304 721	76,02	88,53	43 652 977
172	Kota Depok	1 903 046	79,71	97,03	10 894 445
173	Kota Sukabumi	312 782	75,73	83,97	21 581 461
174	Kota Cimahi	570 132	76,28	86,27	27 723 579
175	Kota Tasikmalaya	658 817	75,35	85,40	15 544 429
176	Kota Banjar	181 627	72,10	85,47	11 867 837
177	Kab. Bandung Barat	1 588 518	74,03	88,12	13 893 687

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Banten	11 482 486	71,49	89,25	19 003 473
178	Kab. Lebak	1 271 960	68,43	85,21	8 184 718
179	Kab. Pandeglang	1 201 045	69,22	85,52	9 010 150
180	Kab. Serang	1 480 061	69,83	87,93	10 754 426
181	Kab. Tangerang	3 126 379	72,36	93,76	14 614 922
182	Kota Cilegon	401 757	75,89	95,26	97 151 729
183	Kota Tangerang	1 952 797	75,72	94,90	36 937 102
184	Kota Serang	622 355	72,30	90,38	11 651 773
185	Kota Tangerang Selatan	1 426 132	76,61	97,75	10 882 764

<http://www.bps.go.id>

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Jawa Tengah	32 500 468	73,36	85,38	17 140 206
186	Kab. Banjarnegara	871 180	70,70	80,17	9 430 565
187	Kab. Banyumas	1 559 969	73,33	83,01	8 190 596
188	Kab. Batang	709 878	71,41	71,72	9 160 618
189	Kab. Blora	831 389	71,49	85,35	6 387 113
190	Kab. Boyolali	932 676	71,50	88,51	10 703 163
191	Kab. Brebes	1 737 356	69,37	89,91	10 376 268
192	Kab. Cilacap	1 645 913	72,77	89,43	65 875 948
193	Kab. Demak	1 059 696	73,52	88,80	6 768 786
194	Kab. Grobogan	1 311 907	71,77	89,62	6 134 916
195	Kab. Jepara	1 105 033	73,54	99,58	10 174 100
196	Kab. Karanganyar	816 926	74,62	73,42	14 061 198
197	Kab. Kebumen	1 163 503	71,86	81,96	6 801 258
198	Kab. Kendal	903 708	71,48	82,58	14 882 142
199	Kab. Klaten	1 132 655	74,46	83,73	11 951 292
200	Kab. Kudus	782 679	73,69	89,00	47 353 145
201	Kab. Magelang	1 185 738	73,14	79,49	8 215 082
202	Kab. Pati	1 193 669	73,81	93,93	9 668 214
203	Kab. Pekalongan	841 284	72,37	87,32	10 631 069
204	Kab. Pemalang	1 265 243	70,66	86,19	7 731 624
205	Kab. Purbalingga	853 450	72,97	78,36	8 569 553
206	Kab. Purworejo	697 572	73,53	86,20	11 295 967
207	Kab. Rembang	593 615	72,81	97,32	10 039 807
208	Kab. Semarang	937 737	74,98	90,00	14 811 708
209	Kab. Sragen	860 470	71,85	93,17	9 955 975
210	Kab. Sukoharjo	827 550	74,21	90,95	14 838 584
211	Kab. Tegal	1 399 141	71,74	78,23	7 013 737
212	Kab. Temanggung	711 770	74,74	87,26	8 723 095
213	Kab. Wonogiri	931 768	72,59	84,65	8 535 026
214	Kab. Wonosobo	756 506	71,45	87,75	6 325 174
215	Kota Magelang	118 591	77,26	90,04	22 065 252
216	Kota Pekalongan	282 749	75,25	85,46	16 424 958
217	Kota Salatiga	171 698	77,13	92,08	13 088 065
218	Kota Semarang	1 566 916	77,98	88,04	34 787 878
219	Kota Surakarta	500 457	78,60	89,73	24 345 147
220	Kota Tegal	240 076	74,63	76,31	12 837 027

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi DI Yogyakarta	3 541 922	76,75	86,52	16 227 097
221	Kab. Bantul	938 433	75,51	83,33	12 114 961
222	Kab. Gunung Kidul	685 112	71,11	90,22	11 628 655
223	Kab. Kulon Progo	394 365	75,33	77,08	10 671 984
224	Kab. Sleman	1 129 133	79,39	78,95	14 976 756
225	Kota Yogyakarta	394 879	80,24	83,19	36 363 267

<http://www.bps.go.id>

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Jawa Timur	38 067 495	72,83	85,94	26 444 785
226	Kab. Bangkalan	926 259	65,69	93,15	10 344 584
227	Kab. Banyuwangi	1 573 196	70,53	73,20	19 565 968
228	Kab. Blitar	1 129 466	74,43	75,98	13 645 130
229	Kab. Bojonegoro	1 220 579	67,74	103,47	24 669 035
230	Kab. Bondowoso	747 281	64,98	82,61	11 865 809
231	Kab. Gresik	1 208 795	75,97	104,15	41 956 717
232	Kab. Jember	2 364 912	65,99	74,97	13 657 568
233	Kab. Jombang	1 219 102	73,86	98,42	14 880 205
234	Kab. Kediri	1 520 184	72,72	92,77	12 971 669
235	Kab. Lamongan	1 191 650	71,05	94,09	12 876 598
236	Kab. Lumajang	1 017 203	69,00	83,03	17 209 785
237	Kab. Madiun	667 872	70,88	96,43	13 172 767
238	Kab. Magetan	626 994	73,85	100,40	14 832 379
239	Kab. Malang	2 487 484	71,94	93,59	16 479 469
240	Kab. Mojokerto	1 047 878	74,42	88,26	22 745 752
241	Kab. Nganjuk	1 028 157	71,96	93,77	13 544 552
242	Kab. Ngawi	826 241	70,20	98,65	11 094 242
243	Kab. Pacitan	545 103	72,88	75,24	7 740 306
244	Kab. Pamekasan	815 846	66,51	103,73	7 868 912
245	Kab. Pasuruan	1 541 242	69,17	78,26	13 077 790
246	Kab. Ponorogo	860 884	71,91	97,35	11 027 670
247	Kab. Probolinggo	1 114 866	64,35	85,93	17 017 415
248	Kab. Sampang	901 411	61,67	92,82	8 069 145
249	Kab. Sidoarjo	2 010 327	77,36	88,00	37 319 337
250	Kab. Situbondo	657 100	65,06	94,33	16 046 440
251	Kab. Sumenep	1 055 432	66,41	95,78	13 467 332
252	Kab. Trenggalek	680 289	74,09	94,13	11 091 904
253	Kab. Tuban	1 133 436	69,18	80,32	21 301 459
254	Kab. Tulungagung	1 003 633	74,45	94,92	20 641 887
255	Kota Blitar	134 459	78,31	93,07	19 189 292
256	Kota Kediri	273 320	77,20	99,57	275 379 705
257	Kota Madiun	172 793	77,50	97,40	37 248 668
258	Kota Malang	833 407	78,43	90,29	46 451 470
259	Kota Mojokerto	122 431	78,01	94,49	29 083 724
260	Kota Pasuruan	189 801	74,33	81,49	17 550 830
261	Kota Probolinggo	221 919	75,44	85,43	26 721 334
262	Kota Surabaya	2 802 158	78,33	92,60	94 684 187
263	Kota Batu	194 385	75,42	95,08	21 710 766

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Kalimantan Barat	4 486 478	70,31	107,38	16 831 711
264	Kab. Bengkayang	220 378	68,50	103,14	13 532 676
265	Kab. Landak	335 405	69,05	102,28	11 146 932
266	Kab. Kapuas Hulu	227 363	70,52	129,71	13 099 765
267	Kab. Ketapang	438 451	69,05	172,63	17 500 518
268	Kab. Pontianak	237 863	69,42	97,23	11 295 873
269	Kab. Sambas	503 717	66,19	92,69	14 904 788
270	Kab. Sanggau	417 071	69,50	115,84	15 310 418
271	Kab. Sintang	371 276	69,14	127,41	13 448 936
272	Kota Pontianak	567 029	74,21	114,87	27 929 917
273	Kota Singkawang	191 129	69,77	111,15	16 501 048
274	Kab. Sekadau	184 983	68,47	103,32	8 235 188
275	Kab. Melawi	182 852	69,39	167,10	7 072 111
276	Kab. Kayong Utara	97 751	66,19	108,30	12 436 273
277	Kab. Kubu Raya	511 210	68,86	131,55	22 059 246

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Kalimantan Tengah	2 318 435	75,46	100,29	24 467 596
278	Kab. Barito Selatan	127 077	74,34	109,89	22 511 564
279	Kab. Barito Utara	124 247	75,97	102,58	24 079 826
280	Kab. Kapuas	340 810	74,33	101,26	18 631 316
281	Kab. Kotawaringin Barat	251 050	74,69	101,59	23 849 974
282	Kab. Kotawaringin Timur	392 804	75,14	114,59	27 286 542
283	Kota Palangkaraya	232 950	79,30	109,73	20 619 906
284	Kab. Barito Timur	103 310	73,75	118,08	18 312 947
285	Kab. Murung Raya	101 907	73,77	93,20	28 031 114
286	Kab. Pulang Pisau	122 793	72,75	106,45	13 695 421
287	Kab. Gunung Mas	101 884	74,08	113,07	16 248 739
288	Kab. Lamandau	67 109	73,13	107,95	21 276 734
289	Kab. Sukamara	48 560	72,88	134,51	28 091 779
290	Kab. Katingan	151 990	73,67	108,32	22 966 062
291	Kab. Seruyan	151 944	73,24	92,30	21 116 673

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Kalimantan Selatan	3 823 758	71,08	97,88	20 196 878
292	Kab. Banjar	535 093	71,96	90,72	16 373 795
293	Kab. Barito Kuala	286 814	68,92	93,56	15 731 176
294	Kab. Hulu Sungai Selatan	218 744	71,64	98,01	11 934 513
295	Kab. Hulu Sungai Tengah	250 607	71,67	102,64	10 708 639
296	Kab. Hulu Sungai Utara	214 774	69,92	108,80	9 322 059
297	Kab. Kotabaru	308 373	72,43	105,28	40 079 179
298	Kab. Tabalong	232 418	71,05	120,48	31 190 571
299	Kab. Tanah Laut	315 131	72,75	95,60	17 415 076
300	Kab. Tapin	176 122	71,71	101,68	15 338 329
301	Kota Banjarbaru	221 040	76,28	99,86	11 125 925
302	Kota Banjarmasin	655 960	74,83	106,79	19 483 888
303	Kab. Balangan	117 690	67,71	108,25	29 921 970
304	Kab. Tanah Bumbu	290 992	71,09	107,97	28 925 887

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Kalimantan Timur	3 956 943	76,71	100,00	109 664 351
305	Kab. Berau	200 995	75,05	104,79	55 640 363
306	Kab. Bulungan	125 705	76,03	125,40	24 816 150
307	Kab. Kutai Kartanegara	698 428	74,24	137,60	195 853 258
308	Kab. Kutai Barat	176 002	74,05	114,30	51 717 601
309	Kab. Kutai Timur	294 486	73,75	113,56	179 410 863
310	Kab. Malinau	71 801	73,63	120,23	40 558 748
311	Kab. Nunukan	162 666	74,84	92,38	34 750 164
312	Kab. Paser	256 134	75,85	93,76	72 064 332
313	Kota Balikpapan	613 027	79,38	121,42	79 048 073
314	Kota Bontang	159 666	77,85	112,98	443 668 089
315	Kota Samarinda	803 301	78,26	100,00	46 015 026
316	Kota Tarakan	220 485	77,76	111,85	43 230 708
317	Kab. Penajam Paser Utara	155 785	74,35	100,94	26 997 042
318	Kab. Tana Tidung	18 462	72,66	189,75	25 666 871

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Sulawesi Utara	2 343 527	76,95	103,00	20 344 833
319	Kab. Bolaang Mongondow	224 400	73,83	105,13	11 287 464
320	Kab. Minahasa	319 945	76,69	100,13	17 093 388
321	Kab. Kepulauan Sangihe	129 008	76,42	129,46	14 579 031
322	Kota Bitung	198 257	76,30	97,96	24 840 379
323	Kota Manado	419 596	78,92	101,42	37 419 200
324	Kab. Kepulauan Talaud	85 984	76,14	130,76	11 376 442
325	Kab. Minahasa Selatan	200 072	75,46	104,71	16 674 906
326	Kota Tomohon	95 157	77,40	90,71	17 447 996
327	Kab. Minahasa Utara	196 842	76,91	93,46	16 649 437
328	Kota Kotamobagu	109 141	76,68	102,83	11 608 942
329	Kab. Bolaang Mongondow Utara	71 570	73,48	103,54	13 067 587
330	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	64 744	74,06	112,67	13 294 861
331	Kab. Minahasa Tenggara	102 226	73,42	111,36	21 380 061
332	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	59 908	71,63	102,11	10 487 927
333	Kab. Bolaang Mongondow Timur	66 677	73,41	110,37	14 918 870

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Gorontalo	1 105 773	71,31	93,18	9 562 965
334	Kab. Boalemo	140 568	69,49	108,92	7 234 018
335	Kab. Gorontalo	372 321	71,12	93,56	8 165 051
336	Kota Gorontalo	193 541	74,17	92,32	11 314 213
337	Kab. Pohuwato	139 198	70,76	103,21	12 195 727
338	Kab. Bone Bolango	150 390	72,65	95,91	7 502 343
339	Kab. Gorontalo Utara	109 755	69,94	106,38	5 509 595

<http://www.bps.go.id>

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Sulawesi Tengah	2 775 118	72,14	84,60	18 709 354
340	Kab. Banggai	339 171	72,37	94,69	19 376 032
341	Kab. Banggai Kepulauan	178 743	68,90	95,47	11 089 744
342	Kab. Buol	140 064	70,71	89,55	12 754 531
343	Kab. Toli-Toli	219 639	69,67	87,80	16 223 710
344	Kab. Donggala	286 529	70,94	80,89	18 438 621
345	Kab. Morowali	217 853	71,95	97,78	27 341 598
346	Kab. Poso	240 216	71,20	90,87	12 485 744
347	Kota Palu	352 602	77,48	87,20	23 813 359
348	Kab. Parigi Moutong	435 070	69,75	96,60	19 254 991
349	Kab. Tojo Una Una	143 296	69,71	104,95	11 190 520
350	Kab. Sigi	221 935	68,61	87,34	18 700 127

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Sulawesi Selatan	8 264 344	72,70	85,89	19 465 540
351	Kab. Bantaeng	180 484	71,51	90,47	14 131 695
352	Kab. Barru	168 764	71,70	99,20	13 032 438
353	Kab. Bone	732 368	71,47	98,43	14 234 064
354	Kab. Bulukumba	403 343	72,33	102,64	12 580 775
355	Kab. Enrekang	195 156	75,30	98,31	13 841 220
356	Kab. Gowa	681 395	71,60	91,76	10 128 896
357	Kab. Jeneponto	350 033	65,56	81,24	8 890 871
358	Kab. Luwu	341 311	74,68	101,37	14 856 356
359	Kab. Luwu Utara	295 096	74,97	96,04	14 195 395
360	Kab. Maros	328 522	72,54	91,68	10 743 536
361	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	314 324	70,65	96,75	24 668 919
362	Kab. Pinrang	359 446	74,39	80,97	20 267 796
363	Kab. Kepulauan Selayar	125 801	70,49	94,18	13 721 681
364	Kab. Sidenreng Rappang	280 198	73,36	81,33	17 777 949
365	Kab. Sinjai	233 981	70,64	86,06	15 975 743
366	Kab. Soppeng	226 402	72,57	94,33	16 315 876
367	Kab. Takalar	277 695	70,14	95,84	9 997 927
368	Kab. Tana Toraja	225 679	72,90	102,29	9 755 778
369	Kab. Wajo	390 609	71,67	91,21	19 904 208
370	Kota Parepare	133 510	78,63	93,60	17 997 404
371	Kota Makassar	1 386 880	79,49	91,87	37 019 698
372	Kota Palopo	156 010	77,28	81,52	17 272 388
373	Kab. Luwu Timur	255 730	73,56	100,37	41 056 857
374	Kab. Toraja Utara	221 607	71,04	103,65	9 987 988

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Sulawesi Barat	1 247 330	70,73	91,96	11 828 887
375	Kab. Majene	160 630	72,41	98,58	10 584 411
376	Kab. Mamuju	370 720	70,76	94,17	12 596 588
377	Kab. Polewali Mandar	414 383	68,44	81,81	10 940 750
378	Kab. Mamasa	148 476	72,07	108,55	10 440 908
379	Kab. Mamuju Utara	153 121	70,79	95,63	16 275 037

<http://www.bps.go.id>

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Sulawesi Tenggara	2 360 611	71,05	96,42	15 785 709
380	Kab. Buton	261 727	69,95	123,29	9 908 139
381	Kab. Konawe	254 123	70,95	99,60	12 659 767
382	Kab. Kolaka	337 215	72,00	103,60	26 117 031
383	Kab. Muna	279 928	68,35	105,35	11 701 154
384	Kota Kendari	314 126	76,51	100,77	20 380 705
385	Kota Bau-bau	145 427	74,58	104,93	18 478 903
386	Kab. Konawe Selatan	280 595	70,24	97,51	12 234 814
387	Kab. Bombana	150 186	68,51	101,76	9 804 784
388	Kab. Wakatobi	95 157	68,78	111,54	11 118 743
389	Kab. Kolaka Utara	129 953	69,87	119,50	19 375 771
390	Kab. Konawe Utara	54 752	69,84	110,52	24 204 965
391	Kab. Buton Utara	57 422	69,31	113,60	19 024 108

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Bali	4 122 917	73,49	93,02	20 742 868
392	Kab. Badung	601 265	75,69	89,72	32 849 601
393	Kab. Bangli	222 929	71,80	88,31	12 961 839
394	Kab. Buleleng	646 602	71,93	101,96	14 218 072
395	Kab. Gianyar	494 962	74,49	72,91	18 705 908
396	Kab. Jembrana	271 406	73,62	91,26	16 377 088
397	Kab. Karangasem	409 856	67,83	87,66	12 765 825
398	Kab. Klungkung	176 265	71,76	82,40	19 121 058
399	Kab. Tabanan	436 134	75,55	105,46	14 119 118
400	Kota Denpasar	863 498	78,80	99,60	18 634 901

<http://www.bps.go.id>

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	4 629 219	66,89	80,01	10 796 449
401	Kab. Bima	450 870	66,52	87,99	8 712 565
402	Kab. Dompu	226 166	67,58	85,63	11 816 882
403	Kab. Lombok Barat	620 267	63,19	78,49	7 966 270
404	Kab. Lombok Tengah	881 480	62,57	78,46	7 102 486
405	Kab. Lombok Timur	1 130 100	64,91	94,78	6 943 160
406	Kab. Sumbawa	426 028	67,23	78,78	12 303 766
407	Kota Mataram	419 543	73,70	103,30	14 628 903
408	Kota Bima	148 610	69,83	82,01	8 546 279
409	Kab. Sumbawa Barat	121 139	67,85	92,41	78 680 526
410	Kab. Lombok Utara	205 016	61,37	70,46	8 407 831

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	4 950 758	68,28	87,67	7 249 036
411	Kab. Alor	198 387	69,35	105,75	5 373 833
412	Kab. Belu	373 863	65,52	84,45	6 096 100
413	Kab. Ende	269 193	68,08	79,52	8 316 943
414	Kab. Flores Timur	243 611	69,19	107,46	7 716 270
415	Kab. Kupang	312 613	67,12	87,76	8 620 476
416	Kab. Lembata	125 803	68,69	99,09	4 318 520
417	Kab. Manggarai	309 798	68,30	113,55	5 067 049
418	Kab. Ngada	150 343	70,63	89,63	8 025 657
419	Kab. Sikka	312 678	68,74	92,14	6 694 324
420	Kab. Sumba Barat	117 631	64,88	90,28	8 009 409
421	Kab. Sumba Timur	240 461	63,33	86,72	8 100 495
422	Kab. Timor Tengah Selatan	458 810	66,61	89,32	6 343 822
423	Kab. Timor Tengah Utara	240 938	68,57	88,24	4 893 981
424	Kota Kupang	361 574	78,37	109,77	17 427 285
425	Kab. Rote Ndao	132 668	67,10	91,89	6 040 885
426	Kab. Manggarai Barat	238 078	66,84	102,12	5 263 932
427	Kab. Nagekeo	136 773	67,23	98,32	6 485 095
428	Kab. Sumba Barat Daya	304 413	62,48	95,93	4 210 701
429	Kab. Sumba Tengah	66 181	61,70	92,56	5 987 364
430	Kab. Manggarai Timur	266 325	67,06	82,70	4 364 258
431	Kab. Sabu Raijua	90 617	57,12	123,44	5 381 246

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Maluku	1 656 917	72,42	101,02	7 096 809
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	112 174	69,57	133,40	6 662 265
433	Kab. Maluku Tengah	378 916	71,55	107,32	4 481 724
434	Kab. Maluku Tenggara	101 134	73,27	119,89	5 876 370
435	Kab. Buru	120 510	70,54	80,89	3 994 876
436	Kota Ambon	376 203	79,41	84,36	14 123 973
437	Kab. Seram Bagian Barat	174 226	70,40	99,68	4 741 831
438	Kab. Seram Bagian Timur	107 140	68,90	112,76	3 620 370
439	Kab. Kepulauan Aru	90 742	70,91	121,09	6 001 520
440	Kota Tual	64 310	77,62	142,03	6 333 261
441	Kab. Buru Selatan	58 251	69,97	138,17	5 740 186
442	Kab. Maluku Barat Daya	73 311	67,38	159,68	6 837 710

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Maluku Utara	1 110 559	69,98	115,12	6 366 658
443	Kab. Halmahera Tengah	46 495	70,03	138,28	12 476 366
444	Kab. Halmahera Barat	105 349	67,65	121,72	4 191 224
445	Kota Ternate	198 412	77,62	133,88	6 924 606
446	Kab. Halmahera Timur	81 932	68,71	120,93	7 872 011
447	Kota Tidore Kepulauan	94 725	70,45	137,90	5 942 700
448	Kab. Kepulauan Sula	137 955	68,83	146,45	5 471 662
449	Kab. Halmahera Selatan	211 265	68,87	90,69	5 501 761
450	Kab. Halmahera Utara	177 590	69,84	126,87	5 747 645
451	Kab. Pulau Morotai	56 836	66,08	123,87	4 828 468

<http://www.bps.go.id>

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Papua	3 305 252	65,86	188,70	24 729 852
452	Kab. Biak Numfor	137 130	70,68	152,03	14 181 844
453	Kab. Jayapura	121 084	73,09	142,59	21 399 407
454	Kab. Jayawijaya	240 193	57,22	250,84	6 242 118
455	Kab. Merauke	218 832	66,52	251,20	21 434 577
456	Kab. Mimika	212 248	70,02	189,46	200 131 684
457	Kab. Nabire	153 217	68,03	165,61	16 175 505
458	Kab. Paniai	192 200	60,54	214,57	3 289 548
459	Kab. Puncak Jaya	123 374	68,37	414,76	5 885 893
460	Kab. Kepulauan Yapen	90 767	70,98	160,51	9 974 245
461	Kota Jayapura	277 062	76,64	170,07	39 302 509
462	Kab. Sarmi	38 406	67,73	244,70	27 668 537
463	Kab. Keerom	53 019	69,95	180,39	20 795 478
464	Kab. Yahukimo	179 895	50,73	191,50	3 494 220
465	Kab. Pegunungan Bintang	74 198	49,83	388,02	11 525 150
466	Kab. Tolikara	149 462	52,66	393,57	4 437 808
467	Kab. Boven Digoel	66 064	51,43	178,14	32 718 342
468	Kab. Mappi	89 128	51,53	216,66	12 031 638
469	Kab. Asmat	83 471	52,19	222,93	10 601 295
470	Kab. Waropen	26 238	64,24	154,30	17 357 649
471	Kab. Supiori	17 178	69,19	182,57	26 082 597
472	Kab. Mamberamo Raya	20 539	60,18	185,42	24 571 199
473	Kab. Mamberamo Tengah	49 114	49,73	402,61	6 406 891
474	Kab. Yalimo	59 677	49,31	390,74	4 262 896
475	Kab. Lanny Jaya	187 620	50,60	362,44	3 244 255
476	Kab. Nduga	108 216	48,80	322,10	2 826 030
477	Kab. Puncak	107 586	49,77	461,52	7 378 424
478	Kab. Dogiyai	95 512	51,09	234,17	7 680 627
479	Kab. Intan Jaya	44 089	49,17	438,02	6 776 172
480	Kab. Deiyai	89 733	49,80	219,77	4 156 720

Tabel R2

Data Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun, IPM, IKK, dan PDRB per Kapita 491 Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2013	IPM 2012	IKK 2013	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Papua Barat	844 372	70,22	121,01	52 383 910
481	Kab. Sorong	75 540	69,23	110,34	95 271 755
482	Kab. Manokwari	199 976	68,07	117,42	19 344 262
483	Kab. Fak-Fak	72 784	72,64	172,40	27 875 501
484	Kota Sorong	215 596	78,36	113,64	20 360 402
485	Kab. Sorong Selatan	43 322	66,83	129,61	13 409 205
486	Kab. Raja Ampat	46 037	65,49	173,13	27 072 568
487	Kab. Teluk Bintuni	57 954	67,58	143,74	351 560 985
488	Kab. Teluk Wondama	29 140	66,80	118,18	17 577 446
489	Kab. Kaimana	51 958	71,22	147,79	23 206 816
490	Kab. Tambrau	14 452	51,18	206,04	6 769 649
491	Kab. Maybrat	37 613	67,26	177,68	6 717 577

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Aceh	68,94	96,99	8,93	618,79	72,51
1	Kab. Aceh Barat	70,15	94,96	8,80	607,02	71,73
2	Kab. Aceh Besar	70,87	96,98	9,84	617,09	74,13
3	Kab. Aceh Selatan	67,14	96,55	8,45	614,19	70,71
4	Kab. Aceh Singkil	65,28	96,25	7,78	617,48	69,37
5	Kab. Aceh Tengah	69,76	98,65	9,71	625,37	74,42
6	Kab. Aceh Tenggara	69,29	97,97	9,37	605,79	72,25
7	Kab. Aceh Timur	69,86	98,27	8,53	594,86	71,17
8	Kab. Aceh Utara	69,86	97,83	9,20	614,35	73,07
9	Kab. Bireun	72,43	98,51	9,29	601,22	73,70
10	Kab. Pidie	69,84	96,31	8,74	620,01	72,81
11	Kab. Simeulue	63,12	99,29	8,63	625,59	70,09
12	Kota Banda Aceh	71,42	99,25	12,25	640,06	78,50
13	Kota Sabang	71,59	99,09	10,60	634,22	76,88
14	Kota Langsa	70,93	99,31	10,59	610,79	74,75
15	Kota Lhokseumawe	71,47	99,65	10,38	640,07	77,23
16	Kab. Nagan Raya	69,76	91,77	8,11	611,39	70,64
17	Kab. Aceh Jaya	68,13	94,76	8,73	604,83	70,35
18	Kab. Aceh Barat Daya	67,38	96,47	8,25	625,24	71,53
19	Kab. Gayo Lues	67,22	87,89	8,74	607,65	68,54
20	Kab. Aceh Tamiang	68,57	98,33	8,86	607,12	71,65
21	Kab. Bener Meriah	67,74	98,79	8,83	614,81	71,86
22	Kota Subulussalam	66,13	96,55	7,63	620,99	70,06
23	Kab. Pidie Jaya	69,36	95,48	8,69	630,37	73,13

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Sumatera Utara	69,81	97,51	9,07	643,63	75,13
24	Kab. Asahan	69,28	98,00	8,17	637,36	73,80
25	Kab. Dairi	68,78	98,71	8,95	632,23	73,86
26	Kab. Deli Serdang	71,11	98,66	9,56	639,77	76,17
27	Kab. Karo	72,38	98,73	9,29	633,61	76,22
28	Kab. Labuhanbatu	70,23	98,32	8,78	643,08	75,29
29	Kab. Langkat	69,16	97,48	8,80	636,08	73,98
30	Kab. Mandailing Natal	63,79	99,34	7,96	644,44	71,44
31	Kab. Nias	69,94	90,79	6,46	614,77	69,55
32	Kab. Simalungun	69,20	97,58	8,81	640,30	74,35
33	Kab. Tapanuli Selatan	67,48	99,83	8,97	650,18	74,78
34	Kab. Tapanuli Tengah	68,40	95,84	8,19	626,92	72,04
35	Kab. Tapanuli Utara	70,33	98,62	9,03	639,71	75,33
36	Kab. Toba Samosir	70,82	98,50	9,87	652,85	77,21
37	Kota Binjai	72,01	99,22	10,00	642,85	77,36
38	Kota Medan	72,21	99,52	10,86	643,76	78,25
39	Kota Pematangsiantar	72,42	99,47	10,93	642,02	78,27
40	Kota Sibolga	70,34	99,33	9,77	635,65	75,73
41	Kota Tanjung Balai	71,09	99,09	9,08	628,91	75,06
42	Kota Tebing Tinggi	71,60	99,03	9,92	646,89	77,34
43	Kota Padang Sidempuan	69,84	99,74	10,36	636,32	76,04
44	Kab. Pakpak Bharat	68,03	97,51	8,49	621,39	72,00
45	Kab. Nias Selatan	70,70	85,36	6,44	608,04	68,23
46	Kab. Humbang Hasundutan	68,06	98,22	9,34	621,32	72,80
47	Kab. Serdang Bedagai	69,18	97,81	8,67	637,36	74,07
48	Kab. Samosir	69,95	97,92	9,55	631,43	74,72
49	Kab. Batubara	68,83	96,10	7,88	634,83	72,71
50	Kab. Padang Lawas	67,15	99,66	8,43	634,60	72,96
51	Kab. Padang Lawas Utara	66,67	99,53	8,93	641,80	73,59
52	Kab. Labuhanbatu Utara	70,31	98,90	8,26	641,05	74,92
53	Kab. Labuhanbatu Selatan	70,50	98,94	8,36	638,28	74,90
54	Kab. Nias Utara	69,33	89,31	6,45	612,58	68,71
55	Kab. Nias Barat	69,31	84,47	6,17	614,83	67,59
56	Kota Gunungsitoli	70,63	94,88	8,48	618,19	72,61

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Sumatera Barat	70,02	97,23	8,60	641,85	74,70
57	Kab. Lima Puluh Kota	69,18	99,01	8,01	616,54	72,24
58	Kab. Agam	69,43	97,87	8,61	636,57	74,11
59	Kab. Kepulauan Mentawai	68,63	93,69	6,52	611,43	69,26
60	Kab. Padang Pariaman	69,38	94,53	7,46	637,05	72,53
61	Kab. Pasaman	68,11	98,84	7,87	646,09	73,78
62	Kab. Pesisir Selatan	67,88	96,00	8,23	634,99	72,43
63	Kab. Sijunjung	67,58	94,80	7,51	639,31	71,80
64	Kab. Solok	67,30	97,24	8,04	633,78	72,15
65	Kab. Tanah Datar	71,67	97,27	8,41	635,60	75,00
66	Kota Bukittinggi	71,85	99,93	10,59	658,39	79,07
67	Kota Padang Panjang	72,01	99,32	10,74	650,36	78,51
68	Kota Padang	71,39	99,51	10,94	652,88	78,55
69	Kota Payakumbuh	70,94	99,20	9,91	643,67	76,76
70	Kota Sawahlunto	72,08	98,63	9,42	630,20	75,87
71	Kota Solok	70,03	99,21	10,49	641,79	76,54
72	Kota Pariaman	69,48	98,94	9,93	634,90	75,23
73	Kab. Pasaman Barat	65,68	98,32	8,06	628,04	71,07
74	Kab. Dharmasraya	66,50	97,29	8,24	612,72	70,25
75	Kab. Solok Selatan	64,88	97,63	7,86	619,84	69,69

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Riau	71,69	98,45	8,64	654,48	76,90
76	Kab. Bengkalis	70,56	98,17	9,18	644,81	75,86
77	Kab. Indragiri Hilir	71,88	99,18	7,63	650,91	76,15
78	Kab. Indragiri Hulu	69,01	98,22	8,01	654,52	74,90
79	Kab. Kampar	68,83	98,60	8,93	654,20	75,54
80	Kab. Kuantan Singingi	68,53	98,09	8,06	652,69	74,50
81	Kab. Pelalawan	69,08	98,51	8,24	638,32	73,92
82	Kab. Rokan Hilir	67,32	98,18	7,90	645,54	73,17
83	Kab. Rokan Hulu	67,26	98,40	7,94	650,69	73,62
84	Kab. Siak	72,03	98,68	9,14	651,35	77,27
85	Kota Dumai	72,26	99,40	9,74	660,81	78,73
86	Kota Pekanbaru	71,88	99,90	11,35	652,20	79,16
87	Kab. Kepulauan Meranti	68,98	90,36	7,35	639,27	71,47

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Kepulauan Riau	69,91	97,80	9,81	648,92	76,20
88	Kab. Bintan	69,80	96,92	8,95	653,63	75,68
89	Kab. Natuna	68,43	96,82	7,78	624,33	71,77
90	Kab. Karimun	69,94	96,83	8,16	644,56	74,45
91	Kota Batam	70,91	99,29	10,84	656,71	78,46
92	Kota Tanjung Pinang	69,72	98,70	10,18	641,10	75,97
93	Kab. Lingga	70,37	91,79	7,27	633,85	72,09
94	Kab. Kepulauan Anambas	67,66	91,87	6,67	633,29	70,11

<http://www.bps.go.id>

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Jambi	69,44	96,20	8,20	640,82	73,78
95	Kab. Batanghari	69,56	97,58	7,92	639,40	73,83
96	Kab. Bungo	67,81	96,34	8,18	642,95	73,05
97	Kab. Kerinci	71,09	97,26	8,27	642,65	75,11
98	Kab. Merangin	68,83	97,53	7,65	634,70	72,85
99	Kab. Muaro Jambi	69,39	96,84	8,17	637,32	73,59
100	Kab. Sarolangun	69,71	94,98	7,55	646,48	73,61
101	Kab. Tanjung Jabung Barat	70,05	97,93	7,60	636,24	73,70
102	Kab. Tanjung Jabung Timur	71,09	92,44	6,39	640,95	72,52
103	Kab. Tebo	69,37	95,22	7,43	637,47	72,69
104	Kota Jambi	69,95	99,07	10,56	649,09	77,08
105	Kota Sungai Penuh	71,09	97,28	9,68	661,60	77,63

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Sumatera Selatan	70,05	97,50	7,99	637,47	73,99
106	Kab. Lahat	68,90	97,84	8,37	619,03	72,29
107	Kab. Musi Banyuasin	70,39	98,59	7,63	624,50	73,15
108	Kab. Musi Rawas	65,10	97,36	7,14	617,20	69,01
109	Kab. Muara Enim	68,03	98,85	7,53	622,30	71,65
110	Kab. Ogan Komering Ilir	68,48	96,62	6,76	630,28	71,45
111	Kab. Ogan Komering Ulu	69,61	98,49	8,51	633,19	74,01
112	Kota Palembang	71,60	98,94	10,30	643,98	77,38
113	Kota Pagar Alam	70,61	98,62	9,01	622,47	74,15
114	Kota Lubuk Linggau	65,99	98,51	9,37	617,82	71,46
115	Kota Prabumulih	72,73	98,72	9,29	621,13	75,45
116	Kab. Banyuasin	67,77	96,51	7,08	622,82	70,70
117	Kab. Ogan Ilir	66,86	97,73	7,57	618,79	70,52
118	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	68,48	94,86	7,30	620,67	70,72
119	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	69,51	98,35	7,48	621,73	72,29
120	Kab. Empat Lawang	65,78	98,36	7,69	612,92	69,69

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Bangka Belitung	69,21	95,88	7,68	648,49	73,78
121	Kab. Bangka	68,06	96,71	8,10	648,92	73,67
122	Kab. Belitung	69,36	96,57	7,85	648,27	74,13
123	Kota Pangkal Pinang	70,65	98,22	10,05	648,52	76,85
124	Kab. Bangka Selatan	68,13	93,68	6,04	599,84	67,73
125	Kab. Bangka Tengah	68,19	96,79	7,17	638,52	72,27
126	Kab. Bangka Barat	68,02	93,85	7,02	632,42	70,94
127	Kab. Belitung Timur	69,28	96,74	7,74	633,09	72,87

<http://www.bps.go.id>

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Bengkulu	70,39	95,69	8,48	634,74	73,93
128	Kab. Bengkulu Selatan	67,77	96,54	8,67	639,61	73,18
129	Kab. Bengkulu Utara	69,97	93,54	7,84	634,75	72,74
130	Kab. Rejang Lebong	67,98	95,74	8,01	634,20	72,21
131	Kota Bengkulu	70,84	99,32	11,26	653,78	78,51
132	Kab. Kaur	67,85	97,08	8,17	615,69	71,13
133	Kab. Seluma	66,25	94,09	7,46	598,07	67,69
134	Kab. Mukomuko	68,17	94,10	7,74	631,29	71,53
135	Kab. Lebong	67,43	95,56	7,93	625,28	71,12
136	Kab. Kepahiang	64,88	96,41	8,10	617,40	69,41
137	Kab. Bengkulu Tengah	70,27	91,91	7,26	598,86	69,35

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Lampung	70,05	95,13	7,87	625,52	72,45
138	Kab. Lampung Barat	67,77	97,36	7,47	609,69	70,17
139	Kab. Lampung Selatan	69,05	94,94	7,50	617,36	70,95
140	Kab. Lampung Tengah	69,72	93,74	7,60	626,14	71,81
141	Kab. Lampung Utara	68,49	95,71	8,10	617,67	71,28
142	Kab. Lampung Timur	70,74	93,74	7,60	616,69	71,64
143	Kab. Tanggamus	70,15	95,48	7,43	626,37	72,32
144	Kab. Tulang Bawang	69,41	95,79	7,39	621,81	71,60
145	Kab. Way Kanan	69,96	94,91	7,33	611,10	70,84
146	Kota Bandar Lampung	71,61	98,50	10,30	638,04	76,83
147	Kota Metro	72,98	98,40	10,15	636,08	77,30
148	Kab. Pesawaran	68,71	96,76	7,53	613,62	70,90
149	Kab. Pringsewu	68,77	95,09	8,62	632,20	72,80
150	Kab. Mesuji	68,50	93,30	6,39	602,26	68,30
151	Kab. Tulang Bawang Barat	68,78	93,88	7,49	607,88	69,82

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi DKI Jakarta	73,49	99,21	10,98	635,29	78,33
	Provinsi Jawa Barat	68,60	96,39	8,08	638,90	73,11
152	Kab. Bandung	69,17	98,78	8,47	645,17	74,73
153	Kab. Bekasi	70,07	94,39	8,73	641,01	74,13
154	Kab. Bogor	69,70	95,27	8,00	634,52	73,08
155	Kab. Ciamis	67,65	97,96	7,47	634,46	72,14
156	Kab. Cianjur	66,70	97,67	6,87	620,40	70,02
157	Kab. Cirebon	65,52	92,50	6,89	637,93	69,58
158	Kab. Garut	66,39	98,98	7,37	641,28	72,12
159	Kab. Indramayu	67,64	85,69	5,96	642,33	68,89
160	Kab. Karawang	67,30	93,24	7,32	635,90	70,89
161	Kab. Kuningan	67,71	97,02	7,46	634,98	71,99
162	Kab. Majalengka	66,88	95,14	7,19	638,12	71,16
163	Kab. Purwakarta	67,64	96,65	7,57	638,28	72,21
164	Kab. Subang	69,69	92,50	6,96	635,84	71,79
165	Kab. Sukabumi	67,70	97,56	6,93	632,14	71,50
166	Kab. Sumedang	67,63	97,82	7,96	640,82	72,95
167	Kab. Tasikmalaya	68,40	98,95	7,34	636,53	72,84
168	Kota Bandung	69,85	99,72	10,62	644,48	76,86
169	Kota Bekasi	69,76	98,57	10,84	650,45	77,17
170	Kota Bogor	69,07	98,97	9,81	655,00	76,47
171	Kota Cirebon	68,54	97,44	10,13	654,29	76,02
172	Kota Depok	73,34	99,01	10,98	654,95	79,71
173	Kota Sukabumi	69,96	99,72	9,36	641,18	75,73
174	Kota Cimahi	69,32	99,80	10,61	640,62	76,28
175	Kota Tasikmalaya	70,60	99,75	8,88	636,11	75,35
176	Kota Banjar	66,49	97,33	8,12	637,86	72,10
177	Kab. Bandung Barat	68,71	99,14	8,11	641,72	74,03

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Banten	65,23	96,51	8,61	636,73	71,49
178	Kab. Lebak	63,42	95,69	6,27	634,85	68,43
179	Kab. Pandeglang	64,13	96,41	6,97	631,24	69,22
180	Kab. Serang	64,25	95,75	7,36	636,45	69,83
181	Kab. Tangerang	66,01	95,89	8,96	640,80	72,36
182	Kota Cilegon	68,67	98,77	9,72	651,86	75,89
183	Kota Tangerang	68,44	98,43	10,07	648,93	75,72
184	Kota Serang	65,81	96,92	8,58	642,18	72,30
185	Kota Tangerang Selatan	68,77	98,51	10,98	649,12	76,61

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Jawa Tengah	71,71	90,45	7,39	643,53	73,36
186	Kab. Banjarnegara	69,36	88,49	6,35	641,53	70,70
187	Kab. Banyumas	69,83	94,24	7,79	641,78	73,33
188	Kab. Batang	70,57	89,93	6,73	634,28	71,41
189	Kab. Blora	71,48	85,06	6,46	645,28	71,49
190	Kab. Boyolali	70,49	87,97	7,43	634,86	71,50
191	Kab. Brebes	68,26	86,69	6,07	640,06	69,37
192	Kab. Cilacap	71,43	91,49	6,87	639,78	72,77
193	Kab. Demak	71,95	92,54	7,62	635,62	73,52
194	Kab. Grobogan	70,05	90,94	6,83	638,68	71,77
195	Kab. Jepara	71,13	93,29	7,58	639,89	73,54
196	Kab. Karanganyar	72,36	88,95	8,27	651,05	74,62
197	Kab. Kebumen	69,43	91,54	6,93	641,78	71,86
198	Kab. Kendal	69,10	89,77	7,11	642,55	71,48
199	Kab. Klaten	71,84	89,93	8,31	649,49	74,46
200	Kab. Kudus	69,73	93,74	8,49	642,02	73,69
201	Kab. Magelang	70,23	93,31	7,55	641,45	73,14
202	Kab. Pati	72,95	87,61	7,01	652,22	73,81
203	Kab. Pekalongan	69,56	92,11	6,80	646,96	72,37
204	Kab. Pemasang	68,12	90,80	6,54	641,52	70,66
205	Kab. Purbalingga	70,68	93,52	7,23	638,41	72,97
206	Kab. Purworejo	71,04	92,79	7,93	638,51	73,53
207	Kab. Rembang	70,34	91,37	7,05	646,90	72,81
208	Kab. Semarang	72,60	94,20	8,07	640,67	74,98
209	Kab. Sragen	72,95	84,41	7,22	633,90	71,85
210	Kab. Sukoharjo	70,36	90,73	8,53	652,39	74,21
211	Kab. Tegal	69,38	90,64	6,62	646,19	71,74
212	Kab. Temanggung	72,77	95,97	7,10	640,56	74,74
213	Kab. Wonogiri	72,42	84,32	6,65	653,07	72,59
214	Kab. Wonosobo	70,48	91,43	6,56	632,71	71,45
215	Kota Magelang	70,34	97,52	10,36	655,08	77,26
216	Kota Pekalongan	70,63	95,94	8,72	647,14	75,25
217	Kota Salatiga	71,25	96,55	9,98	653,16	77,13
218	Kota Semarang	72,24	96,98	10,30	652,80	77,98
219	Kota Surakarta	72,35	96,73	10,49	658,92	78,60
220	Kota Tegal	69,12	94,91	8,30	656,99	74,63

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi DI Yogyakarta	73,33	92,02	9,21	653,78	76,75
221	Kab. Bantul	71,34	92,19	8,95	654,06	75,51
222	Kab. Gunung Kidul	71,04	84,97	7,70	631,91	71,11
223	Kab. Kulon Progo	74,58	92,04	8,37	634,34	75,33
224	Kab. Sleman	75,29	94,53	10,52	654,11	79,39
225	Kota Yogyakarta	73,51	98,10	11,56	657,65	80,24

<http://www.bps.go.id>

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Jawa Timur	70,09	89,28	7,45	651,04	72,83
226	Kab. Bangkalan	63,65	82,90	5,74	639,67	65,69
227	Kab. Banyuwangi	68,38	88,08	7,25	638,95	70,53
228	Kab. Blitar	71,30	92,05	7,40	655,57	74,43
229	Kab. Bojonegoro	67,42	84,85	6,72	624,05	67,74
230	Kab. Bondowoso	63,85	80,72	5,94	633,33	64,98
231	Kab. Gresik	71,47	96,17	8,98	647,31	75,97
232	Kab. Jember	63,21	83,65	6,79	634,48	65,99
233	Kab. Jombang	70,28	93,87	8,04	644,06	73,86
234	Kab. Kediri	70,15	92,87	7,72	636,28	72,72
235	Kab. Lamongan	68,55	88,76	7,59	639,15	71,05
236	Kab. Lumajang	67,75	86,58	6,43	635,76	69,00
237	Kab. Madiun	69,25	89,61	7,44	630,89	70,88
238	Kab. Magetan	71,66	91,08	7,85	643,97	73,85
239	Kab. Malang	69,50	90,73	7,08	643,20	71,94
240	Kab. Mojokerto	70,64	94,16	7,94	648,90	74,42
241	Kab. Nganjuk	69,33	91,11	7,61	638,42	71,96
242	Kab. Ngawi	70,57	85,58	7,02	628,38	70,20
243	Kab. Pacitan	71,69	91,63	6,96	638,09	72,88
244	Kab. Pamekasan	64,79	84,21	6,32	632,76	66,51
245	Kab. Pasuruan	64,61	91,17	6,83	643,59	69,17
246	Kab. Ponorogo	70,40	88,99	7,18	640,30	71,91
247	Kab. Probolinggo	61,70	80,48	5,92	641,64	64,35
248	Kab. Sampang	63,98	69,12	4,22	639,43	61,67
249	Kab. Sidoarjo	71,03	97,79	9,92	654,81	77,36
250	Kab. Situbondo	63,52	78,31	6,22	641,12	65,06
251	Kab. Sumenep	65,07	78,71	5,71	651,21	66,41
252	Kab. Trenggalek	72,13	92,88	7,31	643,71	74,09
253	Kab. Tuban	68,21	85,86	6,53	635,94	69,18
254	Kab. Tulungagung	71,95	94,57	7,95	638,53	74,45
255	Kota Blitar	72,80	97,31	9,77	657,09	78,31
256	Kota Kediri	70,86	97,60	10,24	651,38	77,20
257	Kota Madiun	71,42	97,84	10,46	648,46	77,50
258	Kota Malang	71,02	98,34	10,87	658,02	78,43
259	Kota Mojokerto	72,00	97,18	10,11	656,18	78,01
260	Kota Pasuruan	66,46	97,07	9,05	658,81	74,33
261	Kota Probolinggo	70,86	92,55	8,67	658,14	75,44
262	Kota Surabaya	71,53	98,35	10,10	660,38	78,33
263	Kota Batu	70,00	98,32	8,54	648,74	75,42

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Kalimantan Barat	66,92	91,13	7,14	638,82	70,31
264	Kab. Bengkayang	69,11	89,56	6,54	609,85	68,50
265	Kab. Landak	65,93	93,85	7,54	617,92	69,05
266	Kab. Kapuas Hulu	66,75	92,64	7,18	638,05	70,52
267	Kab. Ketapang	67,87	91,39	6,54	620,77	69,05
268	Kab. Pontianak	67,36	90,25	6,57	632,20	69,42
269	Kab. Sambas	61,69	91,57	6,21	630,69	66,19
270	Kab. Sanggau	68,91	90,50	6,63	620,76	69,50
271	Kab. Sintang	68,74	90,55	6,68	616,69	69,14
272	Kota Pontianak	67,58	95,73	9,85	645,46	74,21
273	Kota Singkawang	67,46	90,25	7,59	626,14	69,77
274	Kab. Sekadau	67,39	91,61	6,83	613,16	68,47
275	Kab. Melawi	67,89	92,44	7,28	614,75	69,39
276	Kab. Kayong Utara	66,00	88,34	5,84	612,56	66,19
277	Kab. Kubu Raya	66,43	89,07	7,11	629,72	68,86

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Kalimantan Tengah	71,41	97,88	8,15	644,21	75,46
278	Kab. Barito Selatan	68,42	98,98	8,47	644,94	74,34
279	Kab. Barito Utara	72,36	98,71	8,40	639,09	75,97
280	Kab. Kapuas	71,02	97,24	7,34	641,86	74,33
281	Kab. Kotawaringin Barat	71,75	94,98	7,97	641,79	74,69
282	Kab. Kotawaringin Timur	69,84	98,77	8,08	649,44	75,14
283	Kota Palangkaraya	73,61	99,53	10,80	647,91	79,30
284	Kab. Barito Timur	67,98	98,01	8,83	639,69	73,75
285	Kab. Murung Raya	68,26	99,95	7,52	645,00	73,77
286	Kab. Pulang Pisau	67,74	96,23	7,67	644,84	72,75
287	Kab. Gunung Mas	68,23	99,64	8,79	637,92	74,08
288	Kab. Lamandau	67,36	98,68	7,83	643,89	73,13
289	Kab. Sukamara	67,98	95,75	7,47	648,08	72,88
290	Kab. Katingan	67,70	99,49	8,36	640,94	73,67
291	Kab. Seruyan	68,09	99,32	7,78	638,66	73,24

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Kalimantan Selatan	64,52	96,43	7,89	643,66	71,08
292	Kab. Banjar	66,12	96,37	7,32	649,27	71,96
293	Kab. Barito Kuala	62,76	94,15	7,25	640,99	68,92
294	Kab. Hulu Sungai Selatan	64,69	96,80	7,37	653,63	71,64
295	Kab. Hulu Sungai Tengah	66,03	97,49	7,50	641,15	71,67
296	Kab. Hulu Sungai Utara	63,87	96,02	7,49	638,34	69,92
297	Kab. Kotabaru	66,15	95,33	7,09	660,40	72,43
298	Kab. Tabalong	63,64	97,17	8,16	644,97	71,05
299	Kab. Tanah Laut	69,11	96,44	7,27	638,23	72,75
300	Kab. Tapin	67,73	96,87	7,26	633,52	71,71
301	Kota Banjarbaru	68,04	99,06	10,66	651,57	76,28
302	Kota Banjarmasin	66,58	98,80	9,88	651,44	74,83
303	Kab. Balangan	62,32	95,66	7,01	626,51	67,71
304	Kab. Tanah Bumbu	65,68	95,25	7,56	641,92	71,09

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Kalimantan Timur	71,58	97,55	9,22	649,85	76,71
305	Kab. Berau	70,43	97,26	8,62	643,26	75,05
306	Kab. Bulungan	73,32	95,95	8,17	643,16	76,03
307	Kab. Kutai Kartanegara	68,17	98,33	8,76	644,56	74,24
308	Kab. Kutai Barat	70,61	96,61	8,21	634,68	74,05
309	Kab. Kutai Timur	69,03	99,29	8,47	631,96	73,75
310	Kab. Malinau	68,62	92,97	8,26	653,63	73,63
311	Kab. Nunukan	72,01	94,79	7,55	646,55	74,84
312	Kab. Paser	73,79	96,71	8,10	635,96	75,85
313	Kota Balikpapan	72,61	98,86	10,46	661,33	79,38
314	Kota Bontang	72,78	99,22	10,40	639,88	77,85
315	Kota Samarinda	71,62	98,56	10,36	655,71	78,26
316	Kota Tarakan	72,19	98,89	9,44	653,00	77,76
317	Kab. Penajam Paser Utara	71,80	95,77	7,71	637,30	74,35
318	Kab. Tana Tidung	72,76	90,15	7,64	625,18	72,66

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Sulawesi Utara	72,44	99,53	9,00	643,20	76,95
319	Kab. Bolaang Mongondow	71,83	98,32	7,44	625,62	73,83
320	Kab. Minahasa	72,61	99,74	9,54	632,63	76,69
321	Kab. Kepulauan Sangihe	73,37	98,75	7,74	643,98	76,42
322	Kota Bitung	70,67	99,42	9,46	643,34	76,30
323	Kota Manado	72,77	99,93	10,84	647,46	78,92
324	Kab. Kepulauan Talaud	72,35	99,58	8,80	635,13	76,14
325	Kab. Minahasa Selatan	72,54	99,81	8,78	624,42	75,46
326	Kota Tomohon	72,95	99,87	10,16	633,07	77,40
327	Kab. Minahasa Utara	72,87	99,78	9,40	635,01	76,91
328	Kota Kotamobagu	72,12	99,66	9,53	636,52	76,68
329	Kab. Bolaang Mongondow Utara	70,22	98,43	7,44	632,27	73,48
330	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	68,81	99,52	8,41	619,46	73,42
331	Kab. Minahasa Tenggara	70,16	99,78	8,49	635,97	74,06
332	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	71,39	99,05	6,88	603,43	71,63
333	Kab. Bolaang Mongondow Timur	71,48	99,57	7,42	619,16	73,41

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Gorontalo	67,47	96,16	7,49	630,01	71,31
334	Kab. Boalemo	68,57	95,77	6,57	608,40	69,49
335	Kab. Gorontalo	69,55	95,00	6,89	621,59	71,12
336	Kota Gorontalo	67,16	99,47	10,28	633,00	74,17
337	Kab. Pohuwato	68,09	97,08	6,72	623,20	70,76
338	Kab. Bone Bolango	69,25	97,47	7,85	627,37	72,65
339	Kab. Gorontalo Utara	67,37	94,89	6,50	626,08	69,94

<http://www.bps.go.id>

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Sulawesi Tengah	67,11	96,16	8,13	637,34	72,14
340	Kab. Banggai	68,96	95,99	8,03	628,37	72,37
341	Kab. Banggai Kepulauan	64,85	95,08	7,94	616,42	68,90
342	Kab. Buol	65,86	98,69	8,30	618,75	70,71
343	Kab. Toli-Toli	64,73	95,37	7,86	627,18	69,67
344	Kab. Donggala	66,01	94,71	7,65	638,32	70,94
345	Kab. Morowali	65,91	97,49	8,20	638,83	71,95
346	Kab. Poso	65,45	97,97	8,80	625,34	71,20
347	Kota Palu	70,54	99,34	11,05	644,56	77,48
348	Kab. Parigi Moutong	65,79	93,98	7,17	631,23	69,75
349	Kab. Tojo Una Una	64,20	97,56	7,92	624,68	69,71
350	Kab. Sigi	65,88	96,56	8,06	599,85	68,61

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Sulawesi Selatan	70,45	88,73	7,95	643,59	72,70
351	Kab. Bantaeng	74,32	80,10	6,46	639,50	71,51
352	Kab. Barru	69,24	89,31	7,87	638,45	71,70
353	Kab. Bone	70,26	87,88	6,72	643,23	71,47
354	Kab. Bulukumba	72,32	86,26	7,11	640,49	72,33
355	Kab. Enrekang	75,39	91,26	8,34	630,59	75,30
356	Kab. Gowa	71,96	82,50	7,24	643,20	71,60
357	Kab. Jeneponto	65,31	77,42	6,23	637,16	65,56
358	Kab. Luwu	74,14	91,70	7,81	635,46	74,68
359	Kab. Luwu Utara	71,81	92,99	7,49	655,38	74,97
360	Kab. Maros	73,22	83,98	7,08	643,56	72,54
361	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	69,14	88,82	7,07	634,50	70,65
362	Kab. Pinrang	72,50	91,63	7,89	643,01	74,39
363	Kab. Kepulauan Selayar	68,02	90,88	7,26	632,86	70,49
364	Kab. Sidenreng Rappang	73,12	89,90	7,48	634,02	73,36
365	Kab. Sinjai	72,50	86,71	7,08	616,20	70,64
366	Kab. Soppeng	71,85	86,99	7,29	643,20	72,57
367	Kab. Takalar	70,27	83,10	6,99	637,03	70,14
368	Kab. Tana Toraja	74,26	88,94	7,83	619,27	72,90
369	Kab. Wajo	71,79	84,99	6,60	644,40	71,67
370	Kota Parepare	74,71	97,33	9,88	646,40	78,63
371	Kota Makassar	74,05	96,88	10,86	654,25	79,49
372	Kota Palopo	72,72	97,43	10,16	640,30	77,28
373	Kab. Luwu Timur	71,29	93,43	8,19	632,76	73,56
374	Kab. Toraja Utara	73,62	85,85	7,86	608,39	71,04

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Sulawesi Barat	68,27	88,79	7,32	639,56	70,73
375	Kab. Majene	66,02	94,77	8,50	649,06	72,41
376	Kab. Mamuju	69,02	89,97	7,47	629,76	70,76
377	Kab. Polewali Mandar	65,53	86,00	7,07	640,07	68,44
378	Kab. Mamasa	71,44	88,07	7,19	637,46	72,07
379	Kab. Mamuju Utara	67,62	95,60	7,26	625,91	70,79

<http://www.bps.go.id>

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Sulawesi Tenggara	68,21	92,04	8,25	625,81	71,05
380	Kab. Buton	69,28	86,62	7,04	631,14	69,95
381	Kab. Konawe	67,82	94,68	8,56	616,76	70,95
382	Kab. Kolaka	67,64	93,30	8,09	640,22	72,00
383	Kab. Muna	66,16	88,37	7,53	623,14	68,35
384	Kota Kendari	69,24	98,68	11,39	639,95	76,51
385	Kota Bau-bau	70,99	95,65	9,89	625,46	74,58
386	Kab. Konawe Selatan	67,94	94,13	7,66	616,97	70,24
387	Kab. Bombana	68,12	89,53	7,28	610,12	68,51
388	Kab. Wakatobi	68,30	91,35	7,76	602,46	68,78
389	Kab. Kolaka Utara	65,83	93,61	7,65	628,93	69,87
390	Kab. Konawe Utara	67,63	93,84	7,97	611,91	69,84
391	Kab. Buton Utara	68,92	88,34	8,05	610,76	69,31

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Bali	70,84	90,17	8,57	640,86	73,49
392	Kab. Badung	71,91	93,01	9,47	644,94	75,69
393	Kab. Bangli	71,81	85,83	6,68	642,64	71,80
394	Kab. Buleleng	69,53	89,94	7,54	640,64	71,93
395	Kab. Gianyar	72,22	88,79	8,90	644,69	74,49
396	Kab. Jembrana	71,95	91,36	7,86	637,96	73,62
397	Kab. Karangasem	68,00	76,03	5,88	654,46	67,83
398	Kab. Klungkung	69,20	84,15	7,43	658,53	71,76
399	Kab. Tabanan	74,55	90,86	8,39	640,54	75,55
400	Kota Denpasar	73,12	97,52	10,94	649,48	78,80

<http://www.bps.go.id>

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	62,73	83,68	7,19	645,72	66,89
401	Kab. Bima	63,55	87,02	7,59	621,52	66,52
402	Kab. Dompu	61,26	87,94	7,97	645,50	67,58
403	Kab. Lombok Barat	61,71	78,59	6,10	630,13	63,19
404	Kab. Lombok Tengah	61,96	73,92	6,19	632,97	62,57
405	Kab. Lombok Timur	61,88	83,89	6,91	628,09	64,91
406	Kab. Sumbawa	60,93	90,87	7,64	638,03	67,23
407	Kota Mataram	67,62	92,25	9,68	650,09	73,70
408	Kota Bima	63,22	93,80	10,22	622,00	69,83
409	Kab. Sumbawa Barat	61,61	92,50	8,02	632,76	67,85
410	Kab. Lombok Utara	61,32	77,00	5,61	618,65	61,37

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	68,04	89,23	7,09	610,29	68,28
411	Kab. Alor	67,58	96,01	7,47	604,43	69,35
412	Kab. Belu	66,70	83,93	6,56	604,62	65,52
413	Kab. Ende	65,29	94,00	7,55	609,48	68,08
414	Kab. Flores Timur	68,73	90,18	6,76	617,68	69,19
415	Kab. Kupang	65,94	89,24	7,45	606,96	67,12
416	Kab. Lembata	66,88	93,96	7,02	611,17	68,69
417	Kab. Manggarai	67,74	92,62	6,83	605,49	68,30
418	Kab. Ngada	67,46	96,92	7,63	617,63	70,63
419	Kab. Sikka	69,63	91,75	6,59	602,47	68,74
420	Kab. Sumba Barat	65,75	80,44	6,62	612,59	64,88
421	Kab. Sumba Timur	62,33	86,22	6,44	602,22	63,33
422	Kab. Timor Tengah Selatan	67,26	84,40	6,69	612,08	66,61
423	Kab. Timor Tengah Utara	69,19	88,16	6,92	610,66	68,57
424	Kota Kupang	73,46	98,57	11,27	635,08	78,37
425	Kab. Rote Ndao	68,74	89,04	6,46	596,61	67,10
426	Kab. Manggarai Barat	66,84	92,46	6,58	596,02	66,84
427	Kab. Nagekeo	63,86	95,05	7,15	609,50	67,23
428	Kab. Sumba Barat Daya	64,16	74,32	6,21	614,56	62,48
429	Kab. Sumba Tengah	63,13	76,09	5,34	615,16	61,70
430	Kab. Manggarai Timur	68,12	92,72	6,53	589,32	67,06
431	Kab. Sabu Raijua	67,92	77,55	5,54	515,05	57,12

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Maluku	67,84	98,17	9,15	620,08	72,42
432	Kab. Maluku Tenggara Barat	64,56	99,75	8,98	603,71	69,57
433	Kab. Maluku Tengah	66,03	99,11	8,88	621,68	71,55
434	Kab. Maluku Tenggara	68,39	99,58	8,91	625,36	73,27
435	Kab. Buru	68,94	92,85	7,92	614,76	70,54
436	Kota Ambon	73,31	99,62	11,37	645,73	79,41
437	Kab. Seram Bagian Barat	66,79	98,30	8,57	606,55	70,40
438	Kab. Seram Bagian Timur	66,28	98,17	7,93	597,25	68,90
439	Kab. Kepulauan Aru	68,15	99,07	8,02	606,51	70,91
440	Kota Tual	69,38	99,71	9,93	664,39	77,62
441	Kab. Buru Selatan	67,82	89,79	7,31	630,14	69,97
442	Kab. Maluku Barat Daya	64,56	98,25	8,09	588,22	67,38

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Maluku Utara	66,65	96,43	8,71	606,22	69,98
443	Kab. Halmahera Tengah	67,38	96,83	8,25	604,80	70,03
444	Kab. Halmahera Barat	64,83	95,83	7,87	598,78	67,65
445	Kota Ternate	71,26	99,16	10,93	642,88	77,62
446	Kab. Halmahera Timur	65,98	95,79	7,84	604,66	68,71
447	Kota Tidore Kepulauan	65,44	97,72	9,01	614,32	70,45
448	Kab. Kepulauan Sula	65,71	97,46	8,02	601,64	68,83
449	Kab. Halmahera Selatan	65,90	96,09	7,69	607,98	68,87
450	Kab. Halmahera Utara	66,51	97,71	8,28	605,76	69,84
451	Kab. Pulau Morotai	65,87	94,08	6,96	584,70	66,08

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Papua	69,12	75,83	6,87	611,99	65,86
452	Kab. Biak Numfor	67,01	98,68	9,64	597,19	70,68
453	Kab. Jayapura	67,74	96,90	9,56	629,04	73,09
454	Kab. Jayawijaya	66,84	52,77	5,31	597,80	57,22
455	Kab. Merauke	63,00	88,22	9,46	604,01	66,52
456	Kab. Mimika	70,87	88,20	6,93	617,07	70,02
457	Kab. Nabire	68,05	83,67	7,29	621,17	68,03
458	Kab. Paniai	68,30	62,95	6,22	592,22	60,54
459	Kab. Puncak Jaya	67,71	86,82	6,12	630,17	68,37
460	Kab. Kepulauan Yapen	68,88	90,87	6,74	638,05	70,98
461	Kota Jayapura	68,77	99,84	11,06	644,80	76,64
462	Kab. Sarmi	66,58	87,68	7,00	619,10	67,73
463	Kab. Keerom	67,51	92,39	7,43	623,51	69,95
464	Kab. Yahukimo	67,38	32,77	2,92	590,33	50,73
465	Kab. Pegunungan Bintang	66,24	32,50	2,59	590,78	49,83
466	Kab. Tolikara	66,24	33,45	3,38	617,19	52,66
467	Kab. Boven Digoel	67,15	35,25	3,65	586,86	51,43
468	Kab. Mappi	66,30	33,47	4,36	592,62	51,53
469	Kab. Asmat	67,34	31,15	4,42	599,78	52,19
470	Kab. Waropen	66,03	78,27	6,55	609,31	64,24
471	Kab. Supiori	66,49	96,69	8,10	602,17	69,19
472	Kab. Mamberamo Raya	66,34	65,36	5,20	604,49	60,18
473	Kab. Mamberamo Tengah	66,62	34,53	2,93	577,58	49,73
474	Kab. Yalimo	66,77	33,52	2,81	575,10	49,31
475	Kab. Lanny Jaya	66,70	36,92	3,75	573,53	50,60
476	Kab. Nduga	66,02	30,54	2,81	582,51	48,80
477	Kab. Puncak	67,84	32,15	2,85	576,99	49,77
478	Kab. Dogiyai	67,44	34,65	4,16	577,17	51,09
479	Kab. Intan Jaya	66,87	28,08	2,30	593,30	49,17
480	Kab. Deiyai	66,64	31,02	2,96	588,19	49,80

Tabel R3

Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Pembentuknya 2012 menurut Kabupaten/Kota (Lanjutan)

Kode	Provinsi/Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup 2012 (tahun)	Angka Melek Huruf 2012 (persen)	Rata-rata lama sekolah 2012 (tahun)	Pengeluaran per kapita disesuaikan 2012 (Ribu Rp)	IPM 2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi Papua Barat	69,14	93,74	8,45	601,56	70,22
481	Kab. Sorong	68,59	91,84	8,11	601,41	69,23
482	Kab. Manokwari	68,58	89,03	8,53	590,54	68,07
483	Kab. Fak-Fak	71,24	98,47	9,49	594,23	72,64
484	Kota Sorong	72,52	99,69	10,99	641,28	78,36
485	Kab. Sorong Selatan	66,99	88,45	8,09	591,79	66,83
486	Kab. Raja Ampat	66,82	94,34	7,53	563,96	65,49
487	Kab. Teluk Bintuni	68,88	87,38	7,02	601,28	67,58
488	Kab. Teluk Wondama	68,01	85,12	7,14	602,76	66,80
489	Kab. Kaimana	70,11	96,99	7,95	603,01	71,22
490	Kab. Tambrauw	66,48	77,38	5,80	446,25	51,18
491	Kab. Maybrat	66,92	91,22	8,64	584,54	67,26



LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

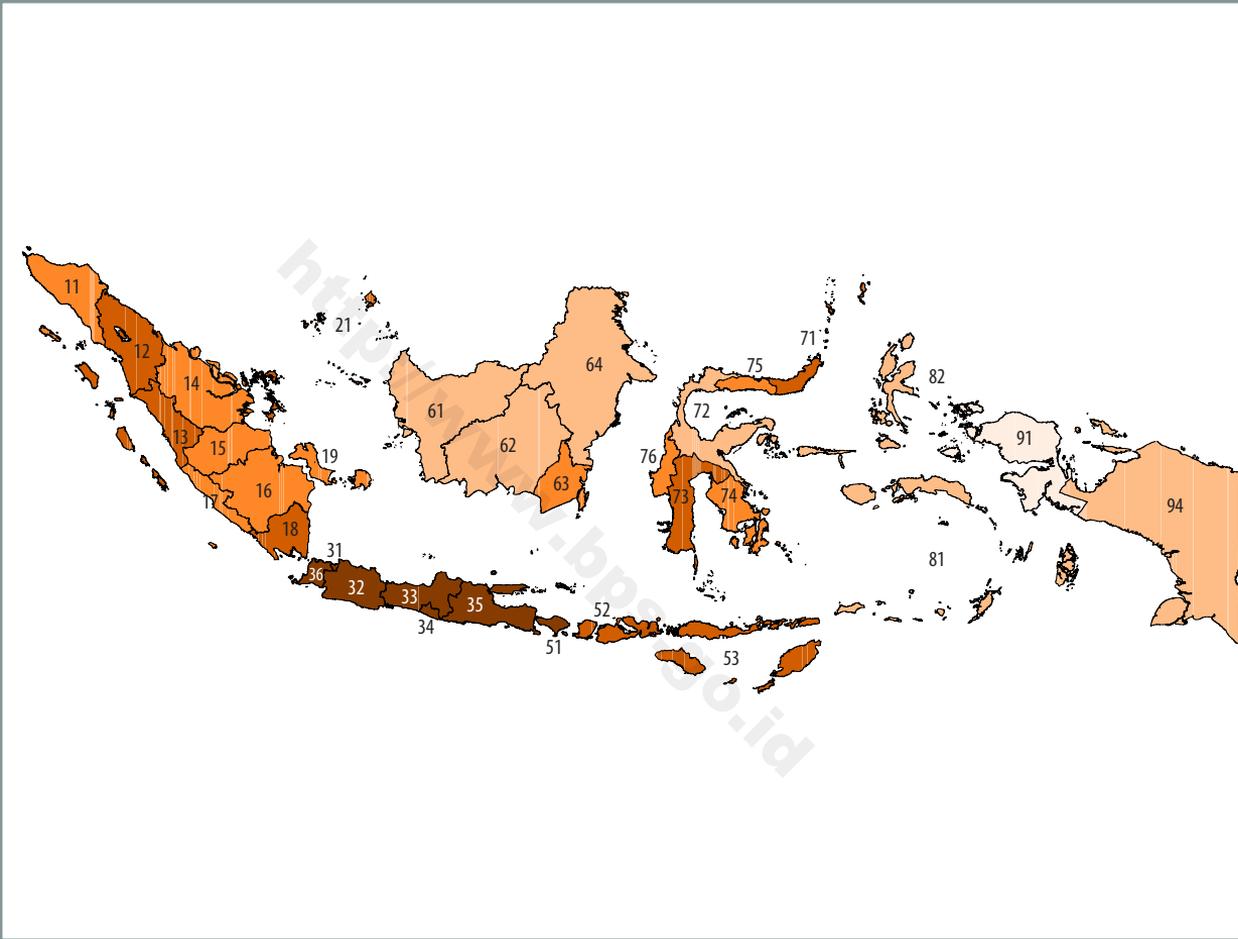
Lampiran 1

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun Indonesia menurut Provinsi, 2013

- 11. Aceh
- 12. Sumatera Utara
- 13. Sumatera Barat
- 14. Riau
- 15. Jambi
- 16. Sumatera Selatan
- 17. Bengkulu
- 18. Lampung
- 19. Kep. Bangka Belitung
- 21. Kep Riau
- 31. DKI Jakarta
- 32. Jawa Barat
- 33. Jawa Tengah
- 34. DI Yogyakarta
- 35. Jawa Timur
- 36. Banten
- 51. Bali
- 52. Nusa Tenggara Barat
- 53. Nusa Tenggara Timur
- 61. Kalimantan Barat
- 62. Kalimantan Tengah
- 63. Kalimantan Selatan
- 64. Kalimantan Timur
- 71. Sulawesi Utara
- 72. Sulawesi Tengah
- 73. Sulawesi Selatan
- 74. Sulawesi Tenggara
- 75. Gorontalo
- 76. Sulawesi Barat
- 81. Maluku
- 82. Maluku Utara
- 91. Papua Barat
- 94. Papua

Legenda : Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)

	< 10
	10-50
	50-100
	100-500
	> 500



Lampiran 2

Indeks Pembangunan Manusia menurut Provinsi, 2012



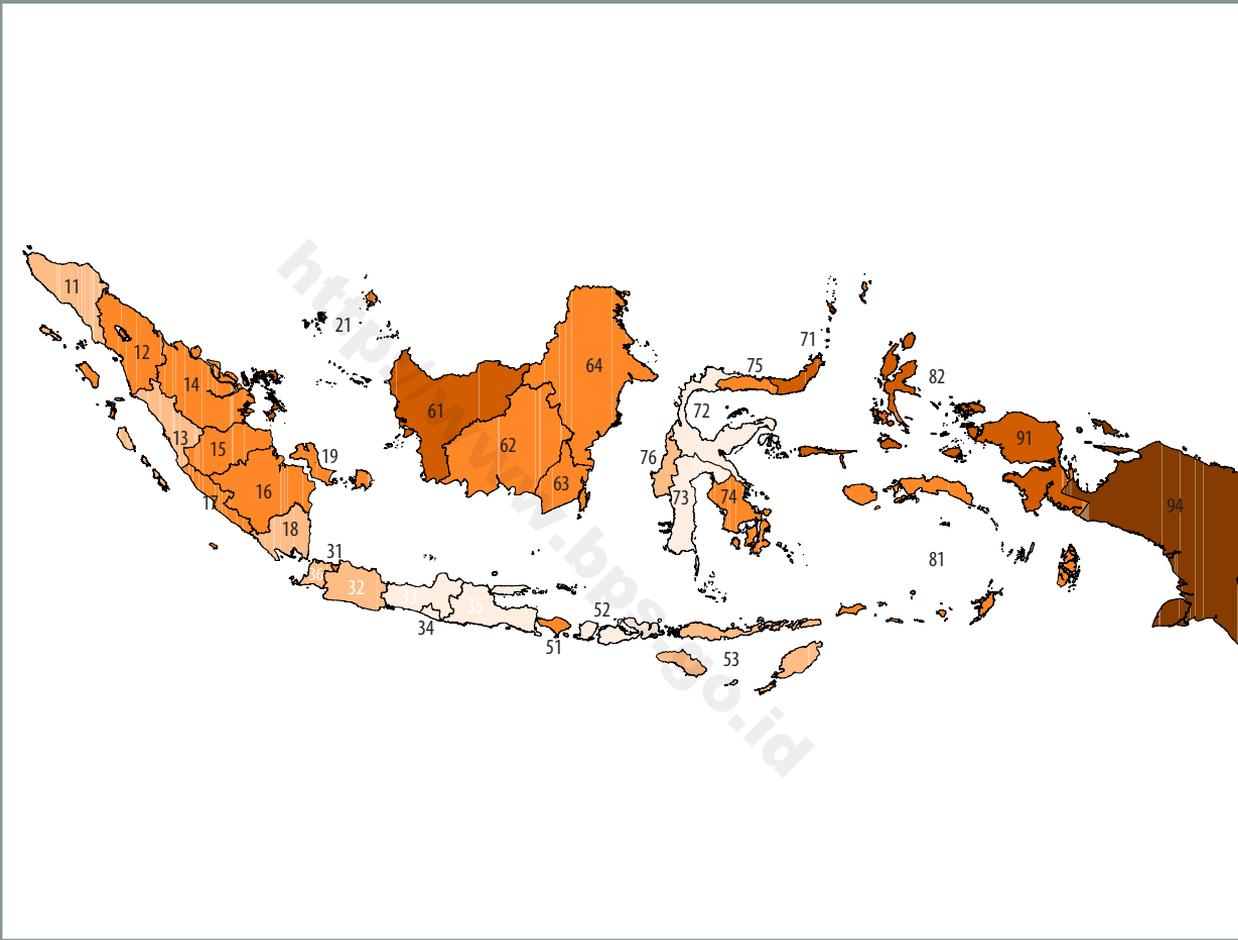
Lampiran 3

Indeks Kemahalan Konstruksi menurut Provinsi, 2013

- 11. Aceh
- 12. Sumatera Utara
- 13. Sumatera Barat
- 14. Riau
- 15. Jambi
- 16. Sumatera Selatan
- 17. Bengkulu
- 18. Lampung
- 19. Kep. Bangka Belitung
- 21. Kep Riau
- 31. DKI Jakarta
- 32. Jawa Barat
- 33. Jawa Tengah
- 34. DI Yogyakarta
- 35. Jawa Timur
- 36. Banten
- 51. Bali
- 52. Nusa Tenggara Barat
- 53. Nusa Tenggara Timur
- 61. Kalimantan Barat
- 62. Kalimantan Tengah
- 63. Kalimantan Selatan
- 64. Kalimantan Timur
- 71. Sulawesi Utara
- 72. Sulawesi Tengah
- 73. Sulawesi Selatan
- 74. Sulawesi Tenggara
- 75. Gorontalo
- 76. Sulawesi Barat
- 81. Maluku
- 82. Maluku Utara
- 91. Papua Barat
- 94. Papua

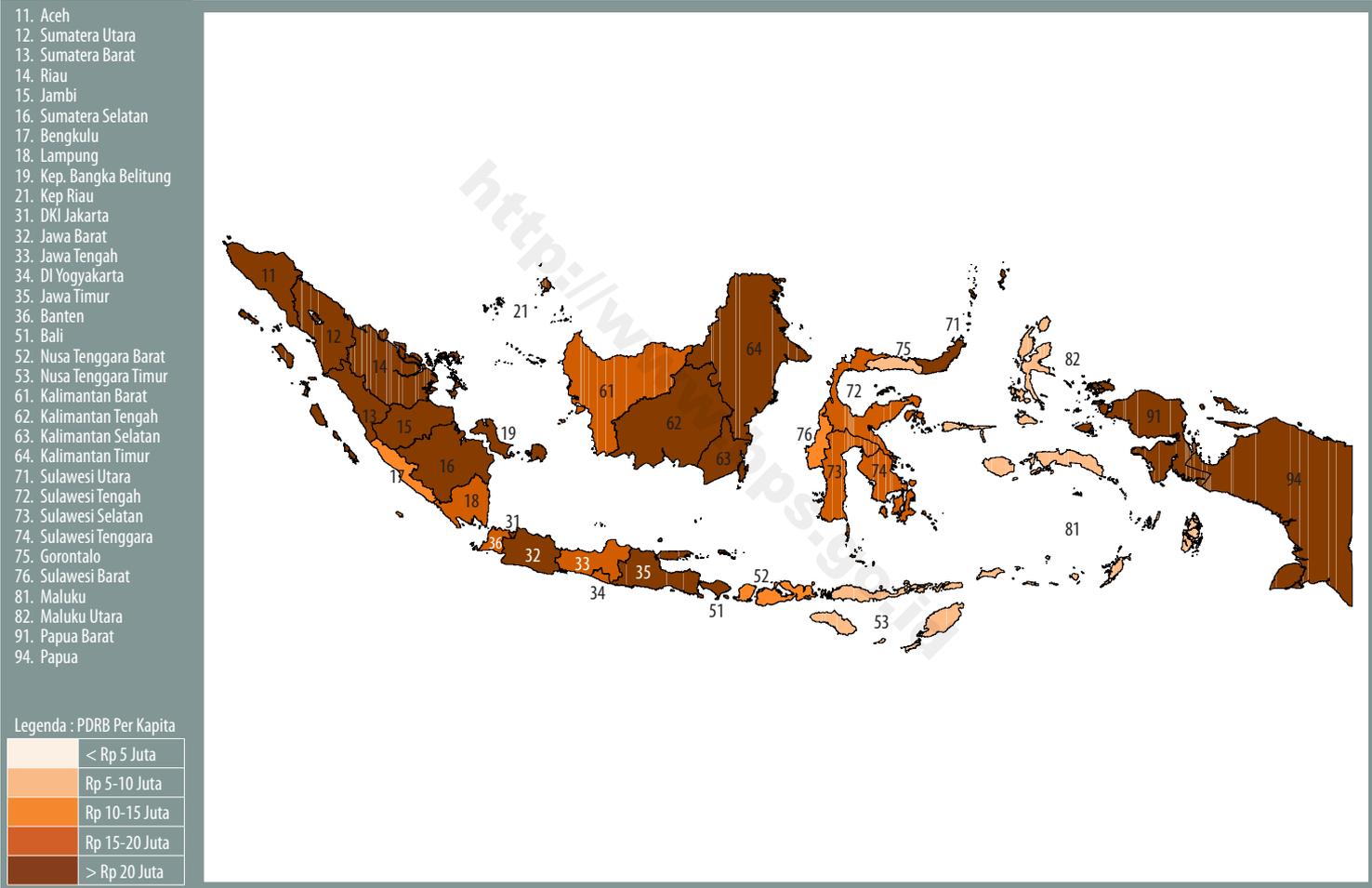
Legenda : IKK 2013

	< 87.2
	87.2-92.45
	92.45-101.61
	101.61-142.98
	> 142.98



Lampiran 4

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan Migas menurut Provinsi, 2012



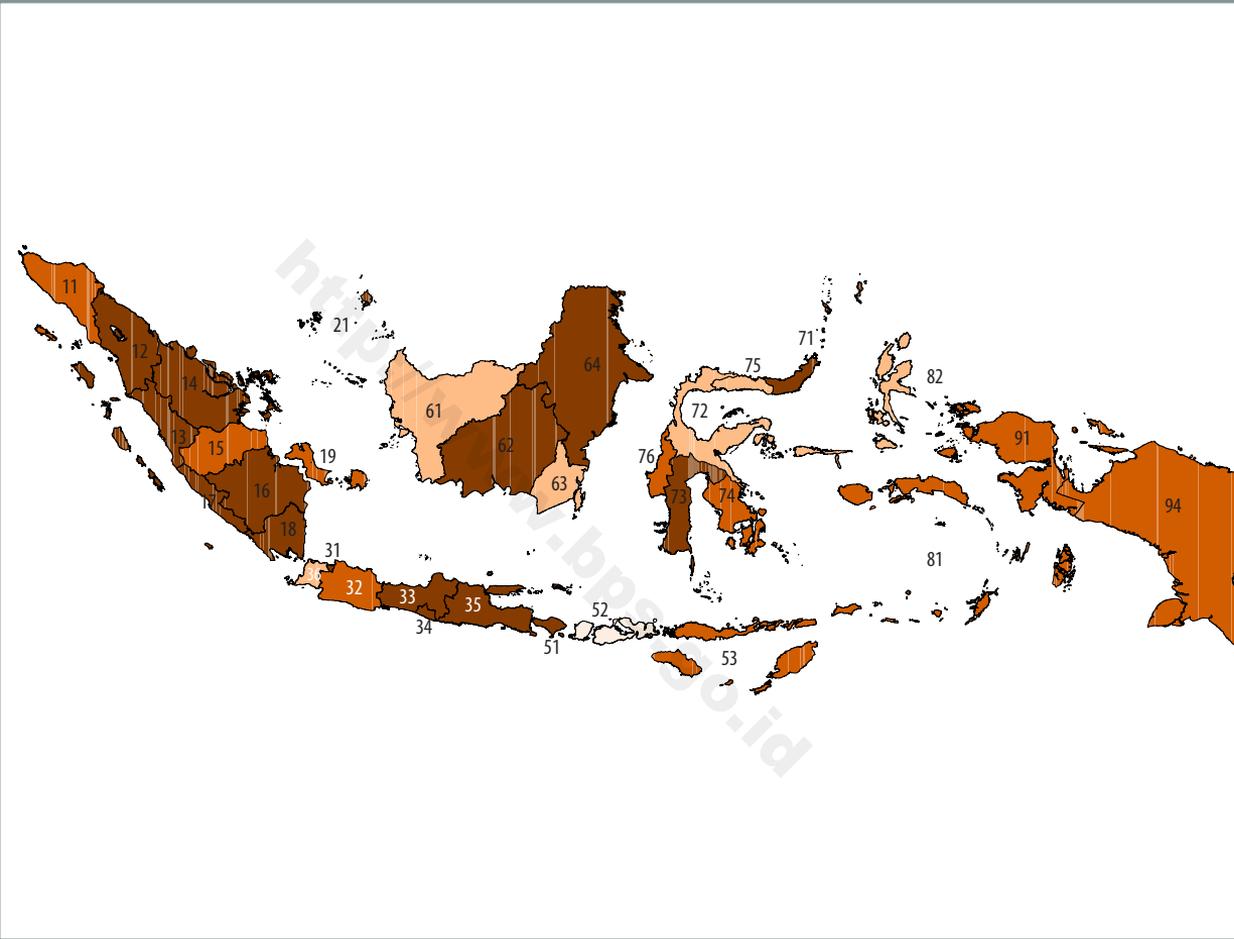
Lampiran 5

Angka Harapan Hidup (e₀) menurut Provinsi, 2012

- 11. Aceh
- 12. Sumatera Utara
- 13. Sumatera Barat
- 14. Riau
- 15. Jambi
- 16. Sumatera Selatan
- 17. Bengkulu
- 18. Lampung
- 19. Kep. Bangka Belitung
- 21. Kep Riau
- 31. DKI Jakarta
- 32. Jawa Barat
- 33. Jawa Tengah
- 34. DI Yogyakarta
- 35. Jawa Timur
- 36. Banten
- 51. Bali
- 52. Nusa Tenggara Barat
- 53. Nusa Tenggara Timur
- 61. Kalimantan Barat
- 62. Kalimantan Tengah
- 63. Kalimantan Selatan
- 64. Kalimantan Timur
- 71. Sulawesi Utara
- 72. Sulawesi Tengah
- 73. Sulawesi Selatan
- 74. Sulawesi Tenggara
- 75. Gorontalo
- 76. Sulawesi Barat
- 81. Maluku
- 82. Maluku Utara
- 91. Papua Barat
- 94. Papua

Legenda : Angka Harapan
Hidup (e₀) 2012

	< 64.5
	64.5 - 67.5
	67.5 - 69.5
	> 69.5



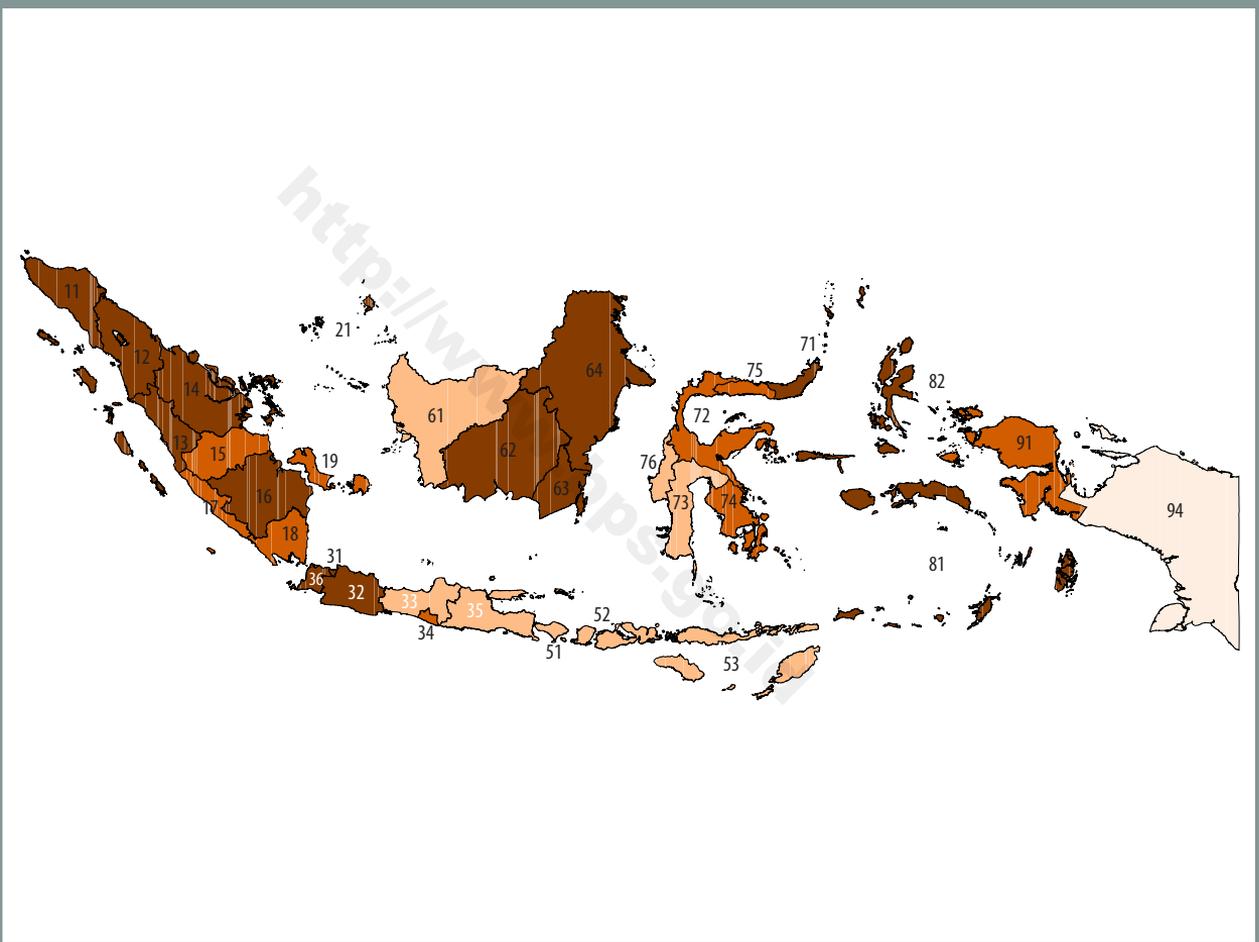
Lampiran 6

Angka Melek Huruf (AMH) menurut Provinsi, 2012

11. Aceh
12. Sumatera Utara
13. Sumatera Barat
14. Riau
15. Jambi
16. Sumatera Selatan
17. Bengkulu
18. Lampung
19. Kep. Bangka Belitung
21. Kep Riau
31. DKI Jakarta
32. Jawa Barat
33. Jawa Tengah
34. DI Yogyakarta
35. Jawa Timur
36. Banten
51. Bali
52. Nusa Tenggara Barat
53. Nusa Tenggara Timur
61. Kalimantan Barat
62. Kalimantan Tengah
63. Kalimantan Selatan
64. Kalimantan Timur
71. Sulawesi Utara
72. Sulawesi Tengah
73. Sulawesi Selatan
74. Sulawesi Tenggara
75. Gorontalo
76. Sulawesi Barat
81. Maluku
82. Maluku Utara
91. Papua Barat
94. Papua

Legenda : Angka Melek Huruf (AMH) 2012

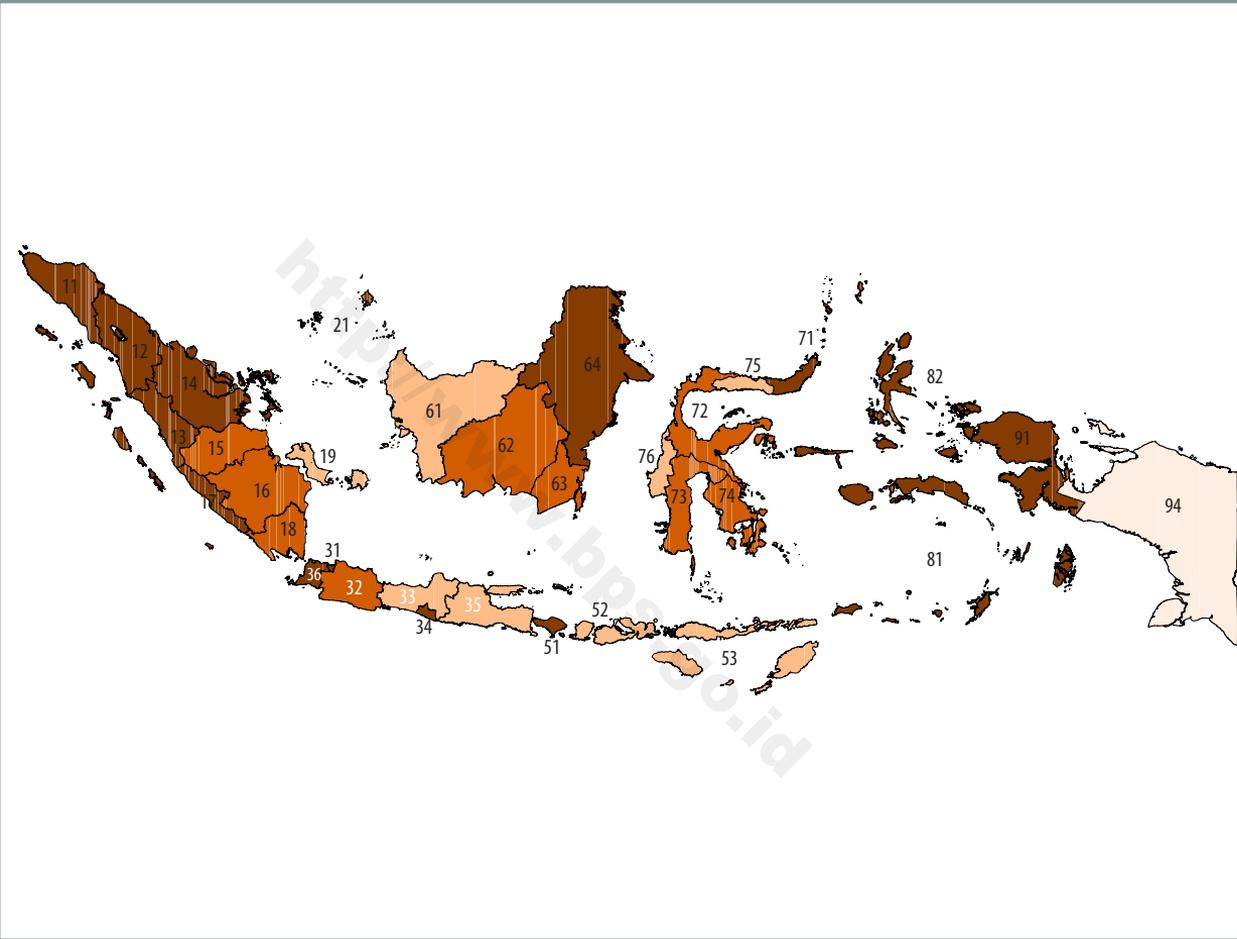
< 80.13
80.14 - 91.4
91.4 - 96.36
> 96.36



- 11. Aceh
- 12. Sumatera Utara
- 13. Sumatera Barat
- 14. Riau
- 15. Jambi
- 16. Sumatera Selatan
- 17. Bengkulu
- 18. Lampung
- 19. Kep. Bangka Belitung
- 21. Kep Riau
- 31. DKI Jakarta
- 32. Jawa Barat
- 33. Jawa Tengah
- 34. DI Yogyakarta
- 35. Jawa Timur
- 36. Banten
- 51. Bali
- 52. Nusa Tenggara Barat
- 53. Nusa Tenggara Timur
- 61. Kalimantan Barat
- 62. Kalimantan Tengah
- 63. Kalimantan Selatan
- 64. Kalimantan Timur
- 71. Sulawesi Utara
- 72. Sulawesi Tengah
- 73. Sulawesi Selatan
- 74. Sulawesi Tenggara
- 75. Gorontalo
- 76. Sulawesi Barat
- 81. Maluku
- 82. Maluku Utara
- 91. Papua Barat
- 94. Papua

Legenda : Rata-Rata Lama Sekolah 2012

	< 64.5
	64.5 - 67.5
	67.5 - 69.5
	> 69.5



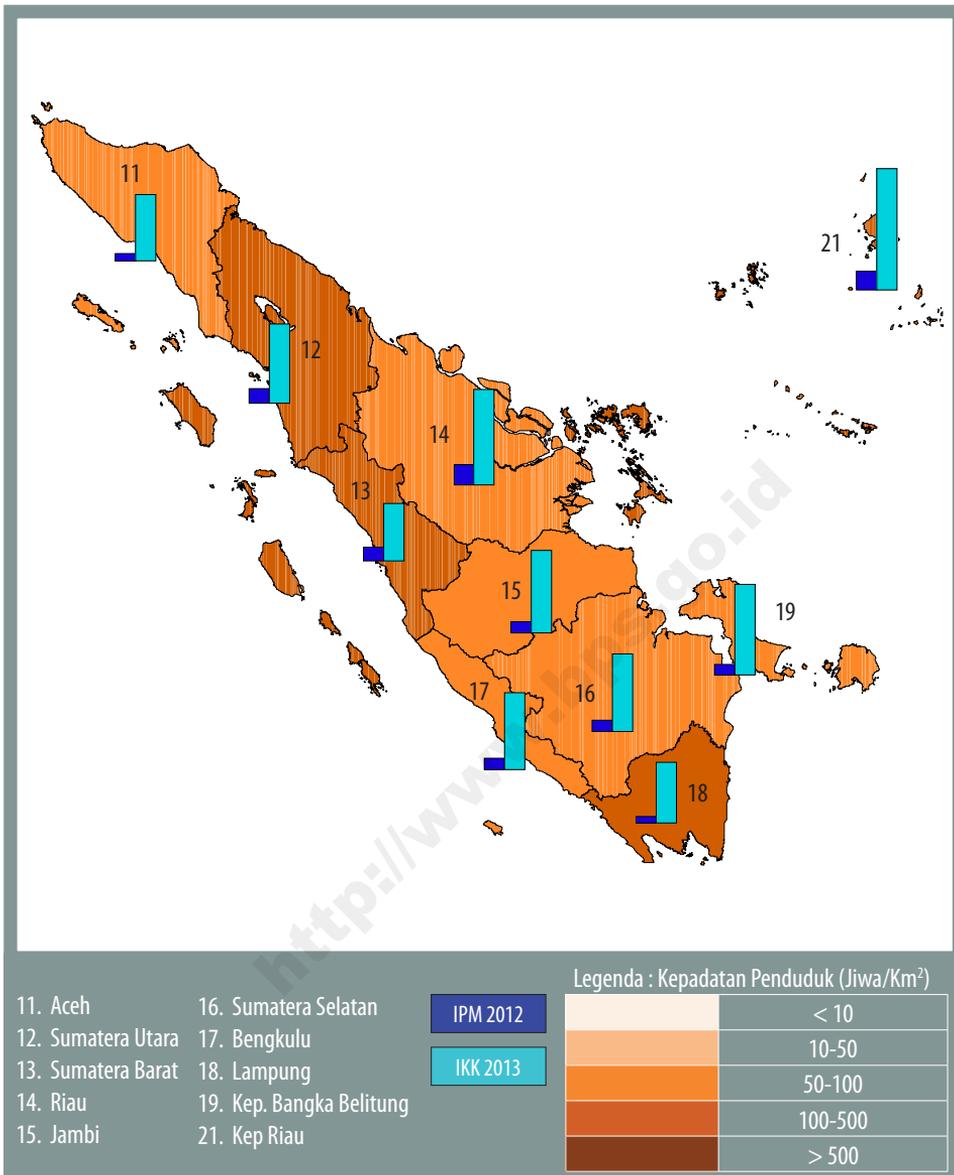
Lampiran 8

Paritas Daya Beli (PPP) menurut Provinsi, 2012



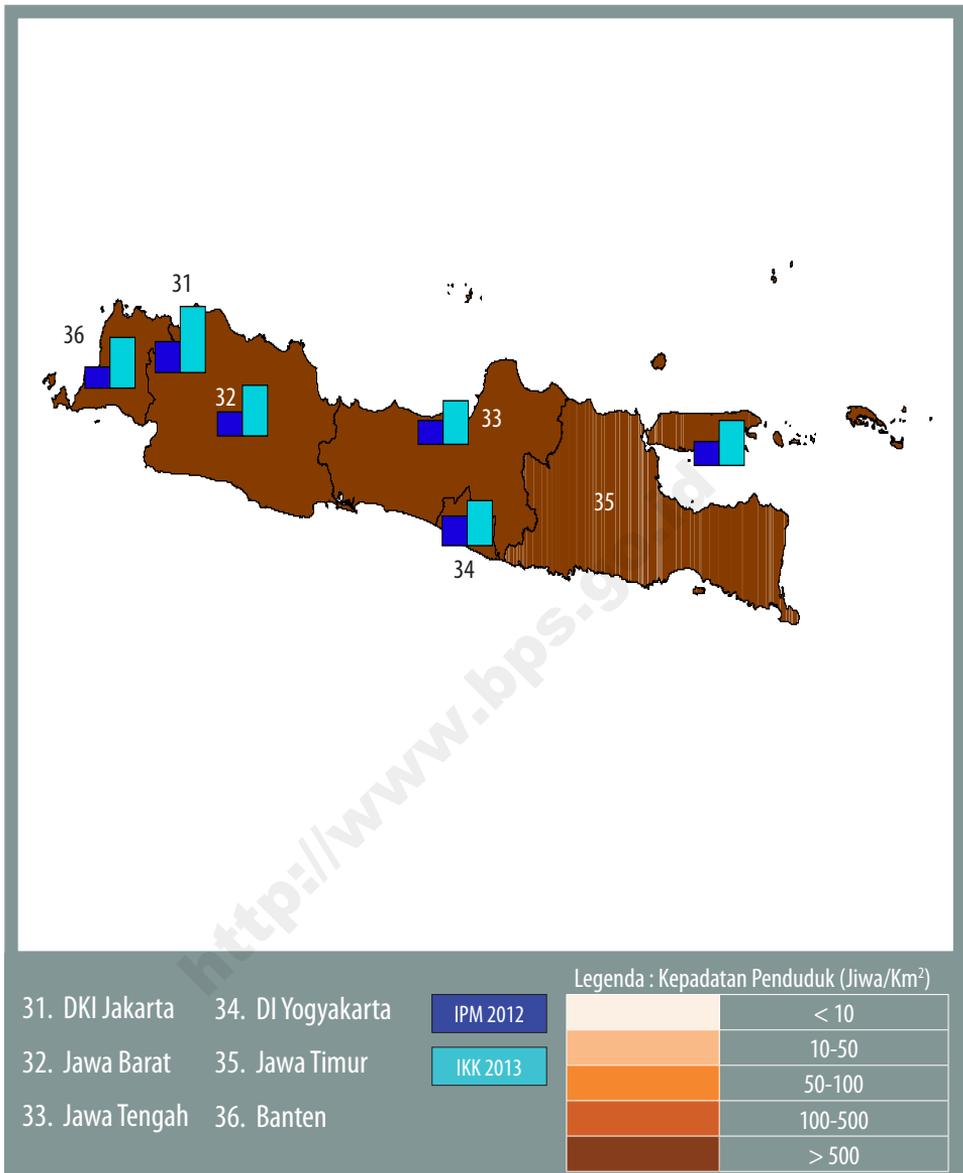
Lampiran 9

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sumatera



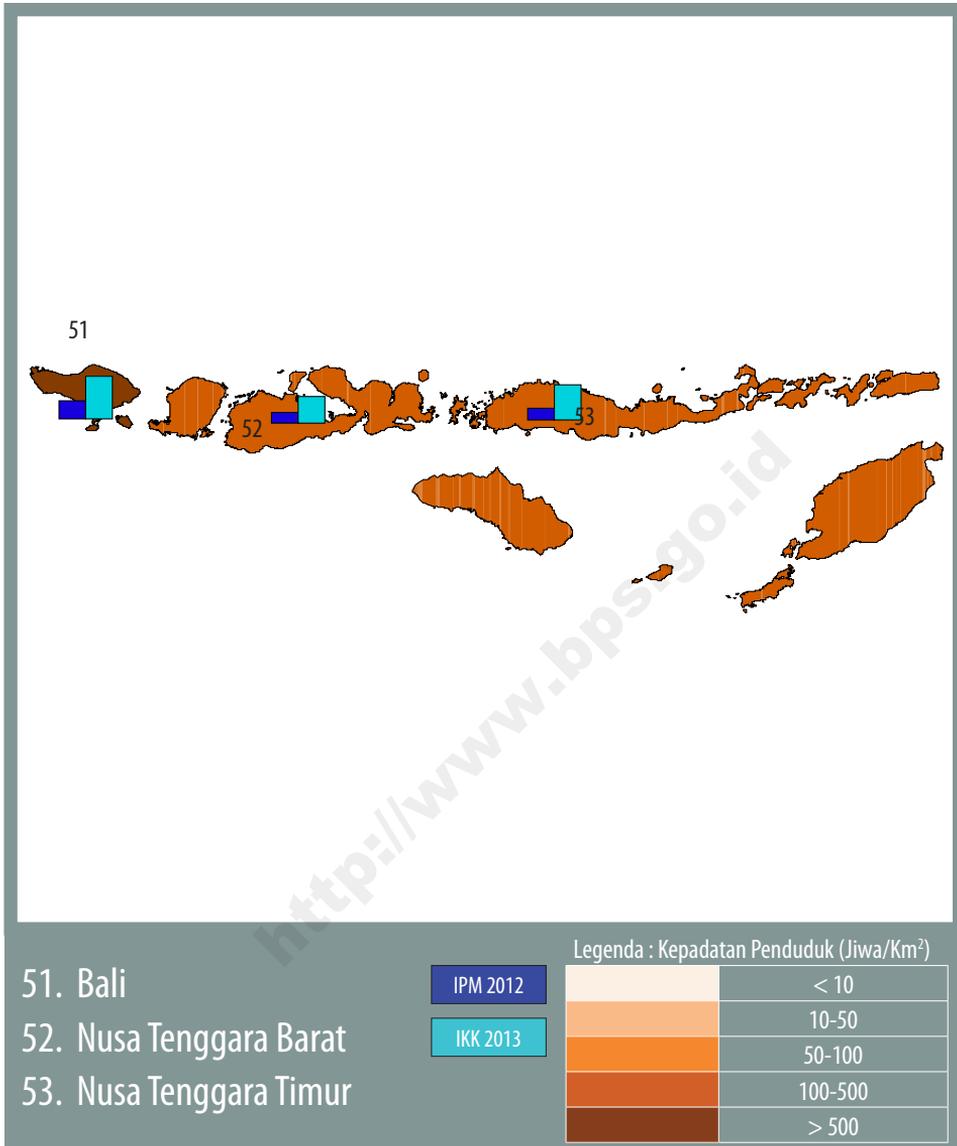
Lampiran 10

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Jawa



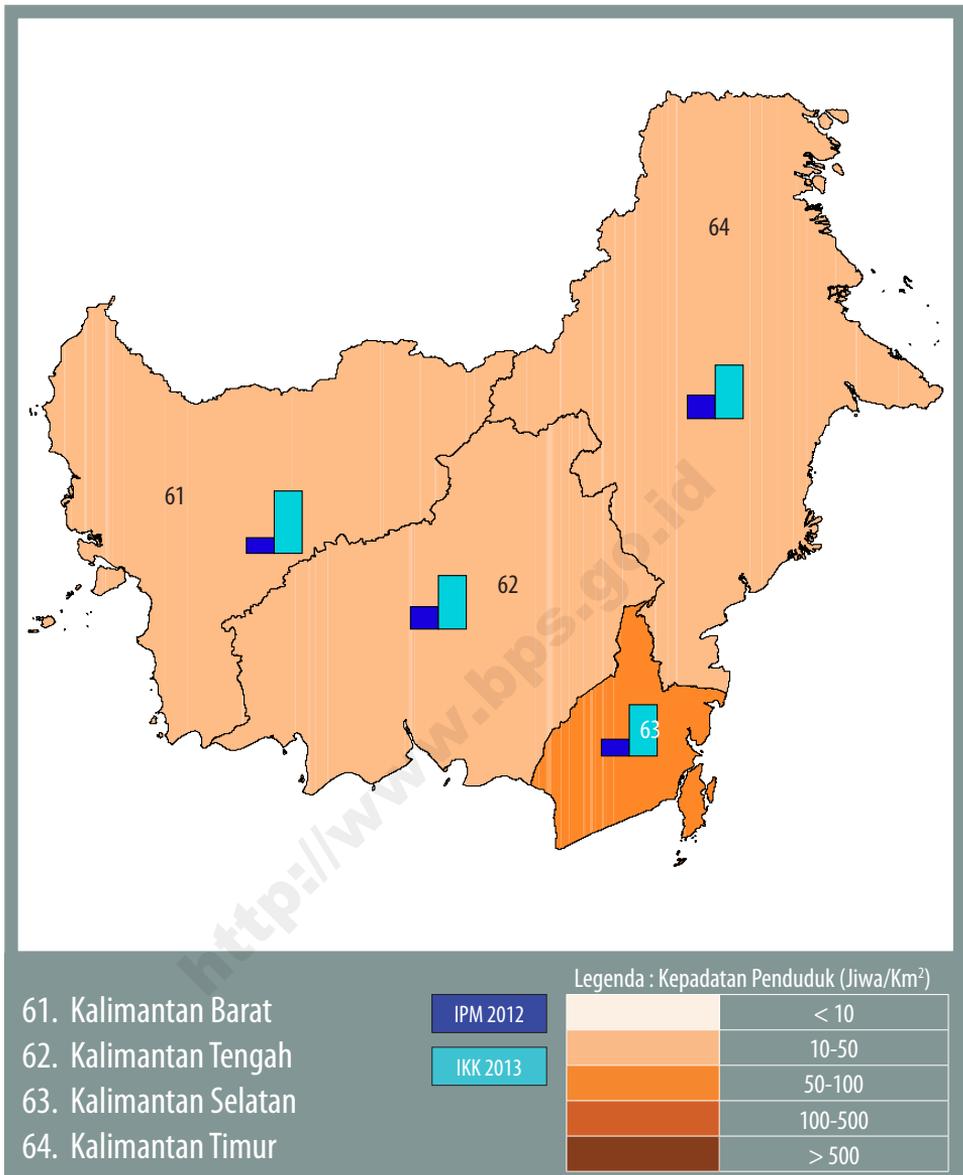
Lampiran 11

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara



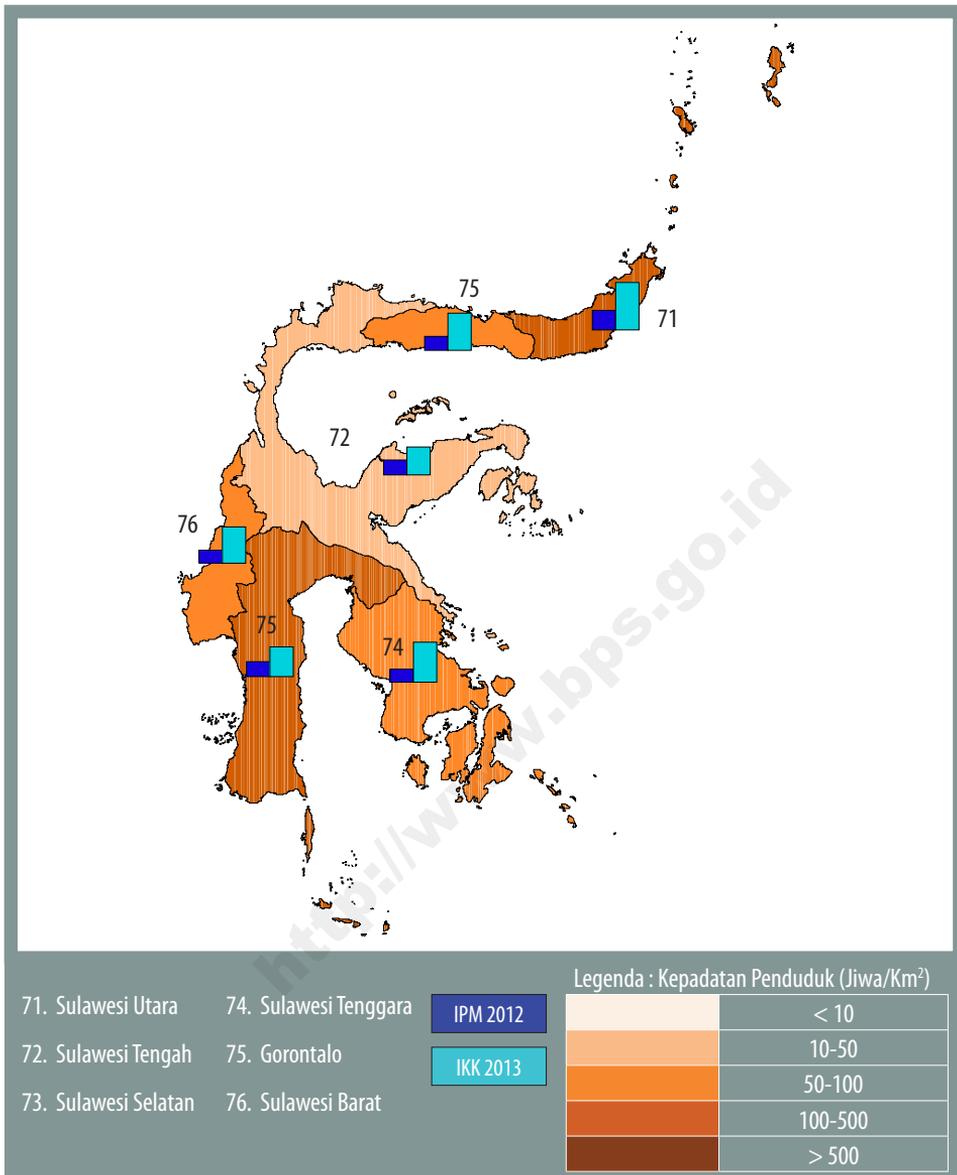
Lampiran 12

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Kalimantan



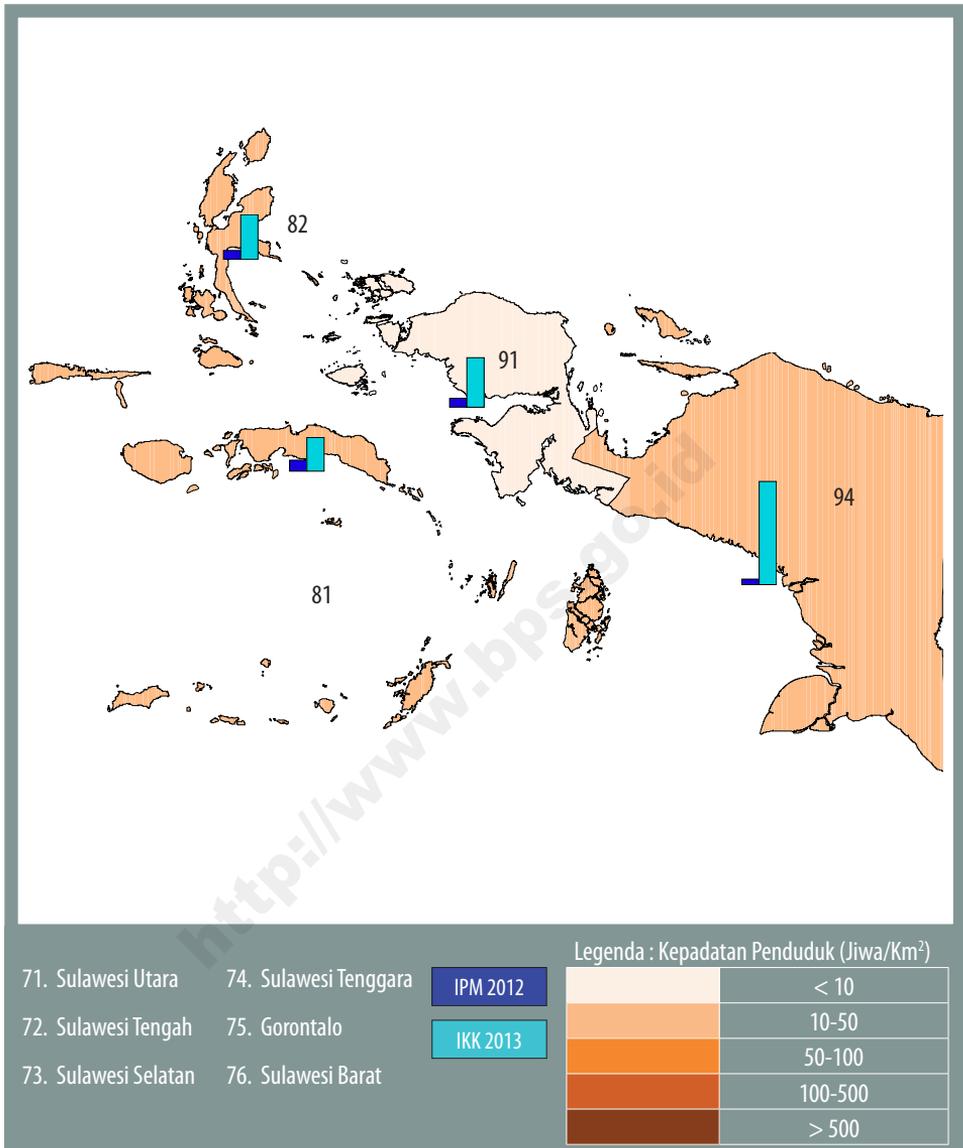
Lampiran 13

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sulawesi



Lampiran 14

Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2013, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua

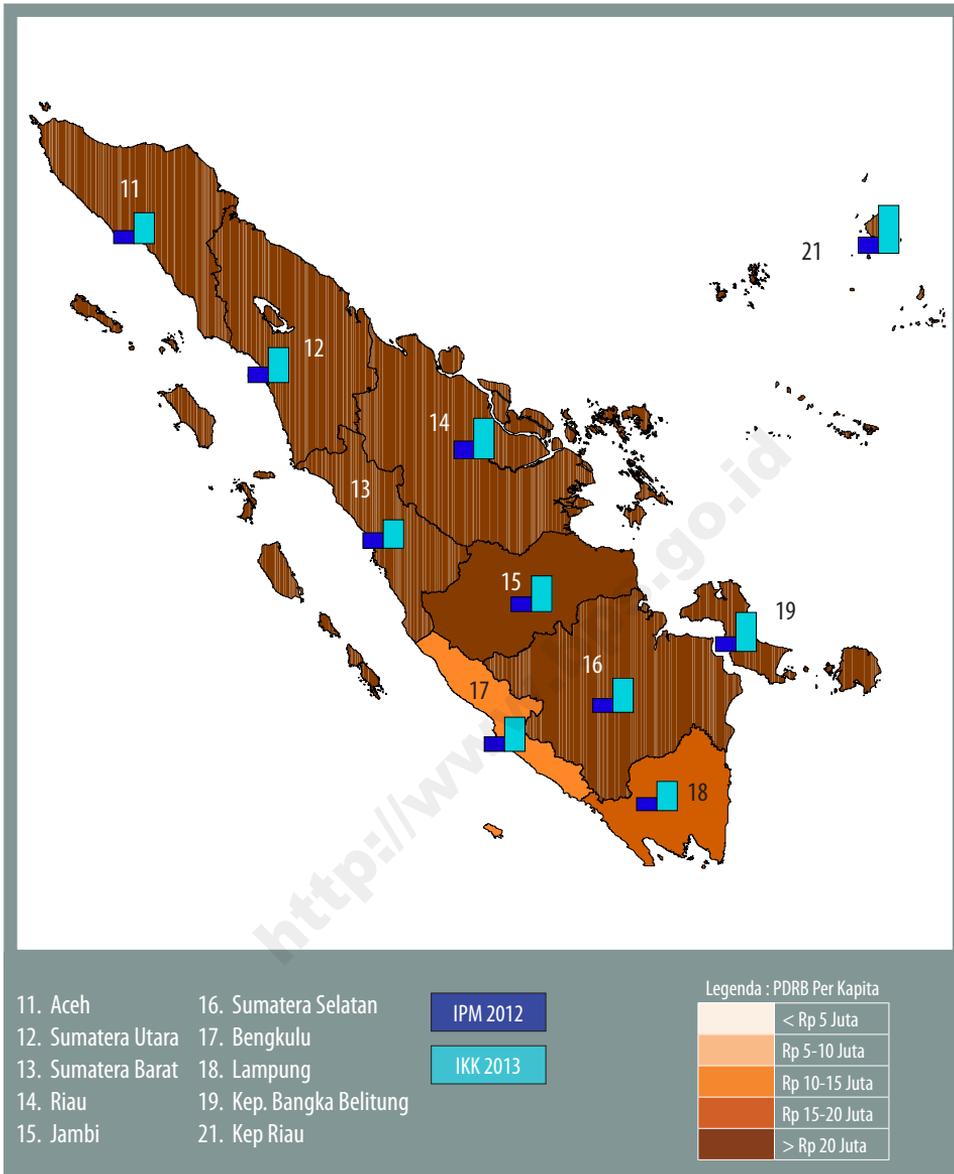


- 71. Sulawesi Utara
- 72. Sulawesi Tengah
- 73. Sulawesi Selatan
- 74. Sulawesi Tenggara
- 75. Gorontalo
- 76. Sulawesi Barat

IPM 2012
IKK 2013

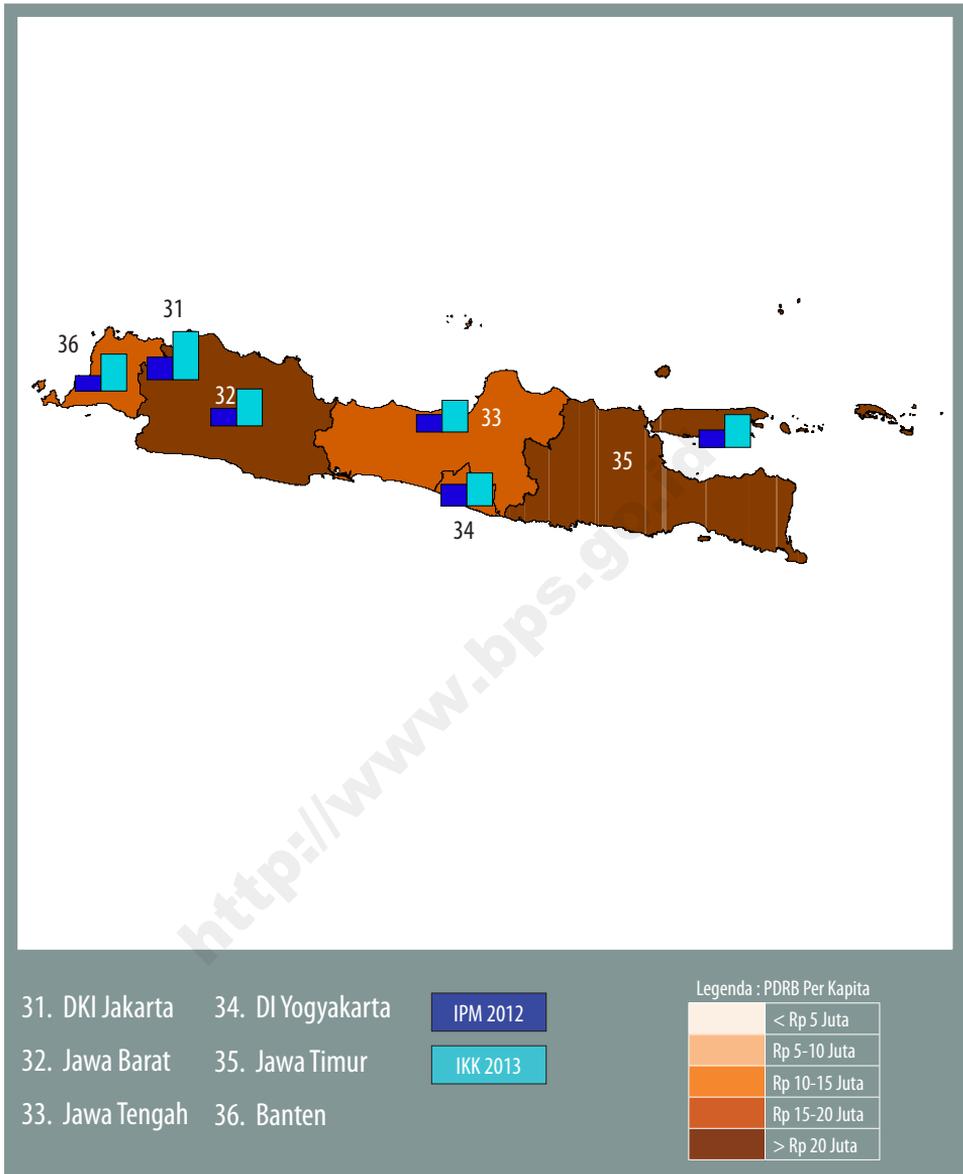
Lampiran 15

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sumatera



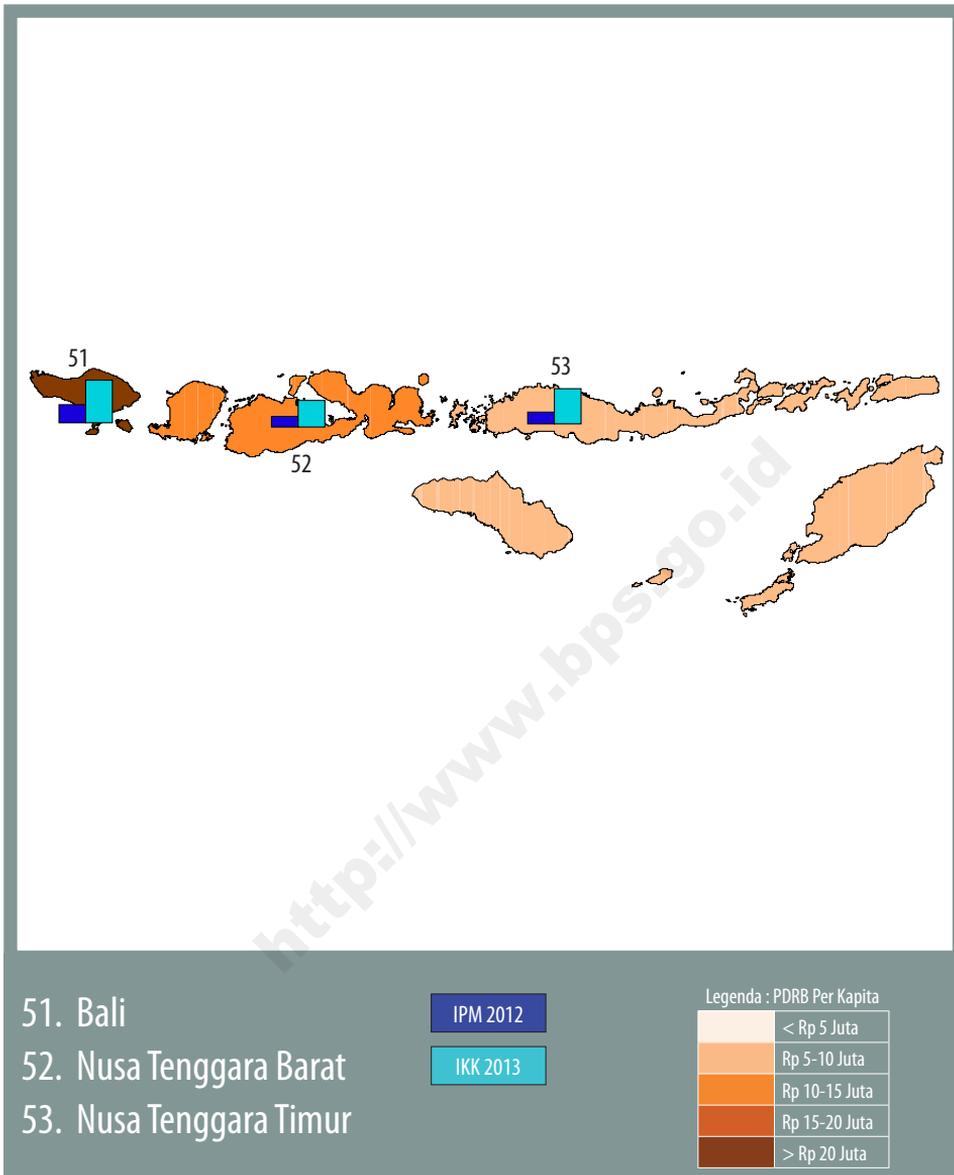
Lampiran 16

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Jawa



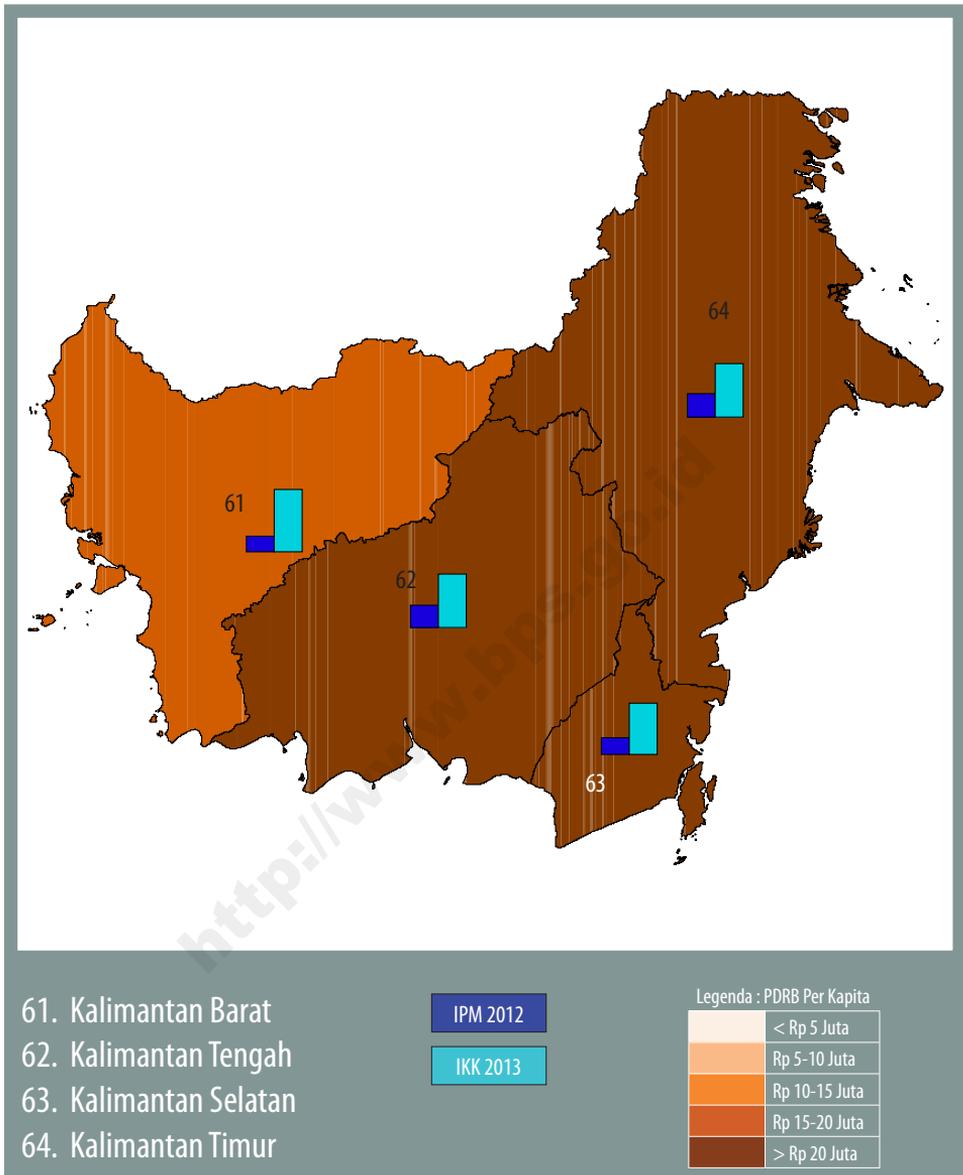
Lampiran 17

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara



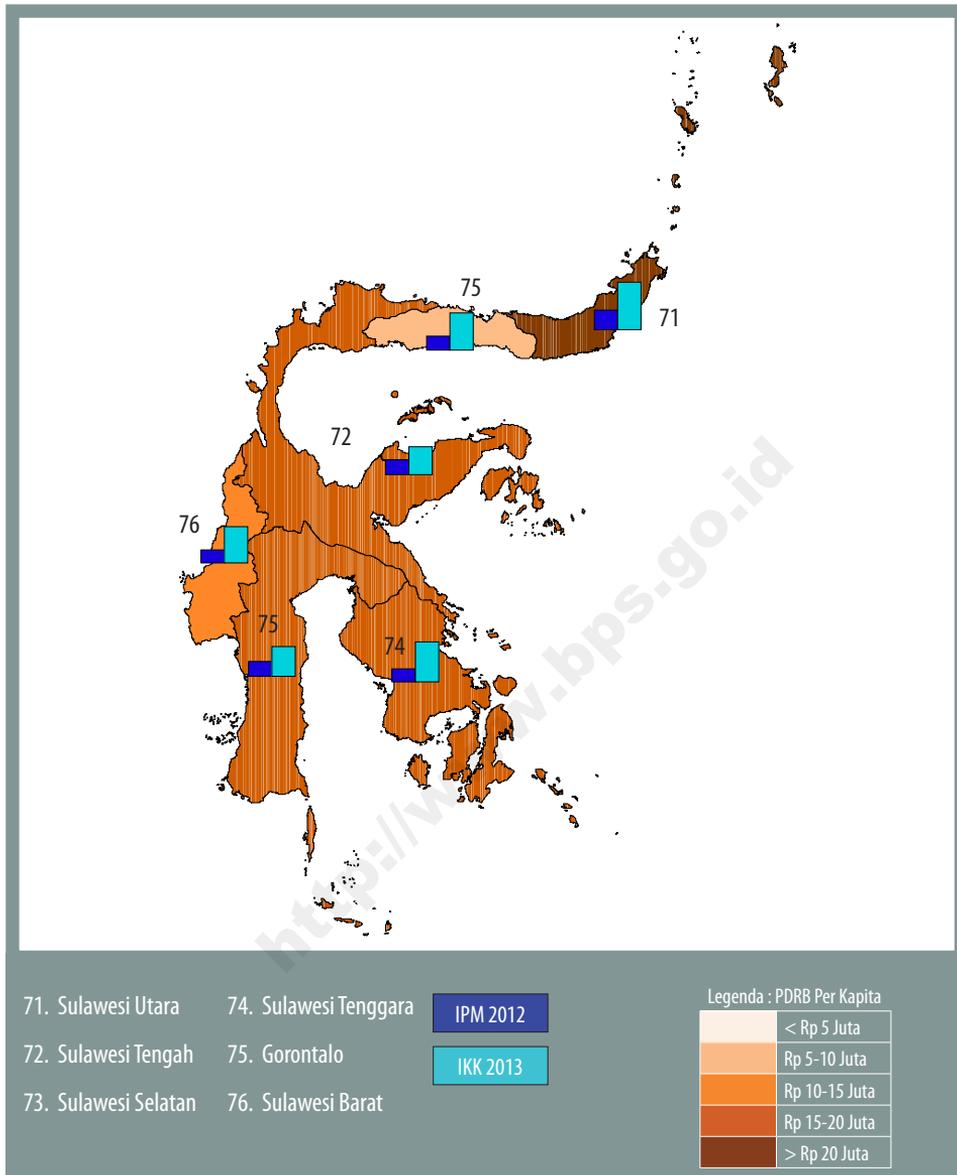
Lampiran 18

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Kalimantan



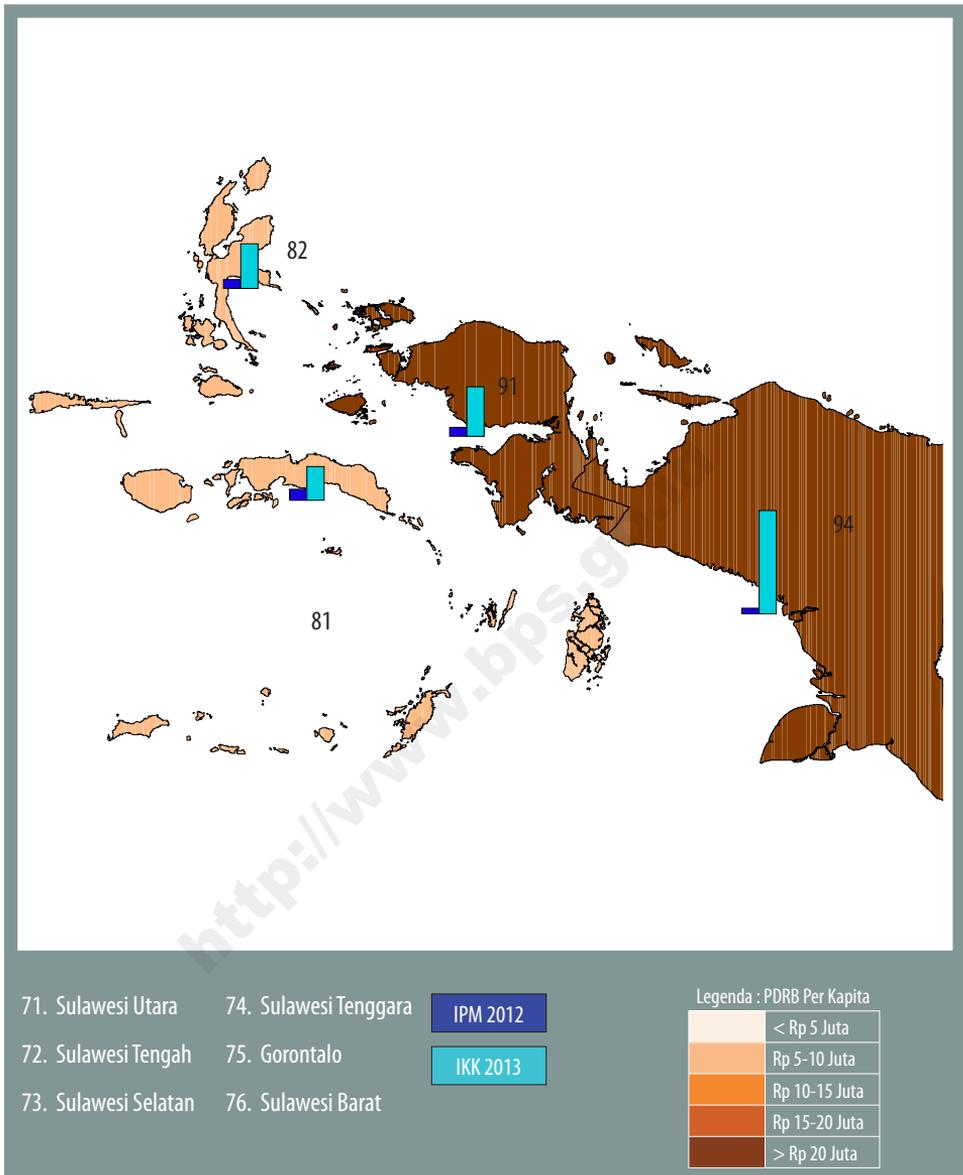
Lampiran 19

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Sulawesi



Lampiran 20

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas 2012, IPM 2012, dan IKK 2013 menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710

Tel. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4 Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISBN. 978-979-064-631-5

